

RENCANA STRATEGIS



BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025 - 2029

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA

NOMOR HK.02.02.10A.12.25.141 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Yogyakarta untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Yogyakarta dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

BAB I PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut, diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Yogyakarta untuk periode 2025-2029 sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan, yang dirancang tidak hanya untuk menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BBPOM di Yogyakarta untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.



Renstra BBPOM di Yogyakarta 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Yogyakarta bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di dalam Peraturan Badan POM tersebut bahwa Balai Besar POM di Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Balai Besar POM di Yogyakarta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Tugas Balai Besar POM di Yogyakarta yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Yogyakarta dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, struktur organisasi pada Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut, kedudukan Balai Besar POM di Yogyakarta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.

Berdasarkan PerMenPAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah, sehingga di Balai Besar POM di Yogyakarta hanya ada 2 (dua) jabatan struktural yaitu:

- Pejabat pimpinan pratama: Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta.
- Pejabat administrator: Kepala Bagian Tata Usaha.

Sedangkan untuk menjalankan tugas dan fungsi, dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinatori oleh Ketua Tim Kerja.

Penataan Organisasi Balai Besar POM di Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, cakupan pengawasan wilayah BBPOM di Yogyakarta mempunyai 5 (lima) Kabupaten/ Kota yaitu: 1). Kota Yogyakarta; 2). Kabupaten Sleman; 3). Kabupaten Bantul; 4). Kabupaten Kulon Progo dan 5). Kabupaten Gunungkidul seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta

Ketatalaksanaan

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi BBPOM di Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Sertifikasi/Akreditasi ISO digolongkan pada sifat sebagai berikut:

1. Bersifat mandatory diantaranya: SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem manajemen Laboratorium Pengujian.
2. Bersifat *voluntary* untuk lingkup: SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

I.1.1 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Periode Renstra 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Yogyakarta.

Selama 5 (lima) tahun, nilai kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian Balai Besar POM di Yogyakarta selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan nilai kinerjanya yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis BBPOM di Yogyakarta Tahun 2020–2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta															
IKSK.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	87,00	90,48	104,00	90,00	86,77	96,41	90,50	81,45	90,00	91,00	93,61	102,87	91,50	92,06	100,61
IKSK.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	72,78	93,31	80,00	85,14	106,43	82,00	80,68	98,39	84,00	80,87	96,27	86,00	85,81	99,78
IKSK. 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	81,49	92,60	88,30	80,17	90,79	88,60	80,48	90,84	89,00	89,68	100,76	90,00	87,18	96,87
IKSK.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	86,49	98,28	86,50	71,53	82,69	88,00	86,67	98,49	89,00	82,97	93,22	90,00	85,27	94,74
IKSK.5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				95,00	74,78	78,72	96,00	76,92	80,13	97,50	74,55	76,46	99,00	94,12	95,07
SK.2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta															
IKSK. 6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	72,00	76,68	106,50	80,00	84,97	106,21	82,00	84,71	103,30	84,00	87,86	104,60	86,00	89,59	104,17
SK.3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta															
IKSK. 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,00	85,51	104,28	86,60	90,10	104,04	87,70	95,90	109,35	88,80	98,70	111,15	89,90	99,46	110,63

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKSK. 8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71,00	75,89	106,89	78,17	64,71	82,78	80,45	76,81	95,48	82,73	82,36	99,55	85,01	84,51	99,41
IKSK. 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,50	89,1	100,68	89,5	91,13	101,82	90	91,85	102,06	90,5	96,94	107,12	91	97,81	107,48
SK.4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta															
IKSK. 10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87,00	104,66	120,30	89	105,6 2	118,67	91	96,37	105,90	93	99,16	106,62	95	100,00	105,26
IKSK. 11. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	75,50	68,72	91,02	76	82,86	109,03	81	88,45	109,20	85	95,63	112,51	90	98,50	109,44
IKSK.12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	85,00	99,66	117,25	100	99,24	99,24	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100,00
IKSK. 13. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	46,00	66	143,48	66	56,28	85,27	70	70	100,00	73	81,55	111,71	75	77,13	102,84
IKSK. 14. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	76,42	127,37	76	71,98	94,71	79	74,72	94,58	82	80,94	98,71	85	82,87	97,49
IKSK. 15. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	4,31	4,29	99,54	4,4	4,57	103,86	4,51	4,96	109,98	4,55	4,93	108,35	4,6	5,00	108,70
IKSK. 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77	90,91	118,06	79	94,44	119,54	81	100,00	123,46

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKSK. 17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota													89	100	112,36
SK.5. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Yogyakarta															
IKSK. 18. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,85	92,25	106,22	92	92,95	101,03	93,8	93,86	100,06	95,7	96,23	100,55	97,6	97,15	99,54
IKSK. 19. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100,00	40	40	100,00	63	63	100,00	86	86	100,00	109	109,00	100,00
IKSK. 20. Jumlah Desa Pangan Aman	6	6	100,00	14	14	100,00	21	21	100,00	29	29	100,00	36	36,00	100,00
IKSK. 21. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	1	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00	4	4	100,00	5	5,00	100,00
SK.6. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang Optimal															
IKSK. 22. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	80,00	88,89	111,11	100	94,79	94,79	100	98,1	98,10	100	99,94	99,94	100	100,00	100,00
IKSK. 23. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	80,00	86,39	107,99	100	99,53	99,53	100	98,89	98,89	100	100	100,00	100	100,00	100,00
SK.7. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta															
IKSK. 24. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	81	96,25	118,83	83	48,28	58,17	85	75,52	88,85	88	53,75	61,08	90	80,36	89,29
SK.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang Optimal															

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKSK. 25. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	91,00	80,36	88,31	85,5	85,49	99,99	86,5	91,72	106,03	87,5	86,1	98,40	88,5	89,42	101,04
IKSK. 26. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	81,00	81,13	100,16	83,6	82,37	98,53	86,1	80,42	93,40	88,6	80,47	90,82	91,1	81,86	89,86
IKSK.27. Nilai Pengelolaan Kearsipan													97,25	98,45	101,23
SK.9. Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang Berkinerja Optimal															
IKSK. 28. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	75,00	85,61	114,15	85,7	84,81	98,96	85,8	86,63	100,97	85,9	90,93	105,86	86	88,28	102,65
SK.10. Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK. 29. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	80	74,7	93,38	79	80,4	101,77	84	87,3	103,93	89	88,71	99,67	94	91,98	97,85
IKSK. 30. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	1,51	1,95	129,14	2	1,78	89,00	2,25	2,81	124,89	2,5	3	120,00	3	3,00	100,00
SK.11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Secara Akuntabel															
IKSK. 31. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta	93,00	92,38	99,33	92,9	90,53	97,45	93,5	89,65	95,88	94,7	89,18	94,17	95,9	93,85	97,86
IKSK. 32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													70,00	100,00	142,86
IKSK. 33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													75	94,72	126,29
IKSK. 34. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri													60	69,06	115,10
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Yogyakarta	95,00	100,00	105,26	94	75	79,79									

Pengukuran kinerja BBPOM di Yogyakarta mengacu pada Sasaran Kegiatan BPOM Periode RENSTRA 2020-2024 yang disusun berdasarkan visi dan misi, dengan pendekatan metode *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*.

BBPOM di Yogyakarta memiliki 11 Sasaran Kegiatan dan 34 indikator kinerja utama (IKU), dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Sasaran Kegiatan (SK 1)

Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

Sasaran Kegiatan 1 diukur dengan 5 (lima) indikator sebagai berikut: 1). Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; 2). Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat; 3). Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 4). Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan 5). Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

1. IKS 1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

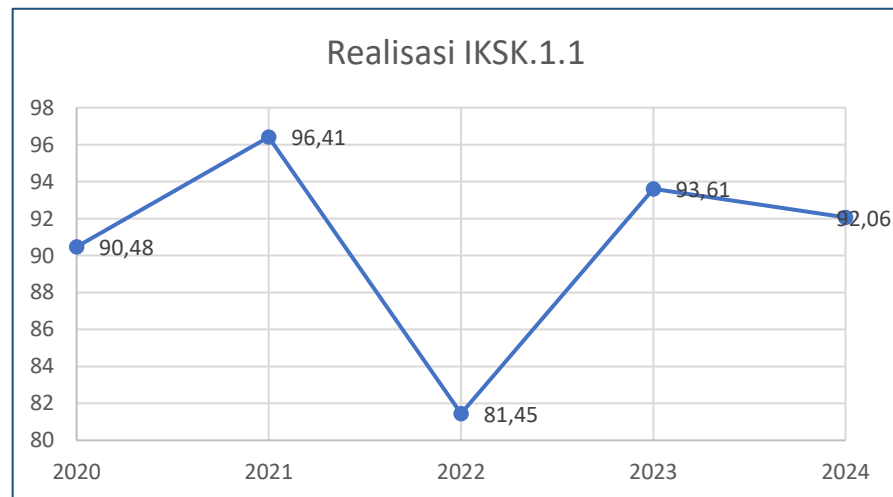


Diagram 1. Realisasi IKS 1.1

IKSK ini merupakan indikator yang bersifat memotret kondisi peredaran obat yang disampling secara acak di wilayah di DIY.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan sekitar 1,58% dibandingkan dengan awal

periode renstra (2020). Pada tahun 2022 realisasi persentase obat memenuhi syarat terendah dibandingkan realisasi di tahun-tahun yang lain (81,45%). Pada tahun tersebut terdapat perubahan ketentuan dalam evaluasi penandaan sesuai ketentuan. Realisasi tahun 2023 meningkat sangat signifikan yaitu 12,16%, sehingga di awal tahun 2024 dilakukan revisi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 93,7% sebagai target optimis. Namun karena realisasi 2024 turun menjadi 92,06%, sehingga capaiannya 98,25% kategori cukup.

2. IKS 1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

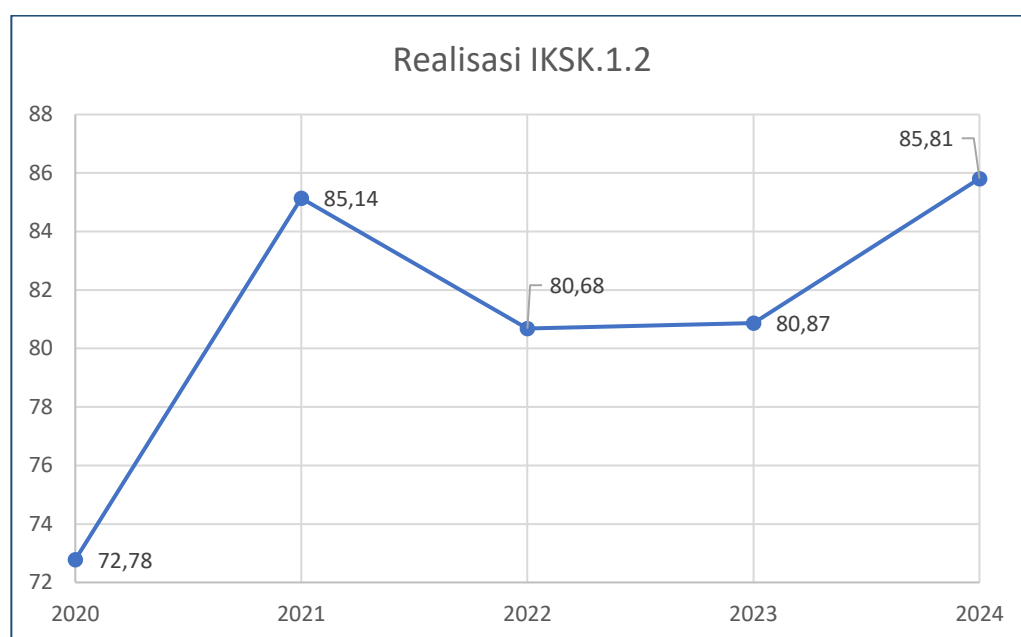


Diagram 2. Realisasi IKS 1.2

IKSK ini merupakan indikator yang bersifat memotret kondisi peredaran pangan yang disampling secara acak di wilayah DIY.

Terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada realisasi tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 12,36% namun di tahun 2022 realisasi menurun sekitar 4,46%. Karena realisasi tahun 2022 dan 2023 hanya sekitar 80%, maka awal tahun 2024 diusulkan revisi target menjadi 81% yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Capaian tahun 2024 bila dibandingkan dengan target pada Perjanjian kinerja 2024 adalah 105,95% (Sangat Baik).

3. IKSK 1.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

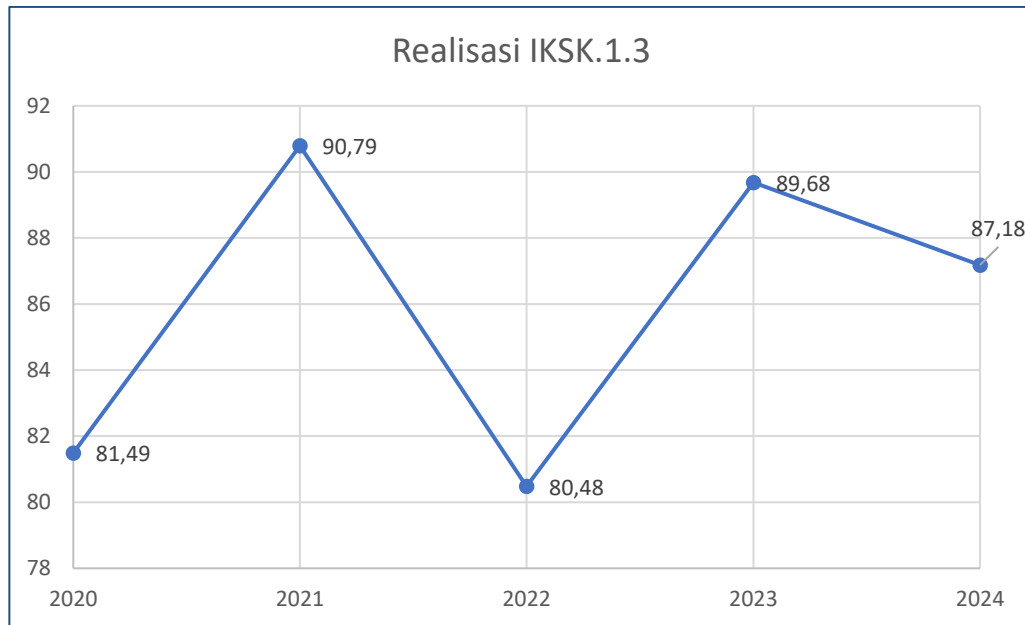


Diagram 3. Realisasi IKSK 1.3

Seperti halnya IKSK 1, IKSS ini merupakan indikator yang bersifat memotret kondisi peredaran obat yang disampling targeted di DIY.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu pada tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 5,68% dibandingkan dengan awal periode renstra (2020). Realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2021 yaitu 90,79%. Pada tahun 2022 realisasi persentase obat memenuhi syarat terendah dibandingkan realisasi di tahun-tahun yang lain (81,45%). Pada tahun tersebut terdapat perubahan ketentuan dalam evaluasi penandaan pada komoditi obat tradisional, suplemen Kesehatan, obat kuasi dan kosmetik. Pada tahun 2023 realisasi kembali meningkat menjadi 89,68% dengan capaian 100,76% (Sangat Baik). Karena hasil yang baik tersebut maka target pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja menjadi 89,75%.

Pada akhir periode Renstra realisasi turun menjadi 87,18%, sehingga jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja capaiannya 97,14% (Cukup).

4. IKSK 1.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

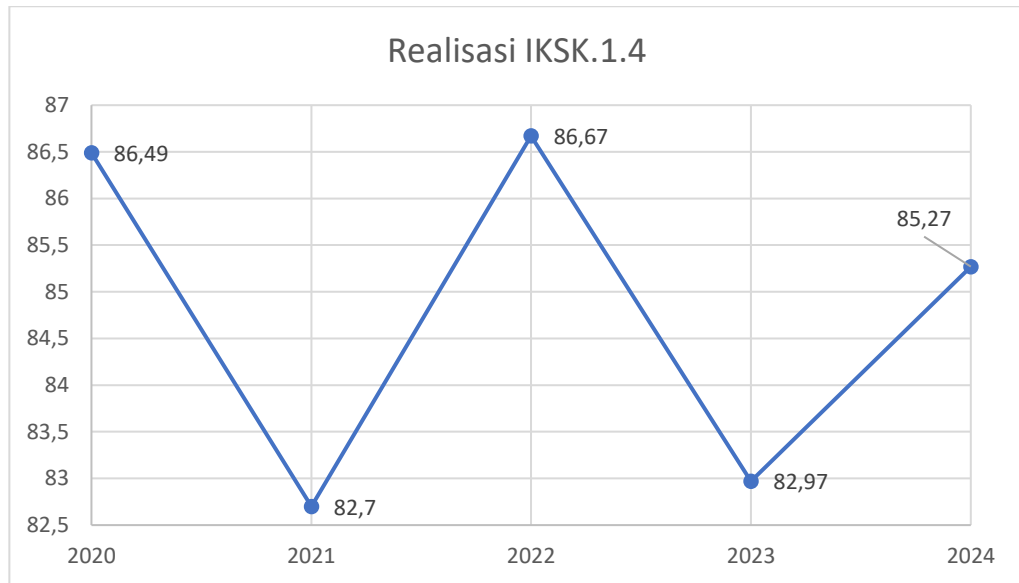


Diagram 4. Realisasi IKSK 1.4

IKSK ini merupakan indikator yang bersifat memotret kondisi peredaran pangan yang disampling secara targeted di wilayah DIY.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi tergantung pada sampel targeted yang diuji. Realisasi indikator tertinggi pada tahun 2022 yaitu 86,67%, dan terendah di tahun 2021 yaitu 82,7%. Dengan melihat tren realisasi ini maka pada awal 2024 dilakukan review terhadap target Renstra yang kemudian disetujui penurunan target pada Perjanjian Kinerja menjadi 83% sehingga lebih *achievable*. Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah melampaui, dengan capaian sebesar 102,74% kategori Sangat Baik.

B. Sasaran Kegiatan (SK 2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta.

1. IKS.2.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

IKSK.2.1. merupakan indikator pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, berdasarkan pengetahuan, sikap dan perilaku tiap responden.

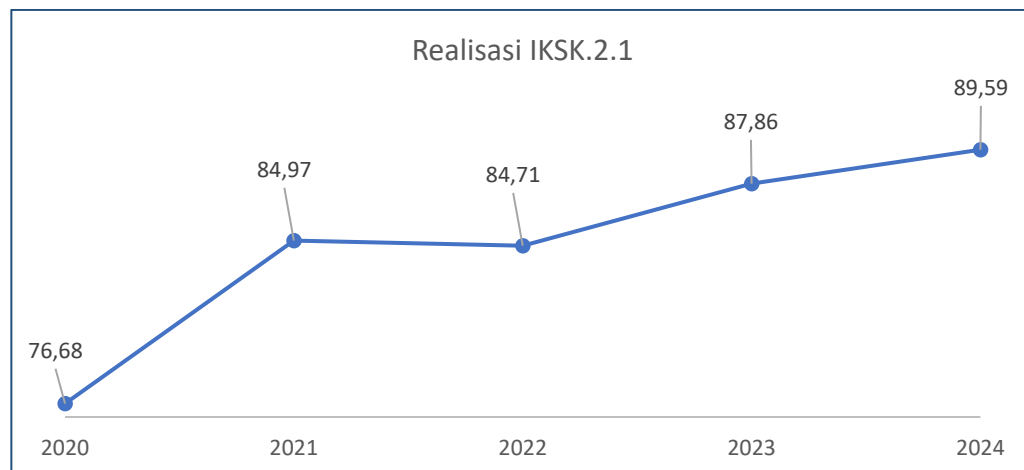


Diagram 5. Realisasi IKS.2.1

Realisasi Indeks Kesadaran dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan kecuali di tahun 2022 yang mengalami penurunan namun masih melebihi target yang ditetapkan. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 89,59%. Kenaikan nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat DIY sebagai responden telah mengalami peningkatan dalam pengetahuan, sikap dan perilaku untuk memilih Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat. Pada tahun 2024 terdapat perubahan target perjanjian kinerja dari nilai Indeks 86% menjadi 88% karena realisasi di tahun 2023 telah melebihi target (87,86%). Meskipun terjadi kenaikan target namun realisasi 2024 masih tercapai melebihi target dengan capaian sebesar 101,8%.

C. Sasaran Kegiatan (SK 3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

Sasaran Kegiatan 3 diukur berdasarkan indikator kinerja: 1). Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; 2). Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan makanan; 3). Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan publik BBPOM di Yogyakarta

1. IKSK.3.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Obat dan Makanan

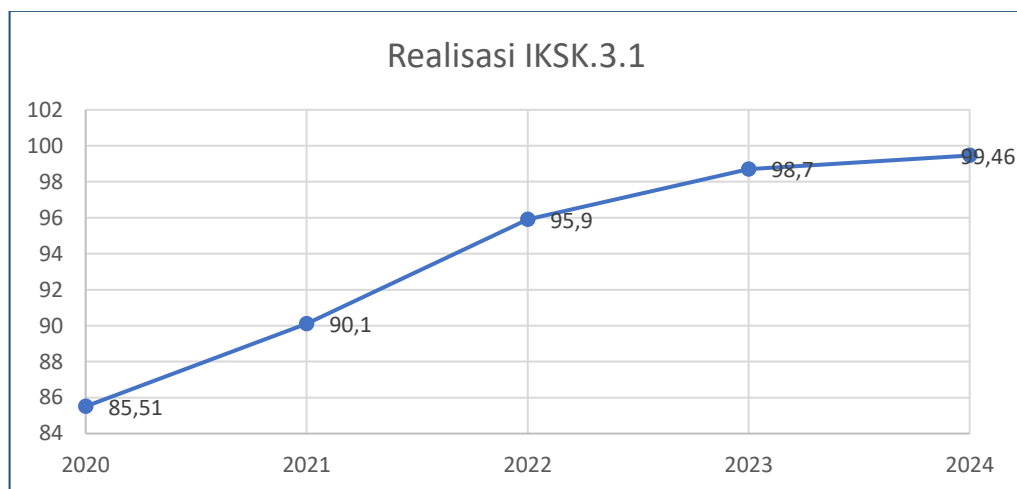


Diagram 6. Realisasi IKSK.3.1

IKSK ini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kepuasan pelaku usaha obat dan makanan terhadap kegiatan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk obat dan Makanan.

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Obat dan Makanan pada tahun 2021-2024 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan awal periode renstra (2020). Jika dilihat realisasi indeks tahun 2020-2024, terlihat trend kenaikan yang signifikan, bahkan jika dibandingkan realisasi awal renstra (2020) dan akhir renstra (2024) kenaikan mencapai 16.31%, dimana realisasi tertinggi pada akhir renstra mendekati 100% atau 99.46%, dan jika dibandingkan dengan target PK maka capaiannya 100,67% dengan kategori Sangat Baik. Tingginya indeks tingkat kepuasan pelaku usaha ini dapat diartikan pelaku usaha sangat puas

dengan layanan publik berupa bimbingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Yogyakarta, sehingga kegiatan ini harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan terus melaksanakan pendampingan dan memberikan kemudahan terhadap layanan sertifikasi, salah satunya dengan adanya inovasi-inovasi kemudahan dan percepatan layanan publik, seperti Berpendar, Berperisa, Lancip, dan Sipaling BPOM.

2. IKS.3.2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan makanan

IKS.3.2. adalah tolok ukur untuk menilai kualitas kinerja pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM di Yogyakarta. Penerima layanan adalah masyarakat wilayah Yogyakarta.

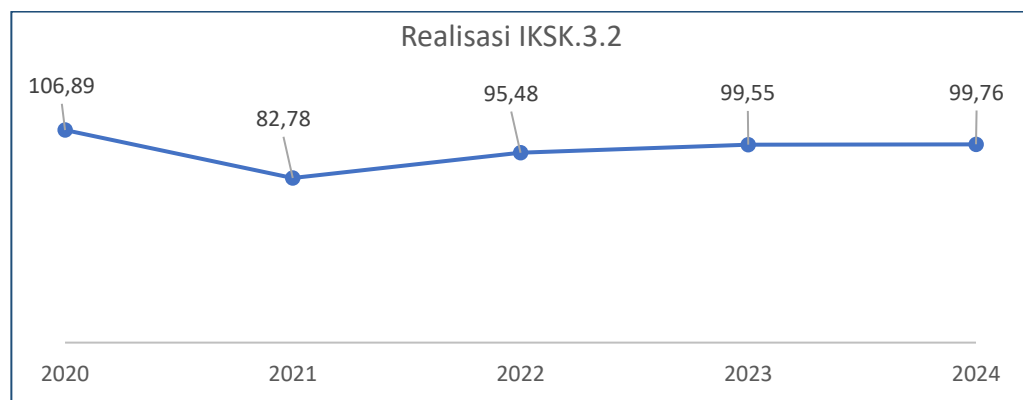


Diagram 7. Realisasi IKS.3.2

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, dari tahun ke tahun semakin membaik. Perlu upaya upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan. Pada tahun 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja dari target 85,01 menjadi 83,2 karena di tahun 2023 capaian di bawah target yaitu 82,36. Tahun 2024, capaian 83,00.

3. IKS.3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Yogyakarta

IKSK.3.3 adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (BBPOM Di Yogyakarta) kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

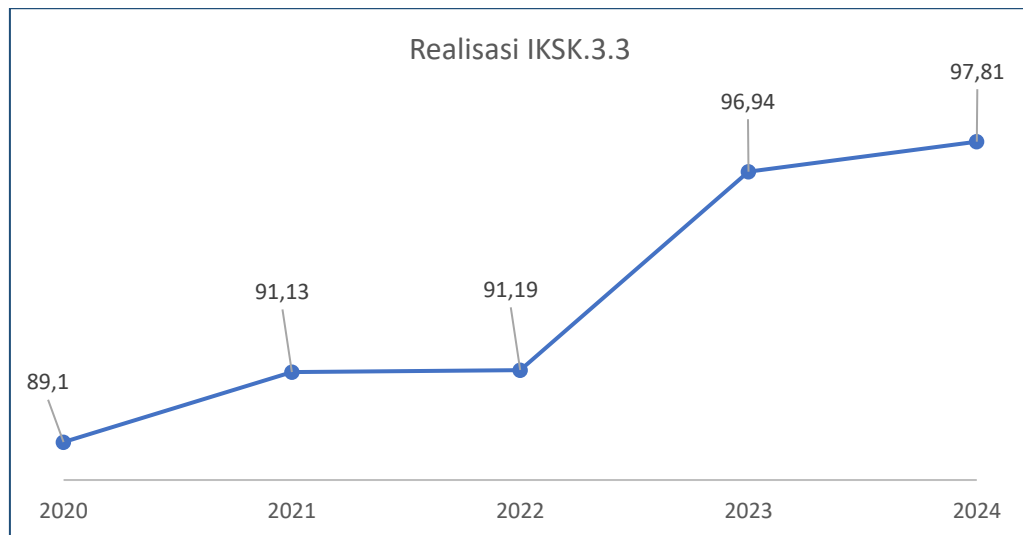


Diagram 8. Realisasi IKS.3.3

Hasil nilai SKM menunjukkan nilai yang semakin meningkat setiap tahun, secara umum masyarakat telah puas dengan layanan yang diberikan oleh BBPOM di Yogyakarta. Kriteria mutu pelayanan berada pada kategori Sangat Baik karena berada dalam kisaran nilai 88,31–100. Pada tahun 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja dari target 91 menjadi 97,5 karena di tahun 2023 capaian telah melebihi target (96,94). Meskipun target dinaikkan namun realisasi masih melebihi target dengan capaian 100,32%.

D. Sasaran Kegiatan (SK 4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut: 1). Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; 2). Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; 3). Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; 4). Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; 5). Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; 6). Indeks Pelayanan Publik; dan (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kos yang baik.

1. IKSK.4.1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

IKSK.4.1. Indikator keberhasilan pengawasan obat dan makanan serta semakin baik koordinasi dan komunikasi dengan stake holder. Hal ini juga menunjukkan semakin baiknya respon terhadap isu-isu yang berkembang dimasyarakat dan perlindungan kepada masyarakat semakin baik.

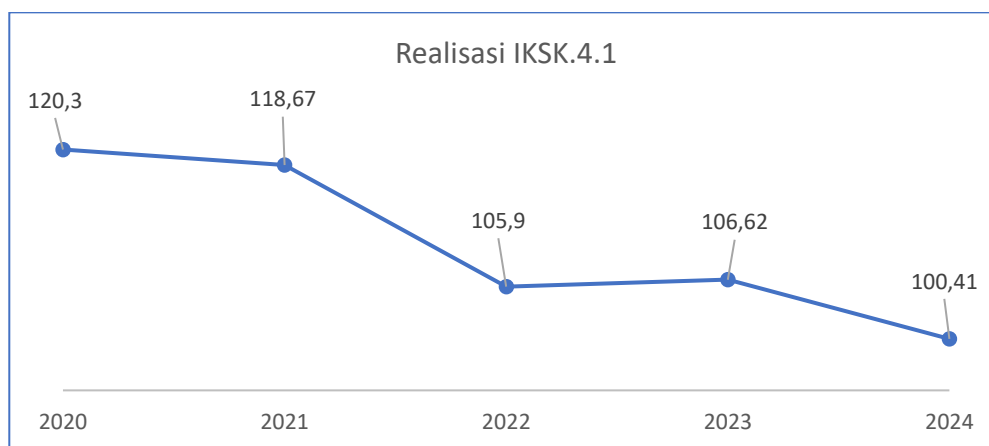


Diagram 9. Realisasi IKSK.4.1

Hasil persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, capaian tiap tahunnya walaupun fluktuatif, namun capaian kinerja masih sangat baik. Hal ini menunjukkan semakin baiknya koordinasi dengan stakeholder dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan. Pada tahun 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja dari target 95 menjadi 99,2 karena di tahun 2023 capaian telah melebihi target (99,16). Pada tahun 2024, realisasi melebihi target dengan capaian 100,41%.

2. IKSK.4.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

IKSK.4.2. Indikator ini merupakan indikator banyaknya rekomendasi hasil pengawasan yang di tindaklanjuti baik oleh pemangku kepentingan/pemerintah daerah juga pelaku usaha.

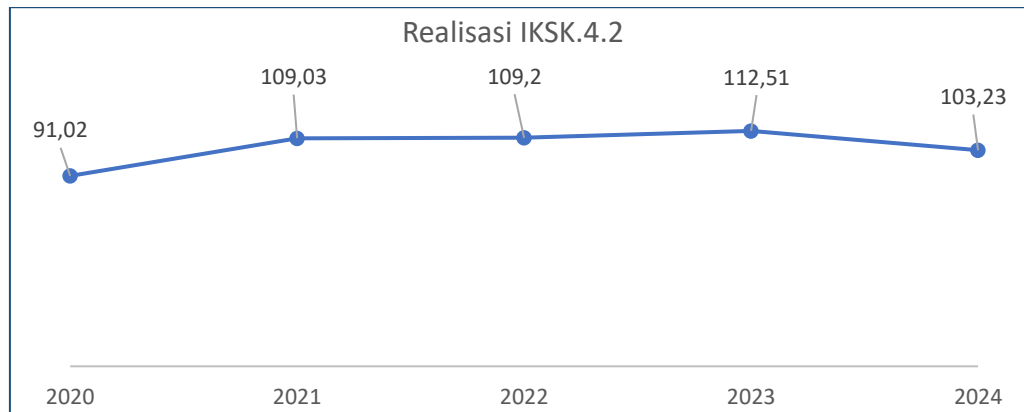


Diagram 10. Realisasi IKSK.4.2

Indikator keberhasilan pengawasan obat dan makanan dan pembinaan kepada pelaku usaha semakin baik, terlihat dari capaian yang tetap diatas 100%. Tindak lanjut yang diberikan baik dari pemerintah daerah dan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pengawasan tahun ke tahun semakin baik.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja dari target 90 menjadi 95,7 karena di tahun 2023 capaian telah melebihi target (95,63). Pada tahun 2024, realisasi melebihi target dengan capaian 103,23%.

3. IKS.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

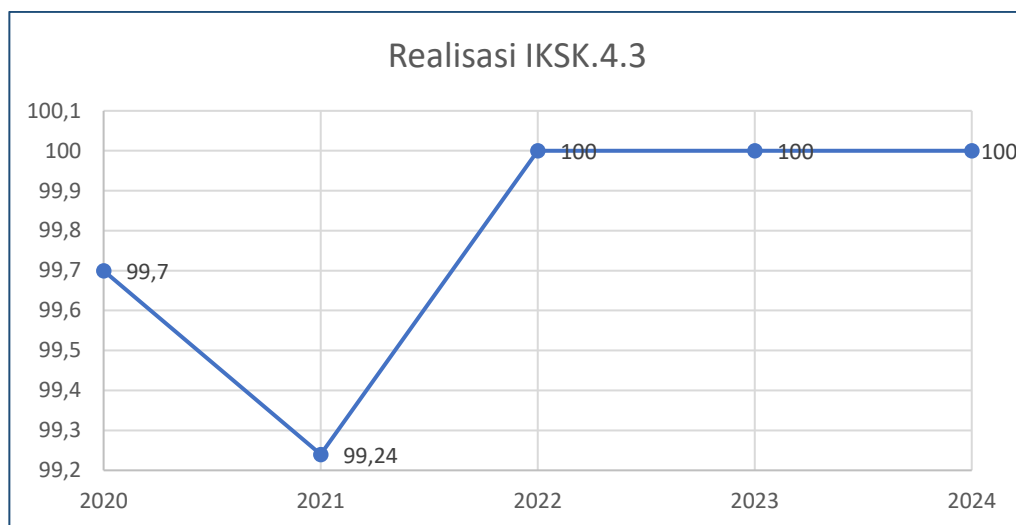


Diagram 11. Realisasi IKS.4.3

IKSK ini merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan timeline layanan publik sertifikasi sesuai SLA (*Service Level Agreement*) yang telah ditetapkan.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021-2024 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan awal periode renstra (2020), bahkan berhasil mencapai 100% di tahun 2022-2024. Terjadi sedikit penurunan realisasi di tahun 2021, hal ini disebabkan terjadi peningkatan target yang cukup signifikan di tahun 2021, yang awalnya sebesar 85% (2020) menjadi sebesar 100% (2021). Jika dibandingkan realisasi awal renstra (2020) dan akhir renstra (2024) terdapat sedikit kenaikan sebesar 0.3%, dimana realisasi akhir renstra mencapai maksimal atau 100%. Realisasi pada 3 tahun terakhir (2021-2024) merupakan realisasi tertinggi dengan realisasi sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan target PK maka capaiannya 100% dengan kategori Sangat Baik. Sejalan dengan tinggi pertumbuhan UMKM, layanan sertifikasi harus terus dilaksanakan sesuai pedoman dan standar yang telah ditetapkan. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, selama periode Renstra 2020-2022 telah dilakukan berbagai macam kegiatan, antara lain, intensifikasi pendampingan, desk CAPA, percepatan layanan, peningkatan kompetensi petugas dan monitoring time line layanan sertifikasi secara ketat.

4. IKSK.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

IKSK.4.4. Indikator ini merupakan indikator pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan *Good Manufactured Practice* disarana produksi Obat dan Makanan.

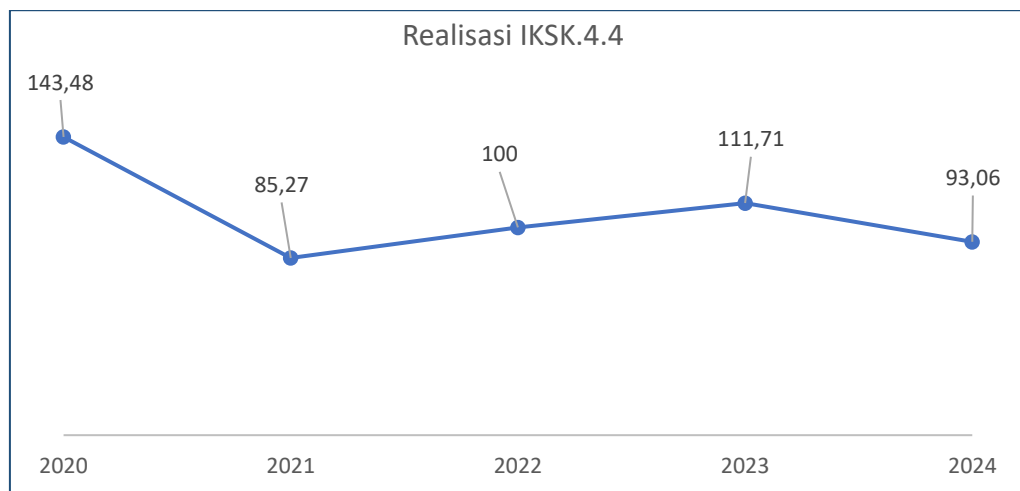


Diagram 12. Realisasi IKSK.4.4

Data capaian indikator diatas terlihat capaian fluktuatif. Kemudahan perizinan berusaha juga membawa dampak terhadap hasil pengawasan sarana produksi, karena pelaku usaha kurang komitmen dalam pemenuhan GMP.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja dari target 75 menjadi 81,6 karena di tahun 2023 capaian melebihi target yaitu 81,55%. Pada tahun 2024, realisasi 75,94%. Perlu upaya yang terus menerus dan kolaboratif dari berbagai lintas sektor.

5. IKSK 4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

IKSK.4.5. Indikator ini merupakan indikator pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan *Good Distribution Practice* disarana Distribusi Obat dan Makanan.

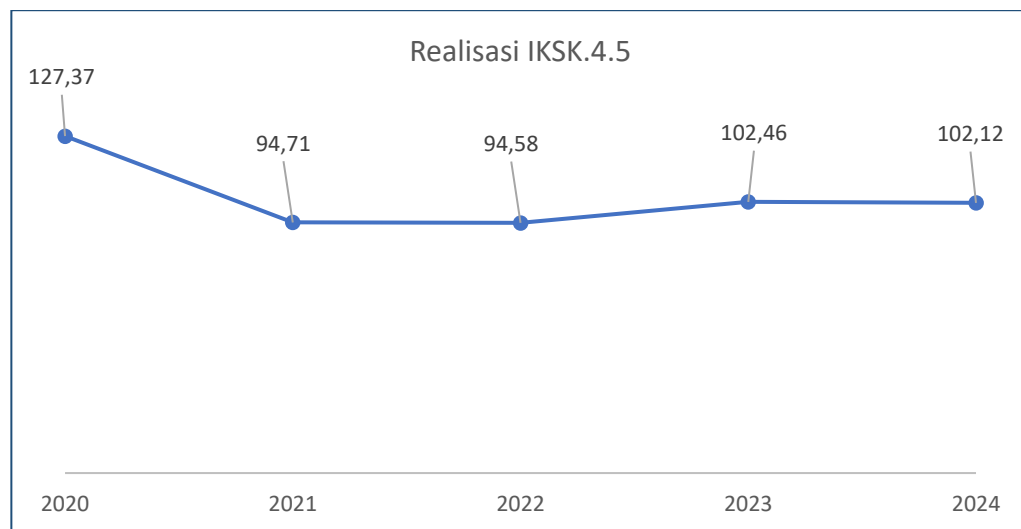


Diagram 13. Realisasi IKSK.4.5

Data capaian indikator diatas terlihat capaian fluktuatif. Kemudahan perizinan berusaha juga membawa dampak terhadap hasil pengawasan sarana distribusi. Masih banyak ditemukan opearsional distribusi terutama Obat yang menyalahi ketentuan juga banyaknya peredaran OT-BKO di sarana peredaran. Hal ini menunjukkan pelaku usaha kurang komitmen dalam pemenuhan standar peraturan yang berlaku. Perlu upaya yang terus menerus dan kolaboratof dari berbagai lintas sektor. Pada tahun 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja dari target 85 menjadi 81 karena di tahun 2023, capaian yaitu 80,94%. Pada tahun 2024, realisasi melebihi target dengan capaian 102,12%.

6. IKSK.4.6. Indeks Pelayanan Publik

IKSK.4.6 adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian atau lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, dan pengaduan serta inovasi.

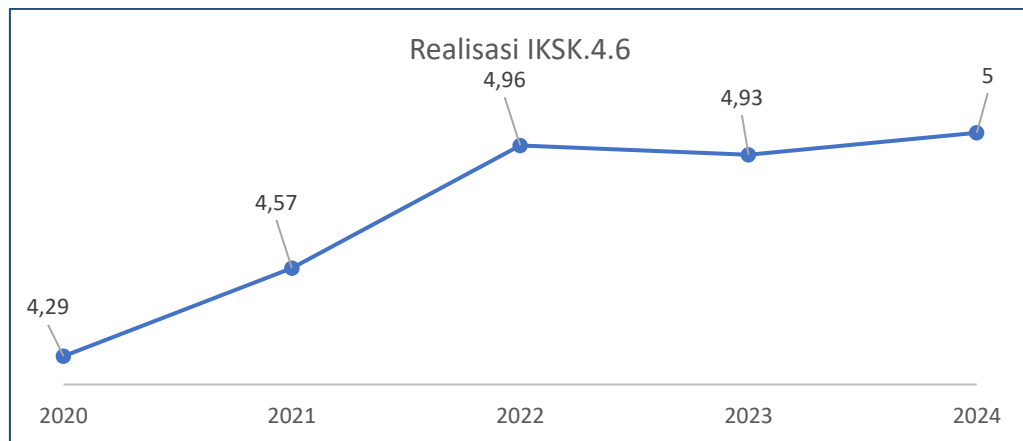


Diagram 14. Realisasi IKSK.4.6

Pada awal tahun renstra nilai IPP masih belum mencapai target, beberapa aspek yang diwajibkan masih belum terpenuhi. Pada tahun selanjutnya nilai IPP telah melebihi target dan di akhir tahun renstra, mencapai nilai maksimal yaitu 5. Peningkatan nilai ini juga ditandai dengan penerimaan penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) kategori Pelayanan Prima dari Kemenpan RB tahun 2022, UPP terbaik dengan sarana-prasarana ramah kelompok rentan dari Kemenpan RB tahun 2023 dan UPP dengan sarana-prasarana berbasis HAM dan Kemenham tahun 2024.

Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja karena capaian tahun sebelumnya telah melebihi target. Di tahun 2023 target diubah dari 4,55 menjadi 4,6 dan di tahun 2024 target dinaikkan dari 4,6 menjadi 4,95. Meskipun target naik, namun realisasinya telah melebihi target dengan capaian di tahun 2023 sebesar 107,17% dan capaian di tahun 2024 sebesar 101,01%.

E. Sasaran Kegiatan (SK 5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut: 1). Tingkat efektifitas KIE Obat dan 22 Makanan; 2). Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman; 3). Jumlah desa pangan aman; dan 4). Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

1. IKS.5.1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKS.5.1 Tingkat Efektivitas KIE adalah ukuran efektivitas atau kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (komunikasi informasi dan edukasi). Indikator efektivitas KIE diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, konten informasi yang diterima, manfaat program KIE, minat terhadap informasi Obat dan Makanan.

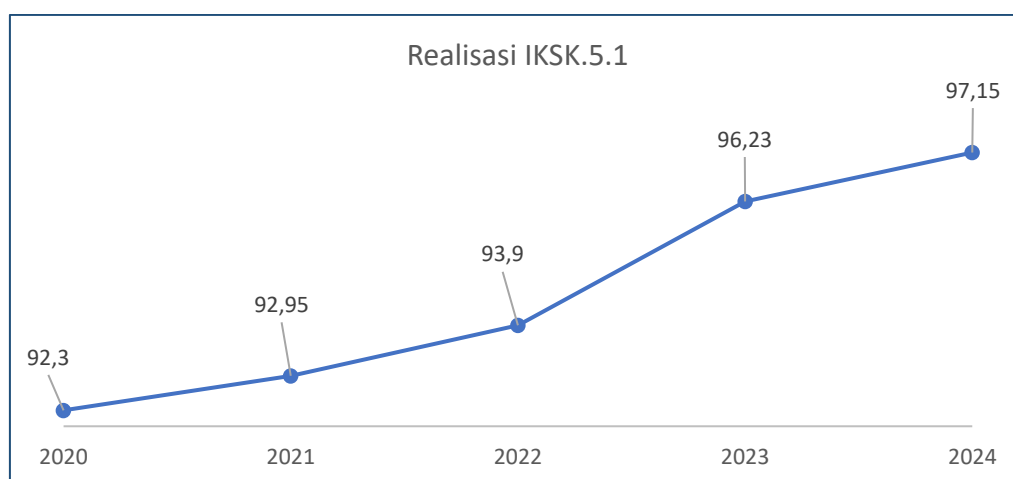


Diagram 15. Realisasi IKS.5.1

Hasil capaian Indeks Efektivitas KIE dalam 5 (lima) tahun terjadi peningkatan dengan nilai yang telah melebihi target. Nilai interpretasi indeks efektifitas KIE yang dicapai pada tahun 2020-2020 berada pada kisaran 85,01–95 dengan interpretasi Sangat Efektif, sedangkan capaian di tahun 2023–2024 berada pada kisaran 95,01–100 atau interpretasi Sangat Efektif Sekali. Pada tahun 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja dengan target nilai efektifitas KIE diturunkan dari 97,6 menjadi 97,13. Penurunan ini merupakan kebijakan dari BPOM dimana hampir semua UPT mengalami penurunan target.

2. IKSK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

IKSK.5.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Indikator ini terpenuhi setelah sekolah mendapatkan intervensi keamanan PJAS dari BBPOM di Yogyakarta pada tahun yang ditetapkan.

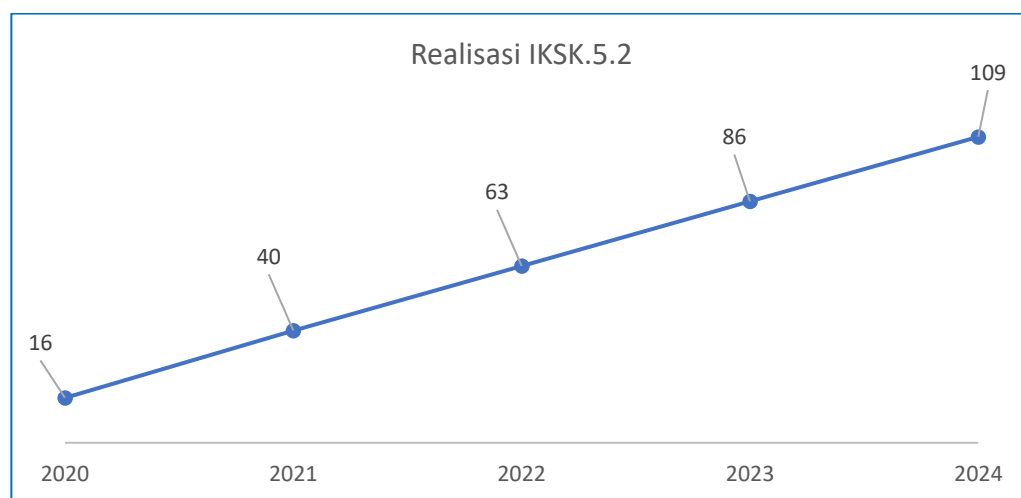


Diagram 16. Realisasi IKSK.5.2

Hasil intervensi ditunjukkan dalam jumlah capaian sekolah yang telah diintervensi dan dikawal. Nilai setiap tahun menunjukkan kenaikan karena perhitungan berdasarkan akumulasi, sekolah yang telah diintervensi akan dikawal pada tahun-tahun selanjutnya. Capaian berdasarkan target telah terealisasi 100% selama 5 tahun. Total sekolah yang telah diintervensi dan dikawal sebanyak 109 sekolah yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota di seluruh DIY.

3. IKSK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

IKSK.5.3 Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan desa yang memiliki kriteria mempunyai kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri baik dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain. Indikator ini terpenuhi setelah desa/kalurahan mendapatkan intervensi Desa Pangan Aman dari BBPOM di Yogyakarta pada tahun yang ditetapkan.

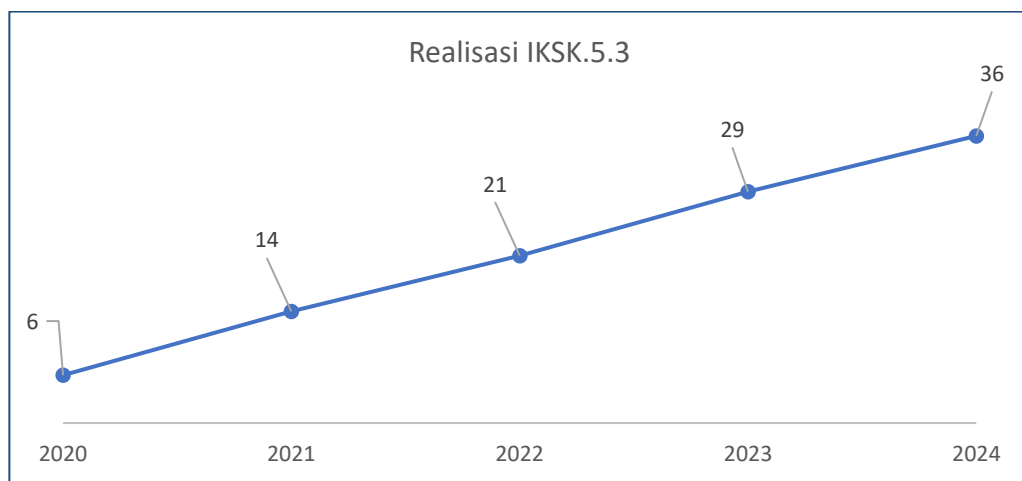


Diagram 17. Realisasi IKSK.5.3

Hasil intervensi ditunjukkan dalam jumlah capaian desa yang telah diintervensi dan dikawal. Nilai setiap tahun menunjukkan kenaikan karena perhitungan berdasarkan akumulasi, desa yang telah diintervensi akan dikawal pada tahun-tahun selanjutnya. Capaian berdasarkan target telah terealisasi 100% selama 5 tahun dengan total jumlah desa yang diintervensi dan dikawal sebanyak 36 desa dari 5 kabupaten/kota di seluruh DIY.

4. IKSK.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

IKSK.5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung berdasarkan pasar yang memiliki kriteria mempunyai kader pasar yang mampu melakukan pengawasan mandiri terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan, yang diduga mengandung bahan berbahaya melalui pengambilan dan pengujian contoh menggunakan test kit, dan memberikan KIE kepada komunitas pasar, serta tersedianya data hasil sampling dan pengujian di pasar intervensi. Indikator ini terpenuhi setelah desa/kalurahan mendapatkan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dari BBPOM di Yogyakarta pada tahun yang ditetapkan.

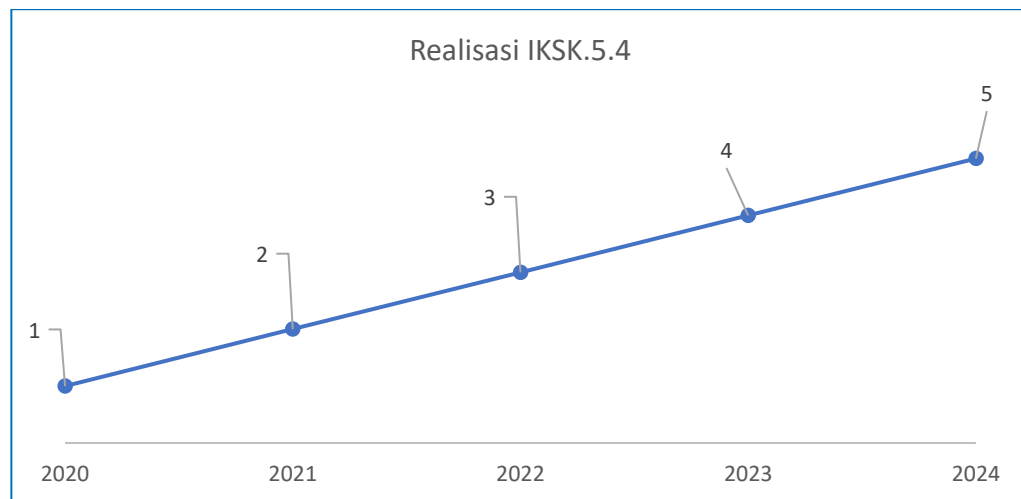


Diagram 18. Realisasi IKSK.5.4

Hasil intervensi ditunjukkan dalam jumlah capaian pasar yang telah diintervensi dan dikawal. Nilai setiap tahun menunjukkan kenaikan karena perhitungan berdasarkan akumulasi, pasar yang telah diintervensi dan akan dikawal pada tahun-tahun selanjutnya. Capaian berdasarkan target telah terealisasi 100% selama 5 tahun dengan total jumlah pasar yang diintervensi dan dikawal sebanyak 5 pasar dari 5 kabupaten/kota di seluruh DIY.

F. Sasaran Kegiatan (SK 6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

1. IKS 6.1. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

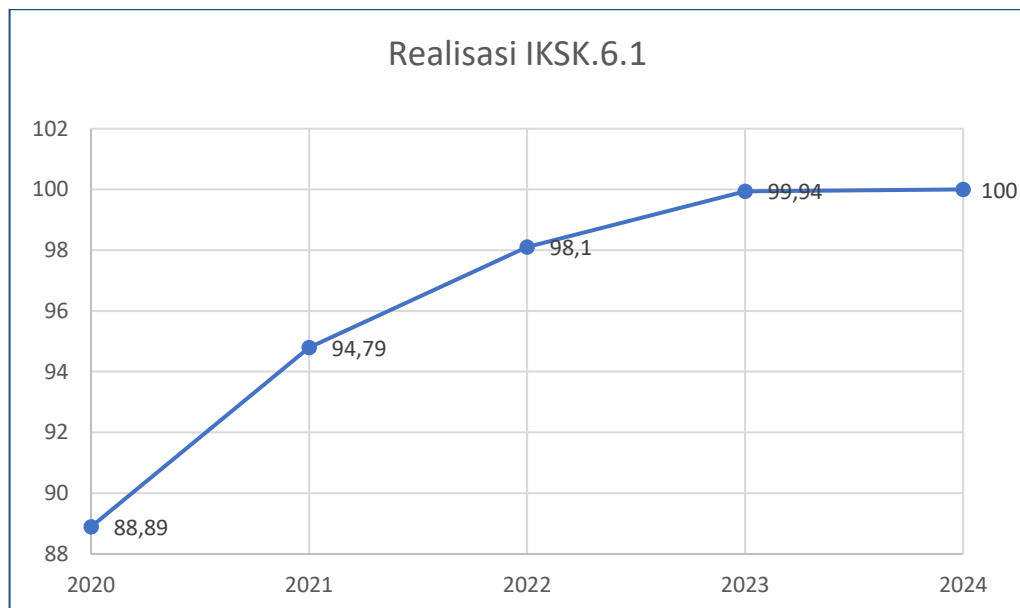


Diagram 19. Realisasi IKS.6.1

Realisasi Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama periode Renstra 2020-2024 terus mengalami tren kenaikan. Adanya regionalisasi laboratorium mulai tahun 2022 membantu pencapaian indikator ini. Dengan adanya Regionalisasi laboratorium membawa hal positif diantaranya penggunaan reagen yang lebih efisien, waktu penyelesaian sampel yang lebih efektif, komunikasi dan kolaborasi antar laboratorium yang lebih intensif dan harmonis serta perencanaan pengujian yang lebih dapat terprogram dengan baik.

2. IKS.6.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

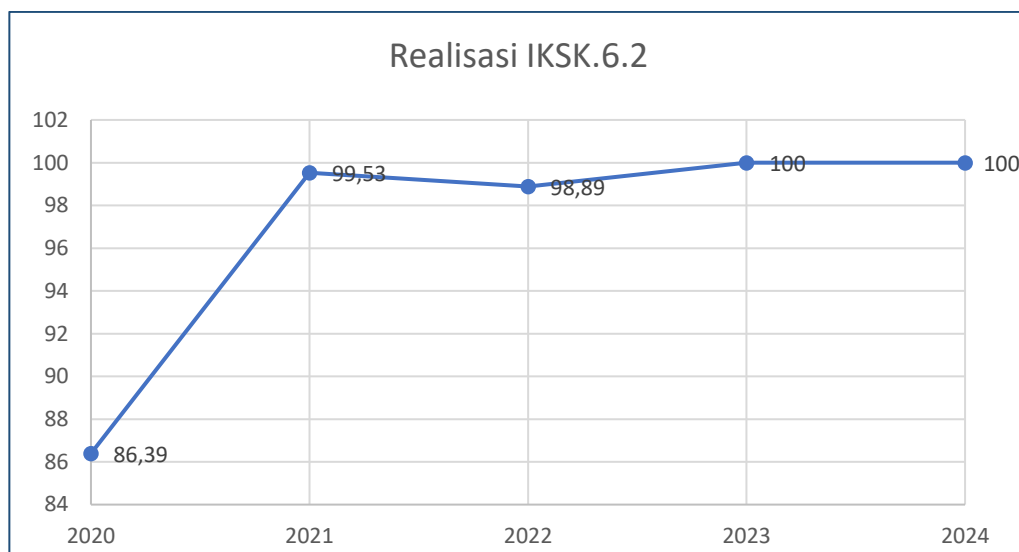


Diagram 20. Realisasi IKS.6.2

Realisasi Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama periode Renstra 2020-2024 terus mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2021 dan 2022 belum mencapai target 100% dikarenakan adanya kendala pemenuhan timeline pengujian, yaitu alat yang rusak, dan ketersediaan reagen dan media uji. Adanya koordinasi yang semakin baik antara pemeriksaan dan pengujian, serta kebijakan *clock on dan clock off* jika ada kendala peralatan berperan penting dalam pencapaian realisasi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Penggunaan digitalisasi laboratorium melalui SMILE turut membantu mengefisienkan waktu pelaporan hasil uji dan mempercepat pemenuhan standar layanan pengujian.

G. Sasaran Kegiatan (SK 7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1. IKS.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

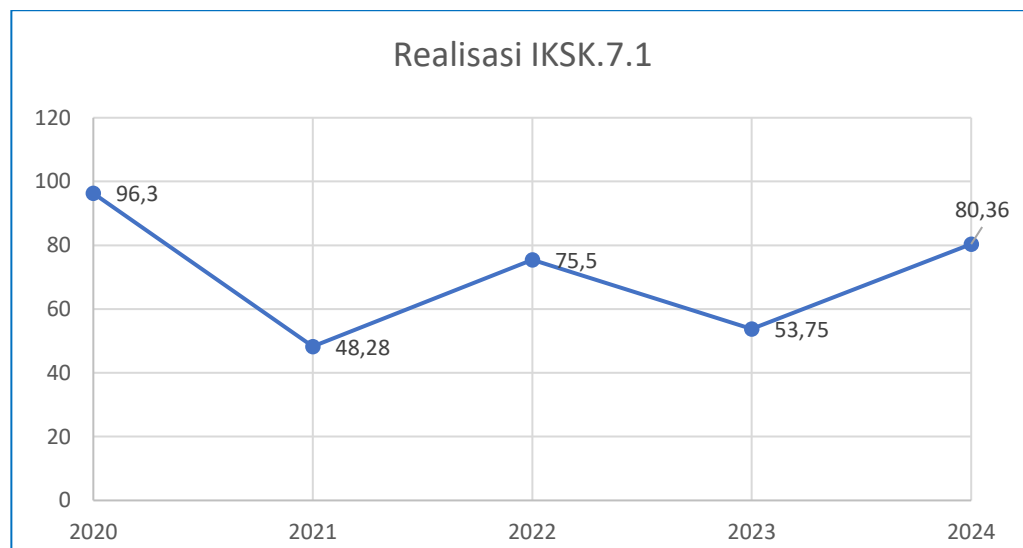


Diagram 21. Realisasi IKS.7.1

IKSK 7.1 ini merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan, dengan cara perhitungan memasukkan proses pemberkasan ke dalam rumus yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penyidikan yaitu bergulirnya perkara yang ditangani dari tahap SPDP, Tahap I, P21 dan Tahap 2, setiap tahap perkara mempunyai koefisien nilai sendiri.

Realisasi keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan pada awal periode renstra (2020) adalah 96,3%, ini merupakan realisasi tertinggi pada periode renstra 2020–2024. Realisasi yang terendah adalah 48,28% pada tahun 2021, sehingga capaiannya juga terendah pada periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 terjadi perubahan perjanjian kinerja dari target 90 menjadi 78, berdasarkan analisa usulan yang telah diajukan ke Biro Perencanaan dan keuangan dan berdasarkan review dari Deputi IV karena dari tahun 2021 sampai tahun 2023 capaiannya dalam kategori Kurang (tahun 2022 dan 2023), serta kategori Belum memenuhi ekspektasi (tahun 2022).

Pada tahun 2024, realisasi melebihi target dengan capaian 103,03%. Realisasi pada akhir periode renstra (2024) adalah 80,36 jika dibandingkan capaian indikator ini pada awal periode renstra (2020) dan akhir periode renstra (2024) adalah 118,83% untuk awal periode renstra dan 103,02% untuk akhir periode renstra (2024) dengan kriteria yang sama yaitu Sangat Baik.

H. Sasaran Kegiatan (SK 8)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang Optimal

Sasaran Kegiatan 8 diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut: 1). Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta; 2). Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta; dan 3). Nilai Pengelolaan Kearsipan

1. IKSK.8.1. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta

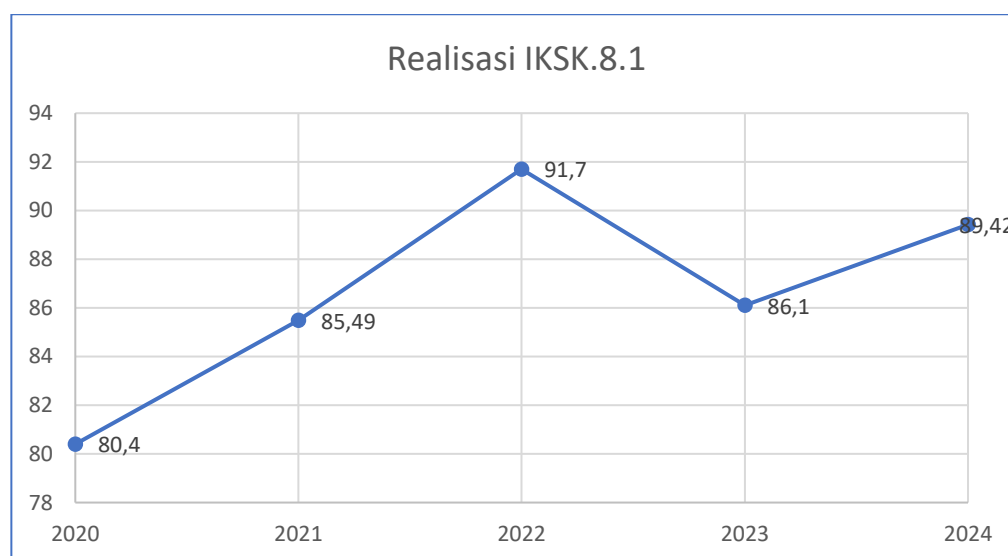


Diagram 22. Realisasi IKSK.8.1

IKSK ini merupakan indikator pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat,



tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan POM, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Realisasi Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta pada tahun 2021-2024 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan awal periode renstra (2020). Pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi indeks ini (86,1) dikarenakan beberapa indikator kinerja belum tercapai dan adanya perubahan tools penilaian dan beberapa data dukung kegiatan belum lengkap. Pada periode akhir renstra realisasi 89,42 dengan capaian 101,04% dengan kategori sangat baik

Upaya peningkatan tetap dilakukan, sehingga BBPOM di Yogyakarta berhasil memperoleh penghargaan Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari KemenPANRB atas inovasi BERPENDAR (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Izin Edar), Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terbaik penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan, Unit dengan Indeks Pelayanan Publik kategori “Pelayanan Prima”.

2. IKS 8.2. Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta

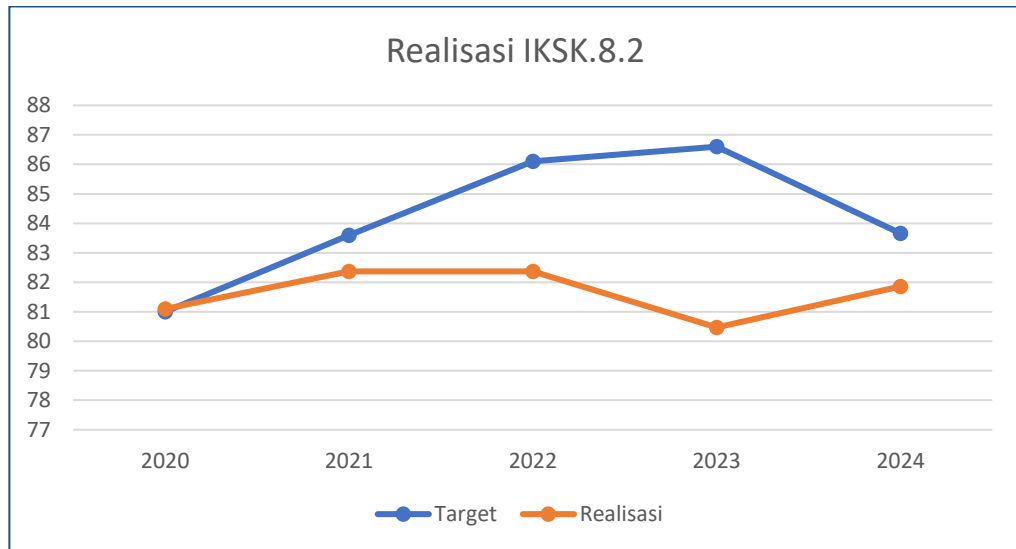


Diagram 23. Realisasi IKS.8.2

Nilai AKIP menggambarkan penguatan reormasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Grafik dan tabel diatas untuk Indikator Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta ada penurunan nilai pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dikarenakan adanya terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi SAKIP Tahun 2023-2024 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Pada tahun 2023 dan 2024 dilakukan perubahan target apabila berdasarkan target awal RESNTRA yang tertuang di Review RESNTRA dan di Perjanjian Kinerja menyesuaikan hasil Nilai AKIP dari Tahun sebelumnya dan berdasarkan review dari pengampu yaitu Inspektorat. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta dari tahun 2020–2024 mendapatkan nilai dengan kategori A (memuaskan) yaitu berarti satuan kerja dapat mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil walaupun diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan sampai ke level individu.

I. Sasaran Kegiatan (SK 9)

Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan 9 diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu: Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta.

1. IKSK. 28. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta

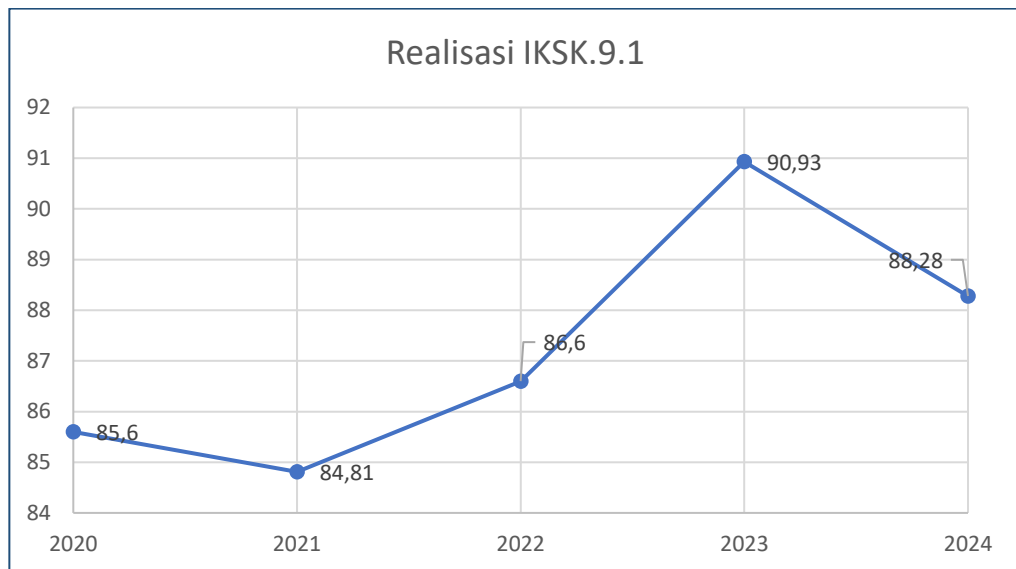


Diagram 24. Realisasi IKSK.9.1

IKSK ini merupakan indikator yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan 4 (empat) dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan. Terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN, yaitu perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2021-2024 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan awal periode renstra (2020). Namun pada akhir periode renstra terjadi penurunan nilai indeks dikarenakan adanya perubahan dimensi penilaian di semester 2 2024 dengan target 91,66 realisasi 88,30 capaian kinerja 96,33 dengan kategori Cukup.

J. Sasaran Kegiatan (SS 10)

Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan 10 diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut: 1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP; dan 2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal.

1. IKS.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

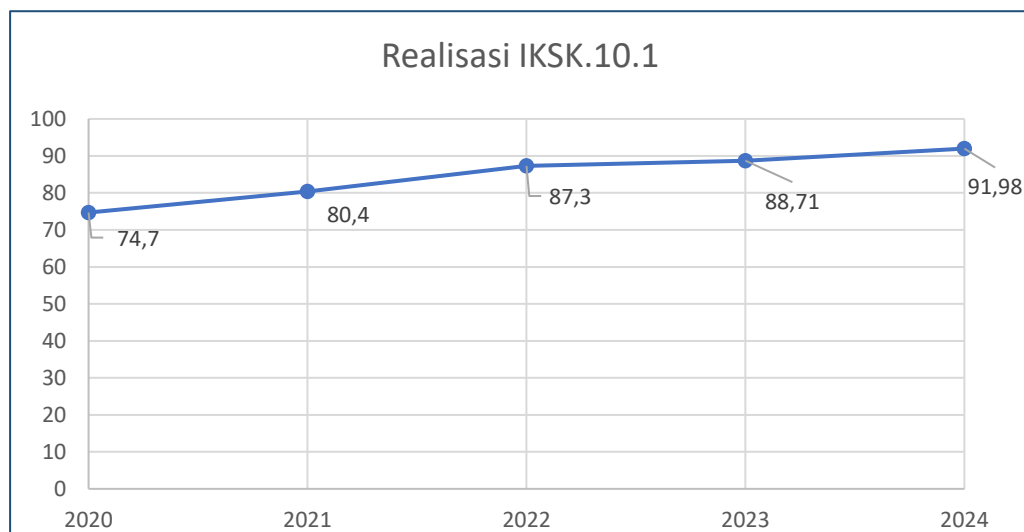


Diagram 25. Realisasi IKS.10.1

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP selama periode Renstra 2020-2024 terus mengalami tren kenaikan. Persentase kenaikan realisasi tertinggi dari tahun 2021 ke 2022 yaitu sebesar 6,9% dan realisasi melebihi target. Peningkatan realisasi paling landai di tahun 2023 yaitu 1,41%. Di awal tahun 2024 PPPOMN melakukan reviu terhadap target UPT termasuk BBPOM di Yogyakarta, yaitu merevisi target menjadi 89,20% yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2024. Dengan target tersebut maka capaian indikator persentase laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 adalah 103,12% dengan kriteria Sangat Baik.

2. IKSK.10.2 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

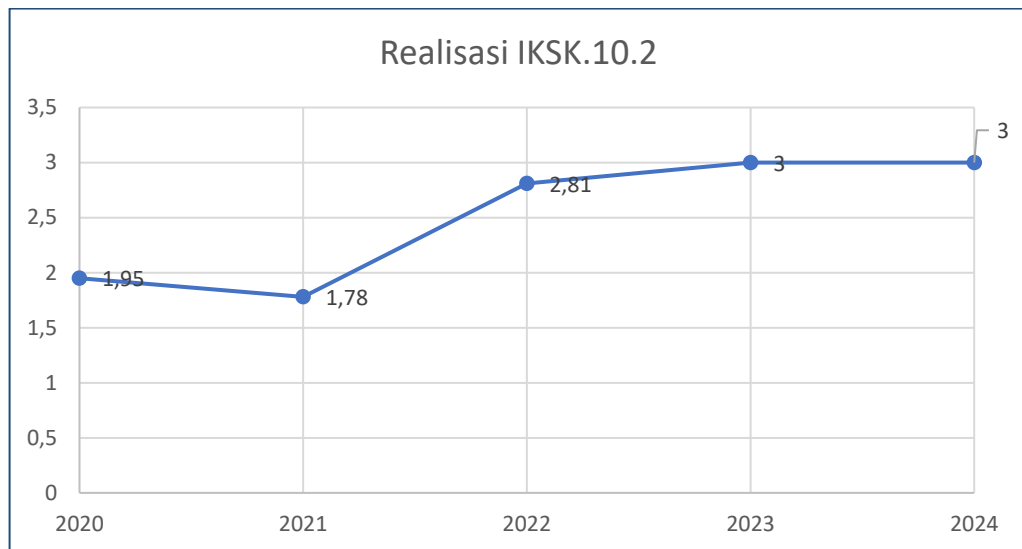


Diagram 26. Realisasi IKSK.10.2

IKSK ini bertujuan untuk menjamin data dan Informasi yang tersedia selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem Informasi dalam pelaksanaan proses bisnis. Data dan informasi yang dimutakhirkan dalam BOC yaitu: SIPT, Spimker Keracunan. Indeks Pemanfaatan Informasi meliputi: email, sharing folder, dashboard BOC, berita aktual pada subsite Balai.

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal pada tahun 2021-2024 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan awal periode renstra (2020). Terjadi sedikit penurunan realisasi di tahun 2021, karena monitoring kurang konsisten sehingga terjadi keterlambatan pemutakhiran data pada SIPT. Pada periode akhir renstra realisasi 3 dengan capaian 100 dengan kategori Baik.

K. Sasaran Kegiatan (SK 11)

Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan 11 diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut: 1). Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta; dan 2). Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta.

1. IKS.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta

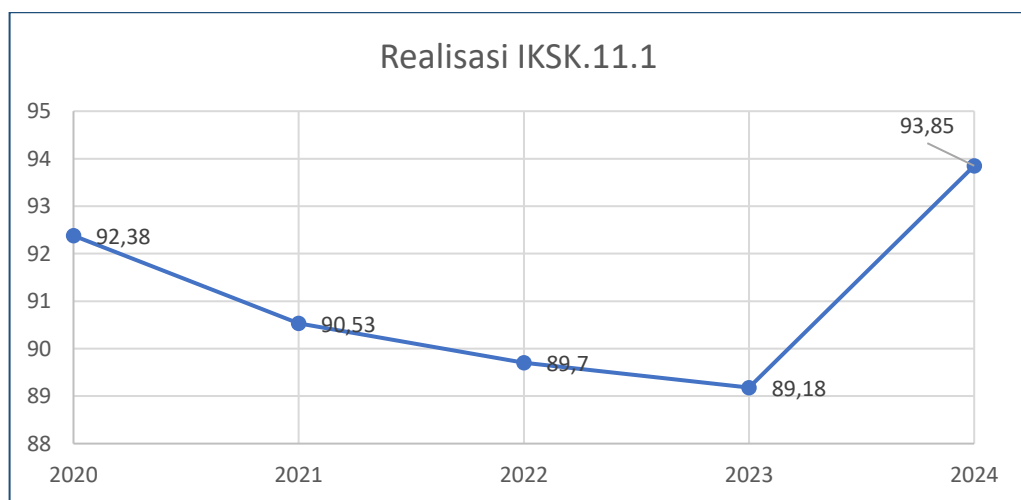


Diagram 27. Realisasi IKS.11.1

IKSK Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dimonitor melalui SmartDJA.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perubahan komponen dan belum maksimalnya penilaian pada komponen deviasi Halaman III DIPA dan realisasi anggaran sehingga menurunkan Nilai Kinerja Anggaran. Terdapat perubahan target di Tahun 2024 yang merupakan target akhir renstra 89,97 realisasi 93,85 target tercapai 104,31 dengan kategori Sangat Baik.

Aspirasi Stakeholder

Sebagai lembaga pemerintah non kementerian BPOM telah berdiri dan memperkuat tugas dalam melindungi masyarakat sejak tahun 2001. Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin banyaknya aneka produk Obat dan Makanan yang beredar, menyebabkan semakin meningkatkan ekspektasi masyarakat akan keberadaan BPOM.

Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap BPOM dalam melindungi mereka dari Obat dan Makanan yang tidak aman. Ekspektasi ini meliputi pengawasan yang ketat, penindakan tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan produk. Masyarakat juga mengharapkan BPOM memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait produk yang aman dan bermutu yang diikuti dengan pelayanan publik prima sehingga kehadiran BPOM menjadi suatu yang ditunggu-tunggu.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menyampaikan beberapa usulan terutama dari pelaku usaha dan akademisi sebagai pendamping untuk mempersingkat tahapan proses sertifikasi dan membantu pembiayaan uji produk. Tidak mudah untuk memenuhi ekspektasi ini, karena BPOM melalui UPT-UPT yang ada di daerah harus bisa berdiri di dua kaki, yaitu kaki konsumen sebagai pengguna produk dan kaki pelaku usaha sebagai penghasil produk. Pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha menjadi salah satu tugas penting, untuk memberikan keseimbangan bagi iklim berusaha, namun masih dalam koridor perlindungan kepada masyarakat. Sebagai institusi dengan tugas utama pengawasan, maka tidak memungkinkan pemberian fasilitasi dalam bentuk biaya/uang, namun hal ini telah disinergikan dengan pemda DIY yang saat ini banyak membantu dengan menggunakan dana keistimewaan DIY.

Dari Forum Konsultasi Publik yang telah diadakan beberapa lintas sektor juga mengusulkan untuk memperketat pengawasan peredaran obat tanpa ijin edar, terutama yang memberikan manfaat terkait peningkatan stamina laki-laki. Hal ini telah dilakukan oleh BBPOM di Yogyakarta namun kewenangan hanya sebatas pada produk yang diperjualbelikan, sedangkan kewenangan untuk sarana ada di pemda setempat. Perlu pemahaman yang lebih baik terkait pembagian kewenangan ini, karena tidak semua yang terkait Obat dan Makanan bisa diselesaikan oleh BPOM.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat. Sebagai konsumen pengguna produk, masyarakat dapat berpartisipasi aktif melalui UPT yang ada di daerah maupun jalur-jalur on line yang telah dibuat. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan, akan membantu BPOM memahami berbagai perubahan yang



begitu cepat terjadi, seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspirasi masyarakat juga dapat tertuang dalam bentuk pemenuhan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas BPOM dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada gap atau prasangka yang meresahkan terkait kinerja BPOM.

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor. baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Upaya untuk efektifitas pengawasan obat dan makanan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan, Kepala Badan POM mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah serta meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan sesuai tugas dan kewenangan kementerian/Lembaga dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya yang dilakukan adalah koordinasi, advokasi regulasi dan asistensi kepada pemerintah daerah. Hasil kinerja BBPOM di Yogyakarta rutin disampaikan kepada lintas sektor, demikian juga program-program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dapat di kolaborasikan seperti kegiatan pengawasan rokok elektronik, penanganan resistensi antibiotika, pengawasan obat bahan alam mengandung bahan kimia obat, pengawasan alcohol dan pengawasan bahan berbahaya.

Badan POM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan, menginisiasi dana alokasi khusus non fisik pengawasan obat dan makanan (DAK NF POM) kepada pemerintah daerah untuk peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai kewenangan pada Undang Undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014, serta dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan kemandirian untuk pemenuhan standar mutu dan keamanan untuk meningkatkan daya saing.

BBPOM di Yogyakarta, dalam rangka memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing, secara rutin



telah mengganggu kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, desk dan kegiatan lain yang diperlukan sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha.

Untuk mendukung hilirisasi pengembangan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari hasil penelitian akademisi, BBPOM di Yogyakarta secara aktif melakukan pendampingan dan melakukan komunikasi dengan Badan POM.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Penyusunan Renstra 2025 – 2029 BBPOM di Yogyakarta akan menghadapi banyak permasalahan dalam mencapai Visi Misi dengan segala potensi yang ada dalam merancang pengawasan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tetapi juga responsive terhadap dinamika global dan nasional. BPOM sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BPOM dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BPOM dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BPOM tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan Renstra 2025 – 2029 menggunakan metode SWOT dengan melakukan pemetaan potensi yang ada serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh dan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan merumuskan strategi yang akan dilakukan.

Kekuatan (Strength)

Kekuatan (*strength*) merupakan sumber daya ataupun keterampilan dan keunggulan yang memberikan keunggulan bisa berupa keuangan, citra, kepemimpinan, ataupun faktor lain akan menjadi faktor pendukung memberikan faktor yang kuat.

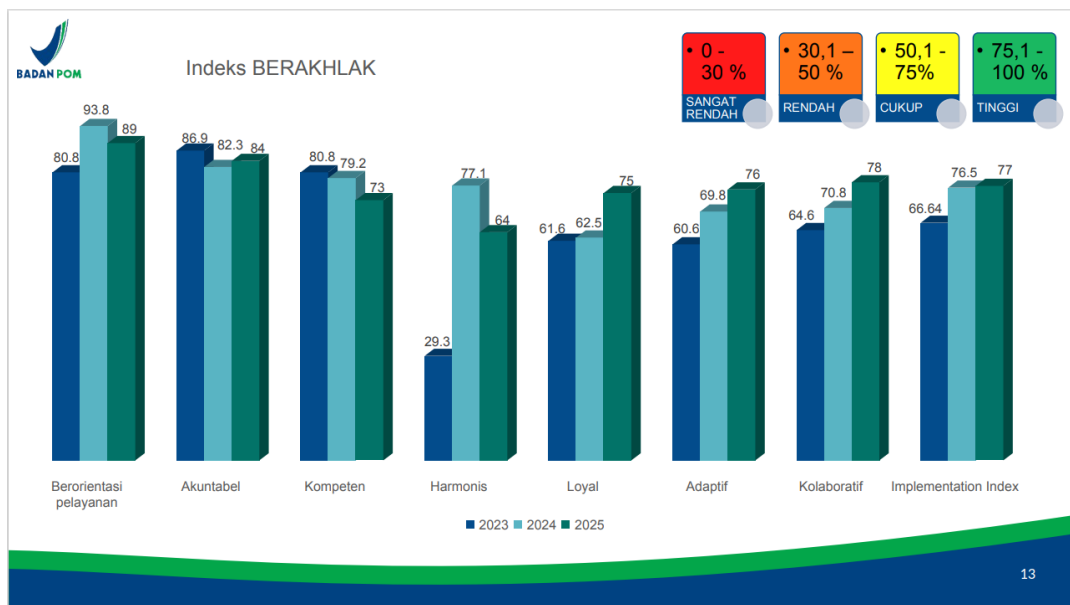
Kondisi internal yang dimiliki BBPOM di Yogyakarta dengan segala aspek yang dimiliki, berikut beberapa kekuatan yang dimiliki BBPOM di Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan produk farmasi dan pangan olahan:

1. Komitmen Pimpinan dan Pegawai BBPOM di Yogyakarta yang berintegritas

Komitmen pimpinan juga merupakan pondasi yang kuat untuk keberhasilan tujuan dalam mencapai visi dan Misi BBPOM di Yogyakarta dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas dan selalu proaktif mengantisipasi setiap perubahan di masa depan. Dengan strategi yang baik dan bijaksana berusaha meningkatkan standar pengawasan, memperkuat pengawasan untuk melindungi masyarakat.

BBPOM di Yogyakarta didukung pegawai yang kompeten dan selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan landasan core value ASN BerAKHLAK.

Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai Indeks BerAKHLAK BBPOM di Yogyakarta rata-rata berada pada nilai tinggi, seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Nilai BerAKHLAK BBPOM di Yogyakarta Tahun 2023-2025



Kompetensi yang dimiliki BBPOM di Yogyakarta merupakan aset dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis maupun spesifik tersebut BBPOM di Yogyakarta.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BBPOM di Yogyakarta tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap Instansi. Dengan demikian, kepemimpinan BBPOM di Yogyakarta telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Beberapa penghargaan yang diperoleh BBPOM di Yogyakarta sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif”.
- b. Meraih Predikat WBK pada tahun 2019.
- c. Meraih Predikat WBBM pada Tahun 2021.
- d. Unit Pelayanan Publik dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima.
- e. Inovasi BERPENDAR sebagai Top 99 pada lomba inovasi KemenPANRB.
- f. Inovasi Santan Prima sebagai Top 24 Inovasi KOIN BPOM.
- g. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM terbaik.

2. Sistem Pengawasan *Full Spectrum*

Pada tahun 2025, jumlah sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta mengalami kenaikan yang signifikan dengan perbandingan data sarana tahun 2022 dan 2025. Sarana pangan olahan meningkat 296% dari 133 sarana ke 395 sarana; sarana produksi kosmetik 184% dari 25 sarana ke 46 sarana; sarana produksi obat bahan alam meningkat 115% dari 46 sarana ke 53 sarana. Semakin banyaknya sarana produksi, BPOM sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan di Indonesia melakukan pengawasan dan pengendalian khasiat, keamanan dan mutu Obat dan Makanan secara komprehensif sepanjang *product life cycle*. Pengawasan dilakukan berbasis Analisa risiko.

Pengawasan dimulai dari pencegahan melalui penetapan standardisasi, perizinan, pembinaan), pengawasan, hingga penindakan. Keseluruhan



siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat, mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Selain itu pada pengawasan pasca pemasaran, juga dilakukan monitoring efek samping dalam rangka jaminan keamanan pasca pemasaran produk sediaan farmasi. Untuk pelaporan farmakovigilans obat, sampai dengan Oktober 2025, BBPOM di Yogyakarta telah menerima laporan sebanyak 391 laporan dari fasilitas kesehatan, dan sebanyak 25,53% pelaporan farmakovigilans OBA dari pelaku usaha. Monitoring efek samping dibutuhkan untuk mencegah konsumen dari risiko kesehatan dan finansial yang mungkin dapat timbul karena kejadian tidak diinginkan. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas (effectiveness) dan keamanan penggunaan produk sediaan farmasi.

Pengawasan *full spectrum* oleh Badan POM didukung oleh regulasi yang memadai dan digitalisasi. Hal ini semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan dengan sumber daya yang dimiliki.

Dukungan regulasi sebagai upaya untuk efektifitas pengawasan obat dan makanan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Hal ini semakin memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai fungsi dan tugas masing masing Kementerian/Lembaga.

3. Sistem Kelembagaan BBPOM di Yogyakarta yang Kuat

Sistem kelembagaan BBPOM di Yogyakarta dengan segala aspek yang dimiliki, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan produk farmasi dan pangan olahan:

a. Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur

BPOM berkomitmen melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB secara konsisten dilaksanakan terhadap RB General dan RB Tematik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks RB BBPOM di Yogyakarta dalam periode Renstra 2020-2024 yang terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 dengan nilai 89,42.

Indeks RB BBPOM di Yogyakarta

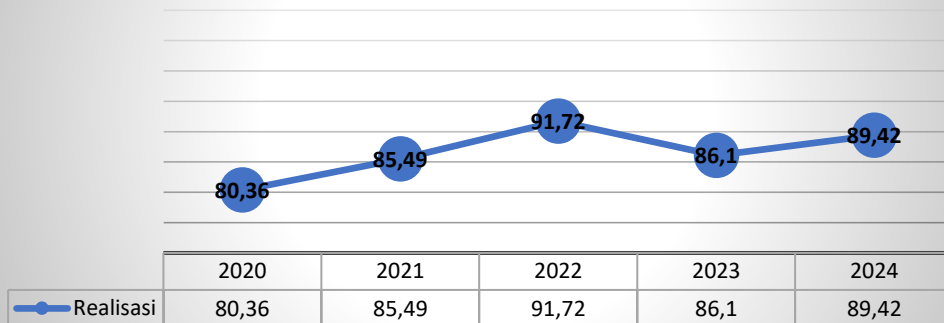


Diagram 28. Indeks RB BBPOM di Yogyakarta

- b. Nilai AKIP BPOM memiliki tren peningkatan dari 80,18 (delapan puluh koma delapan belas) di tahun 2022 menjadi 82,04 (delapan puluh dua koma nol empat) di tahun 2024, dengan tingkat akuntabilitas kinerja tetap berada pada kategori "A". Tren positif ini mencerminkan komitmen BPOM dalam memperbaiki tata kelola kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas. Keberhasilan ini didukung dengan cara menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas evaluasi AKIP BPOM. dan nilai AKIP adalah 81,86.

Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta

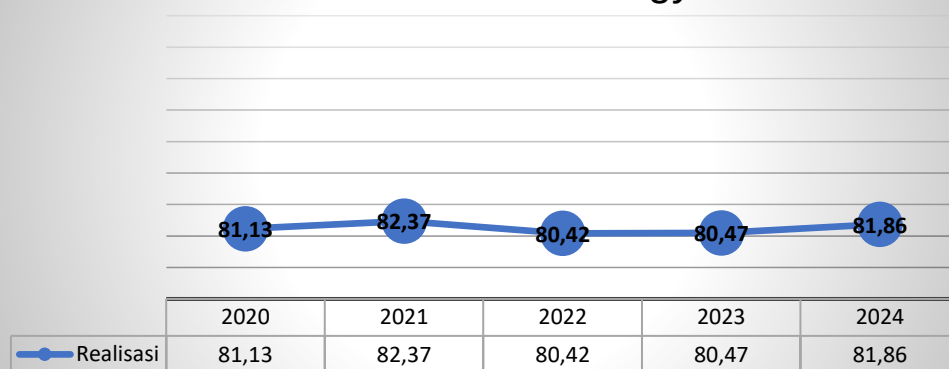


Diagram 29. Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta



Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa BBPOM di Yogyakarta telah memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK serta diharapkan dapat terus dilakukan peningkatan kualitas untuk mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RB, pengawasan internal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap langkah reformasi berjalan sesuai arah yang ditetapkan, bebas dari penyimpangan, dan menghasilkan output yang nyata. Komitmen pelestarian budaya integritas pada BBPOM di Yogyakarta tergambarkan pada keberhasilan pembangunan zona integritas pada unit kerja berpredikat **WBK (Wilayah Bebas Korupsi)** pada tahun 2019, dan **WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)** pada tahun 2021.

4. SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Kompeten dan Profesional

SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, dengan pengalaman teknis yang luas serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi. BPOM didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia BBPOM di Yogyakarta mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM BBPOM di Yogyakarta merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk.

SDM BPOM terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, maka dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut,

BBPOM di Yogyakarta memiliki Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari pegawai merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, terdiri dari pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, fungsi pemeriksaan, fungsi penyuluhan, fungsi penindakan, kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.

Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BBPOM di Yogyakarta juga didukung dengan 25% (dua puluh lima persen) Jabatan Fungsional lainnya seperti di bawah ini:

- a. Analis SDM
- b. Perencana
- c. Arsiparis
- d. PK/APK APBN
- e. Pranata Komputer
- f. Penata Laksana Barang
- g. Pelaksana

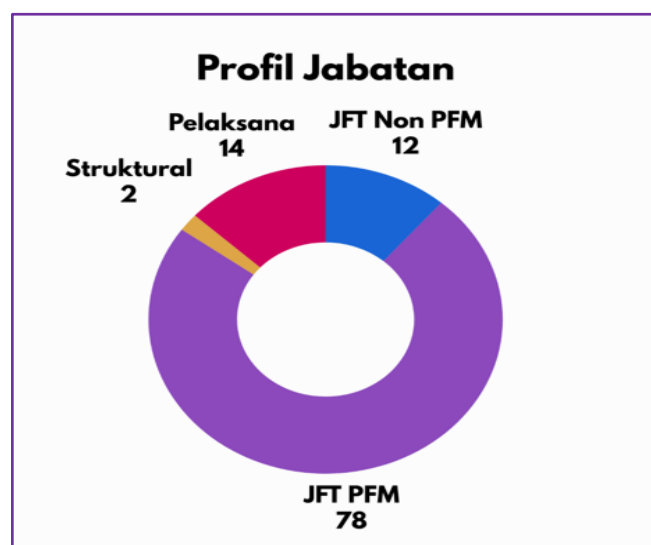


Diagram 30. Profil SDM Berdasar Jabatan

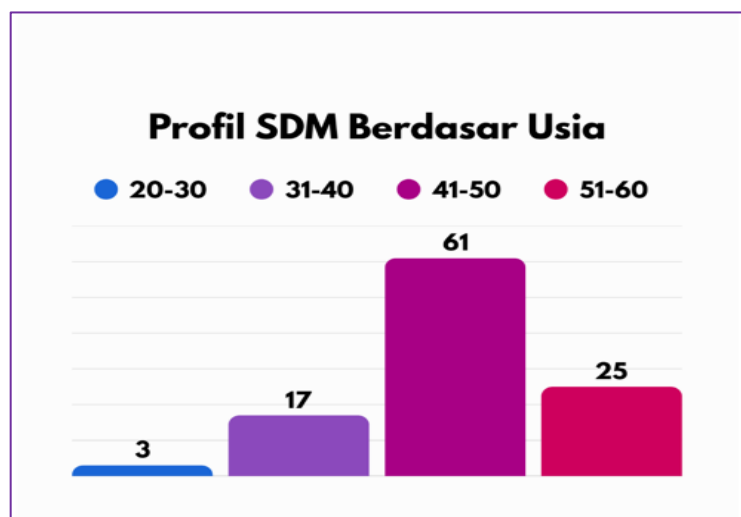


Diagram 31. Profil SDM Berdasar Usia

5. Sistem Operasional Teknologi, Komunikasi, dan Informasi yang Memadai

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BBPOM di Yogyakarta yang menjadikan TIK sebagai kekuatan penggerak utama reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam implementasi SPBE, BBPOM di Yogyakarta berkomitmen penuh dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung layanan yang diselenggarakan di BBPOM di Yogyakarta.

Digitalisasi proses kerja BBPOM di Yogyakarta menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik untuk mempercepat proses pengawasan, pengujian, juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara instansi, dan masyarakat.

Diantara Sistem yang dibangun oleh BBPOM di Yogyakarta dalam rangka menunjang dan meningkatkan proses kinerja diantaranya:

a. SMILe (Sistem Manajemen Informasi Laboratorium Pengujian)

Melalui pengembangan SMILe (Sistem Manajemen Informasi Laboratorium Pengujian), seluruh tahapan kerja, mulai dari penimbangan sampel, analisis dengan instrumen, hingga penyusunan laporan, dapat dikelola secara digital. Integrasi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rawan kesalahan, tetapi juga mempercepat alur kerja para analis sehingga waktu penyelesaian pengujian dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas dan ketertelusuran data.

Sistem ini juga mendukung kelancaran administrasi pengujian, seperti pencatatan penggunaan reagensia dan instrument, pencatatan kondisi akomodasi ruangan, pengelolaan dokumen pendukung, serta validasi hasil uji. Setiap data yang masuk tersimpan secara sistematis dalam satu basis data terpadu, sehingga memudahkan pelacakan kembali informasi dan meningkatkan integritas data seperti yang diatur pada ISO 17025:2017. Selain itu, pemanfaatan IT memungkinkan laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi pengujian secara real-time. Pimpinan dapat memantau progres, beban kerja, kebutuhan sumber daya, hingga potensi hambatan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbasis data.

- b. **SIMKARA (Sistem Informasi dan Manajemen Perkantoran)**
Merupakan Sistem yang dibangun yang didalamnya terdapat beberapa menu yang dapat memudahkan dan kelancaran dalam manajemen perkantoran.
Menu-menu yang ada di SIMKARA seperti: presensi rapat, presensi apel pagi, presensi upacara, Aplikasi PTP (permintaan tindakan perbaikan), agenda kegiatan (merupakan catatan agenda atau jadwal kegiatan yang selalu diupdate setiap hari), permintaan kendaraan, pinjam ruang, serta menu-menu lain yang mendukung kelancaran manajemen perkantoran.
- c. **SiMANJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja)**
Merupakan sistem yang dibuat aplikasi berbasis web yang menampilkan data base dari perencanaan kinerja, perencanaan anggaran, Perencanaan Pengadaan sampai pemantauan kinerja (MONEV).
Di dalam SiMANJA juga merupakan pengumpulan data base dari masing-masing substansi atau bagian tata usaha, sehingga dapat diakses di manapun. Serta adanya menu terkait QMS, SPIP serta kearsipan.
- d. **HARMONI** yang merupakan inovasi berbasis Google Site sebagai manajemen kepegawaian di BBPOM di Yogyakarta yang berisi terkait data-data pengelolaan, data base dan evaluasi terkait kepegawaian.

6. Kualitas Pelayanan Publik yang Semakin Prima

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BPOM dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan BPOM merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

BBPOM di Yogyakarta dalam rangka sebagai bentuk komitmen Pelayanan Prima telah mencapai hasil sebagai upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat:

- a. UPP dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima.
- b. Inovasi Santan Prima sebagai Top 24 Inovasi KOIN BPOM.

- c. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM terbaik.
- e. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan tinggi, dengan trend nilai yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa pengguna layanan telah menerima layanan prima dari BBPOM di Yogyakarta. Kategori nilai > 80 adalah sangat baik.

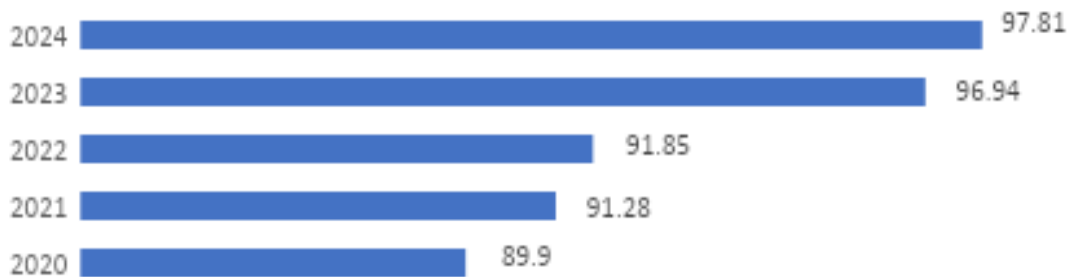


Diagram 32. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024

7. Jejaring dengan Lintas Sektor yang Baik

BBPOM di Yogyakarta telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BBPOM di Yogyakarta dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar terutama di wilayah kerja D.I.Yogyakarta.

Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, BBPOM di Yogyakarta dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Beberapa capaian yang telah diwujudkan terkait kerja sama, sebagai bukti keberhasilan pendampingan sekolah-desa dan pasar yang telah mencapai prestasi sebagai juara di tingkat nasional di tahun 2021 – 2025.

BBPOM di Yogyakarta telah membuat MoU dengan lintas sektor seperti: Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Pemda Kabupaten/ Kota, DPMPSTSP, Pemda provinsi, UGM dan beberapa organisasi massa. Kekuatan kerjasama akan mendukung simbiosis saling menguntungkan baik dalam hal pengawasan maupun penyebaran informasi untuk menjadikan masyarakat sebagai konsumen yang berdaya.



Semakin baiknya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) baik dengan Korwas PPNS Polda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Kejaksaan Negeri kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota dan Pihak Kepolisian di Polres Kabupaten/Kota serta Lapas Narkotika Sleman, sehingga penyelesaian berkas perkara tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan dengan baik dan lancar.

8. Laboratorium Pengujian Berstandar Internasional

Laboratorium memiliki peran strategis sebagai landasan saintifik dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Setiap keputusan pengawasan, mulai dari penerbitan izin edar, penarikan produk, hingga tindakan perlindungan konsumen, memerlukan dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah laboratorium menjadi pusat validasi, tempat data analitik yang akurat, objektif, dan terpercaya dihasilkan untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat.

Untuk menjamin konsistensi dan keandalan hasil uji, laboratorium menerapkan standar internasional ISO/IEC 17025: 2017. Standar ini memastikan bahwa seluruh proses pengujian, mulai dari kompetensi personel, kalibrasi peralatan, validasi metode, pengendalian mutu, hingga ketertelusuran hasil, dilakukan secara terstruktur dan sesuai persyaratan global. Penerapan ISO 17025 bukan hanya membuktikan kemampuan laboratorium dalam menghasilkan data yang sah, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada publik dan pemangku kepentingan bahwa setiap hasil uji telah melalui proses yang kredibel, terukur, dan diaudit secara berkala.

Keberhasilan Laboratorium BBPOM di Yogyakarta mempertahankan status akreditasi selama 5 kali berturut-turut sejak pertama kali memperolehnya di tahun 2001, menunjukkan komitmen dan konsistensi laboratorium dalam menjamin kualitas pengujian yang dilakukan dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan fondasi ilmiah yang kokoh dan penerapan manajemen mutu berbasis ISO 17025:2017, laboratorium menjadi pilar utama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Untuk menilai sejauh mana laboratorium di lingkungan Badan POM mampu memenuhi standar peralatan, ruang lingkup pengujian dan kompetensi personil, maka dituangkan dalam indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Selama periode renstra 2020-2024 laboratorium BBPOM di Yogyakarta terus meningkatkan pemenuhan standar tersebut hingga di tahun 2024 mencapai nilai 91,98% yang masuk dalam 3 besar laboratorium dengan nilai tertinggi.



Pemenuhan standar peralatan laboratorium menjadi elemen kunci dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif. Instrumen yang lengkap, terkalibrasi, dan sesuai standar memastikan proses pengujian berjalan akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laboratorium BBPOM di Yogyakarta dilengkapi dengan instrument canggih antara lain GCMS, GC, HPLC, Realtime PCR, ICP OES, AAS, Spektrofometer IR, Spektrofotometer UV/Vis, Spektrofotodensitometri, serta didukung dengan alat gelas yang terkalibrasi.

Sejak tahun 2014 Laboratorium Balai Besar POM di Yogyakarta ditunjuk sebagai Laboratorium Unggulan Baku pembanding berdasarkan SK Kepala Badan POM no. HK.04.1.71.02.14.0931 tahun 2014. Pengembangan baku pembanding untuk laboratorium unggulan bertujuan membantu PPPOMN untuk produksi Baku Pembanding Farmakope Indonesia dan Baku Pembanding Laboratorium. SK tersebut kemudian diperbarui pada awal tahun 2025 melalui SK Kepala Badan POM no. 410 Tahun 2025. Sejak menjadi laboratorium penguji Baku Pembanding, BBPOM di Yogyakarta telah berkontribusi sekitar 30% dari produksi baku pembanding nasional.

Transformasi digital merupakan kebutuhan pada era pengawasan modern untuk memastikan laboratorium tetap adaptif, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan pengujian masa depan. Laboratorium BBPOM di Yogyakarta sejak tahun 2023 telah merintis digitalisasi laboratorium melalui SMILe (Sistem Manajemen Informasi Laboratorium Pengujian) dan terus dikembangkan sampai sekarang. Dengan sistem digital, pengelolaan data, pemantauan instrumen, pelaporan hasil uji, serta pelacakan ketertelusuran dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan mengurangi kesalahan.

Sampai saat ini sudah banyak UPT di lingkungan Badan POM yang telah belajar tentang SMILe antara lain BPOM Kendari, BBPOM di Lampung, BBPOM di Semarang, BBPOM di Medan dan BBPOM di Jakarta. Selain itu aplikasi yang dikembangkan oleh PPPOMN seperti SIMA (Sistem Informasi Metode Analisa), Infalab dan DIKOLABORASI (Digitalisasi Tata Kelola Peralatan Laboratorium dan Layanan Kalibrasi), sangat mendukung transformasi digital laboratorium untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan laboratorium.

9. Kegiatan Pemberdayaan, Pembinaan, dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha yang Intensif

Sejalan dengan peningkatan *regulatory assistance* dan upaya peningkatan keamanan dan mutu produk pangan olahan, kosmetik, dan obat bahan alam,

BPOM di Yogyakarta melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing produk.

Di tahun 2020, BBPOM di Yogyakarta menginisiasi Inovasi Berpendar (Bersama Pendampingan UMKM Untuk Memperoleh Izin Edar) yang berhasil mengkolaborasikan program pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media (pentahelik). Melalui Inovasi ini berhasil meningkatkan jumlah UMKM pangan olahan di wilayah DIY, dengan laju pertumbuhan 96 UMKM/tahun pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. Profil dan Sebaran Kenaikan Jumlah UMKM di DIY tahun 2015-2024

Kabupaten/Kota	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Yogyakarta	-	2	3	5	10	14	18	36	48	65
Kabupaten Sleman	7	11	14	22	32	60	73	135	177	224
Kabupaten Kulon Progo	1	1	1	1	1	3	15	29	45	56
Kabupaten Bantul	1	4	4	5	9	22	26	53	74	96
Kabupaten Gunungkidul	-	1	3	6	7	9	10	19	25	36
D I Yogyakarta	9	19	25	39	59	108	142	272	369	477

Berdasarkan analisis regresi sederhana, jumlah UMKM di DIY pada tahun 2015–2019 mengalami peningkatan dari 9 hingga 59 usaha (laju pertumbuhan sebesar 12 usaha per tahun) dengan regresi $y = 12x - 24174$.

Setelahnya, terjadi peningkatan yang signifikan seiring dengan dilaksanakannya intensifikasi pendampingan. Jumlah UMKM yang pada tahun 2019 adalah 59 meningkat drastis mencapai 477 usaha pada tahun 2024 (laju pertumbuhan sebesar 96 usaha per tahun) dengan regresi $y = 96,5x - 194849$.

Dengan nilai regresi tersebut, jumlah UMKM Pangan Olahan di DIY pada tahun 2028 diperkirakan akan mencapai lebih dari 800 UMKM. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendampingan UMKM dapat meningkatkan laju pertumbuhan UMKM di wilayah DIY.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Rentang Generasi, Gap SDM, dan Pemenuhan ABK yang belum memadai

Rentang Generasi, Gap SDM dan Pemenuhan ABK yang belum memadai BBPOM di Yogyakarta memiliki rentang generasi yang cukup besar, dimana terbesar adalah generasi X yaitu 59%, generasi Y (milenial) sebanyak 37,67% dan generasi Z hanya ada 2,97%. Gap SDM ini akan mempengaruhi kecepatan SDM dalam menggunakan TI. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi mengakibatkan belum optimalnya pengintegrasian data dan aplikasi di BBPOM di Yogyakarta.

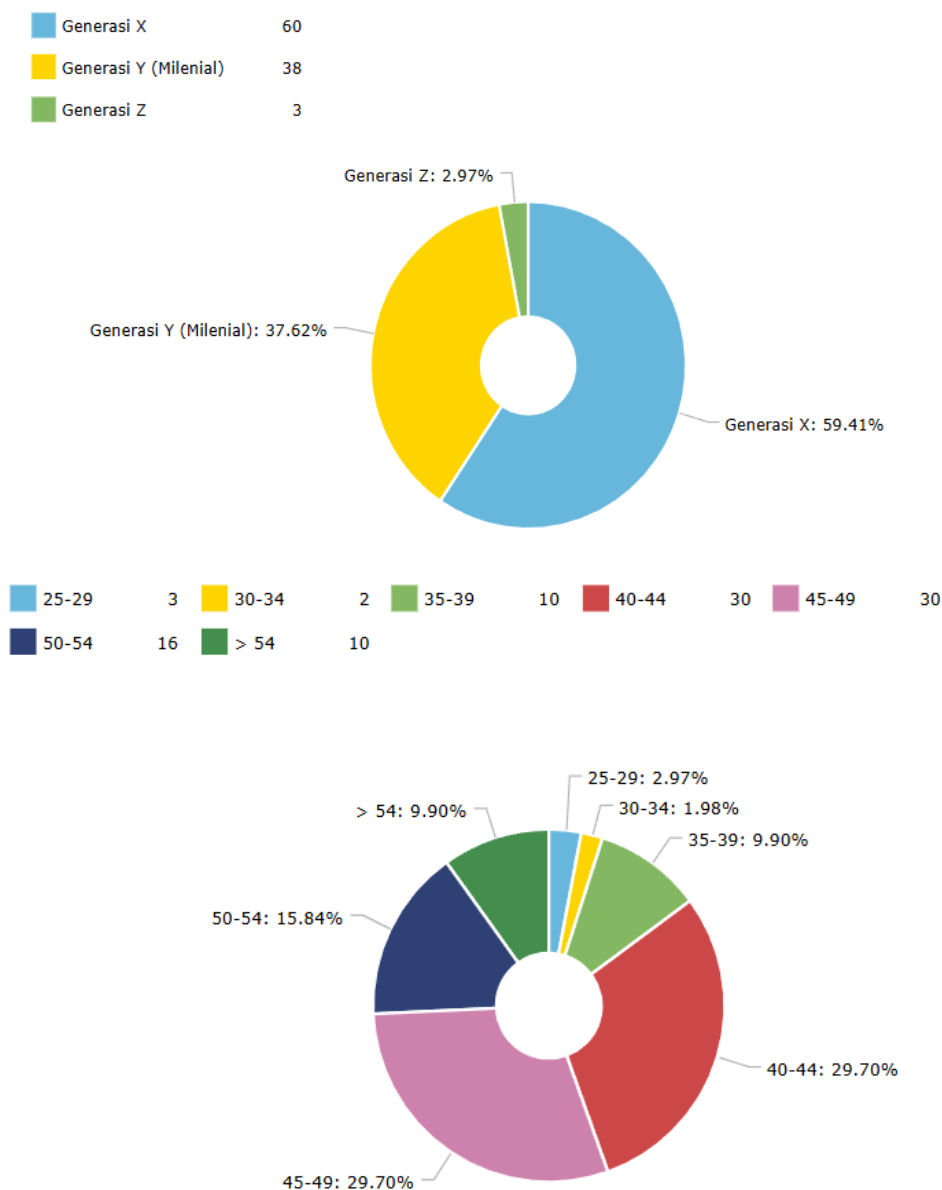


Diagram 33. Profil SDM Berdasar Generasi



Laboratorium saat ini menghadapi tantangan karena komposisi SDM pengujian didominasi oleh analis berusia lebih dari 40 tahun (88%), dan hanya 12% yang kurang dari 40 tahun. Kondisi ini membawa implikasi signifikan terhadap keberlanjutan kompetensi teknis. Analis senior memiliki pengalaman panjang dan kedalaman pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengujian, namun pada saat yang sama, adaptasi terhadap teknologi baru kerap memerlukan waktu lebih panjang. Peralatan modern berbasis otomasi, perangkat lunak analitik lanjutan, serta sistem pengolahan data digital membutuhkan kemampuan literasi teknologi yang tinggi dan pembelajaran berkesinambungan. Penguasaan alat yang kompleks membutuhkan literasi teknologi dan pembelajaran cepat, sehingga kurangnya regenerasi SDM dapat menghambat peningkatan kapasitas laboratorium. Diperlukan strategi pengembangan SDM dan rekrutmen analis muda untuk memastikan keberlanjutan kompetensi dan kesiapan menghadapi tuntutan teknologi pengujian di masa depan.

2. Kesenjangan Kompetensi SDM dalam pengolahan data dan pemanfaatan IT

Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural. Kesenjangan kompetensi di antara pegawai BBPOM di Yogyakarta merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan inefisiensi dalam proses kerja, di mana sebagian pegawai menghadapi beban kerja yang berlebihan, sementara yang lain belum dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kepuasan kerja pegawai, tetapi juga berpotensi menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan, karena tugas-tugas krusial mungkin tidak terlaksana dengan standar dan ketepatan waktu yang dibutuhkan. Perbedaan tingkat kompetensi antar pegawai dapat melemahkan kemampuan BBPOM di Yogyakarta dalam menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Fungsi pengawasan yang efektif menuntut pemahaman yang mendalam dan kompetensi yang merata di seluruh unit kerja, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Untuk menyelaraskan perkembangan sistem digitalisasi pengawasan oleh Badan POM, selaku UPT diperlukan juga penyelarasan kemampuan personil yang sangat fasih dalam pemanfaatan sistem digitalisasi ini. Perbedaan generasi pada SDM di BBPOM di Yogyakarta, membuat gap yang besar dalam kelihaian pemanfaatan digitalisasi ini. Hal ini diperlukan komitmen pimpinan dan keselarasan program pengembangan SDM yang ada di PPSPDM atau program pengembangan SDM di BBPOM di Yogyakarta.

3. Sarana prasarana yang belum terpenuhi

Beberapa sarana publikasi masih menggunakan fasilitas lama seperti banner, poster yang ditempel di dinding, belum ada fasilitas *e-kios* yang mampu menampung banyak informasi dan bisa berganti-ganti sesuai kebutuhan yang diinginkan.

Salah satu kelemahan yang dihadapi laboratorium BBPOM di Yogyakarta adalah usia beberapa instrumen yang sudah tua, terutama yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun. Instrumen dengan usia pakai yang panjang berpotensi mengalami penurunan kinerja, peningkatan frekuensi gangguan, serta ketidakstabilan hasil pengukuran. Hal ini dapat berdampak hasil uji, sehingga memengaruhi efektivitas proses pengawasan berbasis data laboratorium.

Selain itu, teknologi yang sudah usang juga membuat instrumen kurang responsif terhadap perkembangan metode analisis terbaru dan tuntutan pengujian yang semakin kompleks. Waktu pemeliharaan yang lebih panjang dan biaya perbaikan yang meningkat turut menjadi tantangan, serta berpotensi menunda proses pengujian. Keterbatasan ini menegaskan pentingnya program pembaruan dan modernisasi peralatan secara berkala untuk memastikan laboratorium tetap mampu menyediakan data yang valid, tepat waktu, dan sesuai standar.

4. Kondisi Gedung kurang memadai dan belum sesuai Grand design BPOM

Fasilitas pelayanan publik seperti arena bermain, ruang laktasi, pojok tenang dan ruang PPID masih belum memadai karena keterbatasan ruangan, sehingga hanya mampu menyediakan fasilitas dengan persyaratan minimal. Sebagian laboratorium di BBPOM di Yogyakarta menempati bangunan yang telah berusia lebih dari 40 tahun (Laboratorium Obat, Obat Tradisional dan kosmetik) dengan kondisi pelistrikan yang kurang optimal. Hal ini berdampak pada fluktuasi tegangan dan sistem grounding yang kurang baik, sehingga dapat menyebabkan kerusakan alat yang menghambat kelancaran operasional. Diperlukan upaya pemeliharaan bangunan, pengamanan kelistrikan, serta penggunaan UPS/penstabil tegangan untuk menjamin stabilitas lingkungan kerja dan integritas hasil pengujian.

5. Sistem IT yang belum terintegrasi

Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan



lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, dan mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola oleh BBPOM di Yogyakarta, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Data merupakan tools yang dapat membantu pengawasan lebih efektif karena dapat membantu melihat pola, tren, dan risiko yang terkait dengan sediaan farmasi dan pangan olahan, namun hingga saat ini, BBPOM di Yogyakarta belum memiliki sistem yang dapat mengintegrasikan data pengawasan pre dan post market. Dampaknya adalah target pengawasan yang ditetapkan kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analisa secara memadai yang bisa mendukung optimalisasi pengawasan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi mengakibatkan belum optimalnya pengintegrasian data pre dan post market. Saat ini data masih menjadi milik masing masing substansi dan terpisah pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik.

Dampak dari sistem TI yang terfragmentasi ini berlanjut ke daya tanggap BPOM dalam merespons isu dan perubahan yang cepat terjadi di industri obat dan makanan, terkait dengan updating regulasi untuk pemenuhan standar yang berlaku.

Kesulitan ini membatasi potensi BPOM untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

6. Anggaran pemberdayaan Masyarakat yang belum memadai

Di tahun 2025 anggaran yang diterima hanya sekitar 12 % dari anggaran tahun sebelumnya, menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, KIE dan layanan publikasi tidak bisa berjalan optimal. Beberapa tahapan ditidakan atau diperbaiki dengan interaksi yang minimal dengan masyarakat, sehingga dikhawatirkan pesan-pesan Obat dan Makanan Aman tidak tersampaikan dengan baik.

Peluang (Opportunity)

1. Dukungan *stakeholder*, lintas sektor dalam meningkatkan efektifitas pengawasan

Adanya Inpres nomor 3/2017 yang mendorong terbentuknya TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan) yang diwajibkan bagi Propinsi/Kabupaten/Kota untuk pembentukan tim dalam pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan efektifitas tim yang telah terbentuk.

2. Berkembangnya usaha UMKM di bidang Obat dan Makanan dan banyaknya inovasi produk

BBPOM di Yogyakarta dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan dengan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas.

Berikut beberapa upaya BBPOM di Yogyakarta dalam mendukung UMKM

a. Pendampingan dan Pelatihan

BBPOM di Yogyakarta telah melakukan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang keamanan, mutu dan legalitas produk melalui bimbingan teknis, pendampingan, fasilitasi bantuan uji laboratorium produk dalam rangka pendaftaran, dan desk percepatan evaluasi melalui inovasi Lancip (Layanan Cepat Integrasi dengan MPP (Mal Pelayanan Publik)).

b. Kerja Sama dengan Industri dan Pemerintah

BBPOM di Yogyakarta melakukan kerja sama dengan stake holder untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan pendampingan dan fasilitasi bersama untuk kemudahan, percepatan, dan meringankan biaya pengujian dan registrasi produk. Melalui Inovasi Berpendar (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Izin Edar) telah banyak UMKM di wilayah DIY telah mendapatkan manfaatnya. BBPOM di Yogyakarta juga melaksanakan program Pangan Aman Goes to Kampus yang memfasilitasi magang mahasiswa dalam rangkaian pemberdayaan sehingga mampu menjadi enterprenuer atau fasilitator UMKM pangan olahan. Selain itu, melalui pemberdayaan Orang Tua Angkat UMKM, BBPOM di Yogyakarta sebagai pen jembatan antara industri besar dan usaha mikro kecil sehingga mampu mendorong fasilitasi daya saing produk.

c. Pengembangan Inovasi:

BBPOM di Yogyakarta mendukung pengembangan inovasi produk obat dan makanan melalui fasilitasi diskusi dengan Direktorat BPOM yang mengampu kegiatan standarisasi, registrasi, dan pendampingan pelaku



usaha yang fokus pada hilirisasi riset inovatif untuk mendukung UMKM berdaya saing global dengan fasilitasi industri obat dan makanan. Dengan demikian, BBPOM di Yogyakarta berperan aktif dalam mendukung perkembangan UMKM di bidang obat dan makanan melalui berbagai program dan inovasi yang bertujuan meningkatkan keamanan, mutu, dan daya saing produk UMKM.

3. Ekspektasi Masyarakat terhadap BBPOM di Yogyakarta yang Tinggi

Ekspektasi masyarakat terhadap Balai Besar POM di Yogyakarta cukup tinggi dalam hal pengawasan obat dan makanan. Mereka mengharapkan lembaga ini dapat melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu.

Masyarakat berharap Balai Besar POM di Yogyakarta dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan informasi tentang cara mengonsumsi produk obat dan makanan yang aman dan tepat. Selain itu, lembaga ini diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan obat dan makanan.

Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, menandakan tingkat kepercayaan yang semakin meningkat akan peran Balai Besar POM di Yogyakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman. Harapan bahwa Balai Besar POM di Yogyakarta mampu bertindak, memberikan peluang untuk melebarkan sayap berkoordinasi dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan, serta menambah konten edukasi melalui media sosial untuk memperluas cakupan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar POM di Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan, serta pengujian sampel produk untuk memastikan keamanannya. Kerja sama dengan komunitas pramuka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan percaya diri dalam mengonsumsi produk obat dan makanan yang beredar di pasaran.

Dalam hal pemberian pelayanan informasi BBPOM di Yogyakarta melalui 2 (dua) metoda yaitu langsung dan tidak langsung. Informasi tidak langsung melalui media massa (cetak, online, dan elektronik) dan media sosial yang

selalu aktif menyampaikan informasi tentang Obat dan Makanan maupun kegiatan pengawasan. Media Sosial BBPOM di Yogyakarta yang aktif yaitu:

- a. Email : bpom_yogyakarta.pom.go.id
- b. Youtube : Balai Besar POM di Yogyakarta
- c. Instagram : @bbpom_yogyakarta

Selain itu, pendekatan terhadap masyarakat juga dilakukan secara langsung, melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada berbagai komunitas terutama di daerah dengan keterbatasan akses digital. Sebagai institusi yang memiliki SDM dengan kompetensi yang baik, kehadiran BBPOM di Yogyakarta sangat dibutuhkan, dalam wujud sebagai narasumber dengan penyelenggaraan acara yang dilakukan oleh berbagai komunitas mulai dari lintas sektor, akademisi, kalurahan, organisasi massa dan lain-lain. Data narasumber beserta peserta yang dilakukan KIE adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Permintaan Narasumber Tahun 2022-2025

Tahun	Permintaan Narsum	Peserta
2022	201 kali	8.446 orang
2023	244 kali	8.465 orang
2024	144 kali	5.370 orang
2025	96 kali	10.631 orang

4. Perkembangan Teknologi yang semakin Maju

Pesatnya perkembangan teknologi perlu diadaptasi melalui peningkatan digitalisasi proses bisnis BBPOM di Yogyakarta. Peluang BBPOM di Yogyakarta dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerja, dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BBPOM di Yogyakarta dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BBPOM di Yogyakarta untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat

luas. Mengoptimalkan berbagai produk dan layanan informasi yang telah dimiliki dan berpotensi tinggi menjadi rujukan masyarakat antara lain:

- a. Website resmi www.pom.go.id, yang menyediakan informasi lengkap seputar regulasi, izin edar, hasil pengawasan, klarifikasi hoax, serta edukasi keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. Akun media sosial resmi, yang menjadi kanal responsif dalam menyampaikan informasi terkini seputar sediaan farmasi dan pangan olahan, kampanye edukatif, dan penangkalan hoax serta informasi obat dan makanan yang menyesatkan.

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam laboratorium analisis membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, keamanan data, dan kecepatan proses pengujian. Dengan perkembangan teknologi digital dan otomasi, AI dapat menjadi pendorong transformasi layanan laboratorium menuju tata kelola modern berbasis data. Peluang AI dalam otomatisasi pelaporan, *predictive maintenance instrument*, analisis data, *audit trail*, manajemen persediaan, serta dashboard informasi dan system *early warning* yang menggambarkan tren temuan secara *real time* mendukung pengambilan keputusan yang cepat untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat.

5. Pentingnya Keamanan Obat dan Makanan di Wilayah Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota wisata

Yogyakarta, sebagai kota wisata dan kota pelajar, memiliki peran penting dalam pengawasan obat dan makanan.

- a. Pusat Pendidikan:
Yogyakarta memiliki sebanyak 13 (tiga belas) universitas dan institusi pendidikan Negeri seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), UIN Sunan Kali Jaga, ISI, Poltekes kemankes dan lainnya. Serta banyaknya Universitas swasta yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh) baik itu Universitas, Institusi, Sekolah tinggi, Politeknik, Akademi dan Lembaga Profesional Hal ini dapat menjadi potensi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan dan obat-obatan.
- b. Sebagai Kota Wisata
Sebagai kota wisata, Yogyakarta memiliki banyak pengunjung yang datang setiap tahun. Oleh karena itu, pengawasan obat dan makanan menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan pengunjung. Sehingga Yogyakarta perlu meningkatkan pengawasan



terhadap produk obat dan makanan yang dijual di tempat-tempat wisata, seperti restoran, warung, dan pedagang kaki lima. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan pangan kepada pedagang dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan masyarakat serta pengunjung tentang pentingnya keamanan pangan. Sehingga Yogyakarta dapat menjadi destinasi wisata yang aman dan sehat bagi pengunjung.

6. Pemanfaatan Media Sosial yang semakin tinggi

Di era digital, penyebaran informasi tidak cukup hanya dengan KIE secara langsung ataupun melalui media elektronik, diperlukan media sosial yang saat ini telah menjadi satu media wajib terutama bagi generasi muda. BPOM di Yogyakarta telah memiliki beberapa platform media sosial antara Instagram dengan 6.240 follower, X dengan 1,203 follower, FB 1.300 follower dan youtube dengan 2.300 subscriber.

7. Program Makan Bergizi Gratis

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. BPOM berpartisipasi dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan memastikan keamanan dan mutu pangan yang disajikan, mulai dari pengawasan rantai pasok dan proses produksi, pelatihan SDM, pengambilan sampel dan pengujian produk, hingga penanganan kasus keracunan pangan.

Peran strategis BPOM dalam mendukung keberhasilan MBG, tidak hanya dalam menjamin keamanan dan mutu pangan, BPOM juga berperan dalam pengembangan SDM pelaksana sehingga penerapan keamanan pangan dalam seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Pengawasan BPOM tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi mencakup sistem dan proses di seluruh rantai produksi makanan bergizi.

Hal ini didukung dengan ketersediaan SDM yang telah memiliki kompetensi untuk menularkan ilmu terkait keamanan pangan, memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian sampel MBG dan memiliki tools untuk pelaksanaan pemeriksaan proses produksi

Sampai Oktober 2025 telah operasional sekitar 200 SPPG di wilayah DIY yang melibatkan 10.000 karyawan SPPG yang bertugas menyediakan Makan bergizi Gratis bagi siswa TK-SD-SMP-SMA dan 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Ibu Balita). Banyaknya personil yang terlibat dengan mencapai ribuan sasaran penerima manfaat merupakan peluang untuk dilakukannya pendampingan maupun edukasi agar program dapat berjalan dengan lancar.

8. Jejaring Laboratorium yang Kuat

Jejaring laboratorium merupakan elemen strategis yang terus dikembangkan dalam sistem pengawasan obat dan makanan, sebagai penguat sistem deteksi dini terhadap adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. BBPOM di Yogyakarta sejak tahun 2023 telah menginisiasi jejaring laboratorium di wilayah DIY yaitu dengan Labkesda Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY. Peran laboratorium jejaring antara lain dalam pengujian sampel DAK dan kasus KLB keracunan pangan. Kolaborasi antar-laboratorium juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, kegiatan transfer pengetahuan, pelatihan teknis bersama, sehingga mendorong penguatan kompetensi analis. Dengan jejaring laboratorium akan menciptakan ekosistem pengujian yang responsif, kredibel, dan selaras dengan perkembangan regulasi dan ilmu pengetahuan.

Ancaman (*Threat*)

1. Maraknya peredaran obat dan sediaan farmasi dan pangan olahan secara online

Masyarakat perlu dilindungi dari peredaran obat dan makanan secara daring yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta gizi. Regulasi yang mengatur teknis dan tindak lanjut pengawasan obat dan makanan secara daring telah diimplementasikan, namun pengawasan secara daring masih banyak menimbulkan permasalahan seperti tidak ada pengawasan dari penyedia penjualan online terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang diedarkan secara daring terkait legalitas dan jenis produk yang dapat dijual secara daring sesuai ketentuan dari Badan POM. Tindak lanjut hasil pengawasan, dinilai oleh masyarakat masih tidak optimal, karena peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan masih dengan mudah didapatkan. Tindak lanjut hasil pengawasan secara daring belum optimal dilakukan untuk perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring, BBPOM di Yogyakarta melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring, termasuk iklan yang menyertainya pada sistem Elektronik, media sosial dan media daring. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perekonomian, peredaran obat dan makanan yang dijual secara daring juga

semakin meningkat. Pengawasan obat dan makanan secara daring telah dilakukan, baik pengawasan kepada produk dengan sampling dan pengujian produk juga pengawasan iklan. Selain itu juga dilakukan patroli siber terhadap link akun di *e-commerce* dan media sosial yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal untuk dilakukan profiling atau direkomendasikan takedown ke IDEAS dan Kementerian Komdigi.

Adapun jumlah link yang menjual produk obat dan makanan TIE dan atau mengandung bahan berbahaya yang ditemukan petugas BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024 adalah total 914 link produk dengan sebaran sebagai berikut, tertinggi adalah Kosmetik 333 link, Obat bahan alam (Obat tradisional) sejumlah 243 link, Obat ditemukan 170 link, Pangan Olahan 103 link dan Suplemen Kesehatan 65 link ; sedangkan tahun 2025 sampai Bulan Oktober 2025 total yang diajukan rekomendasi takedown 1347 link, dengan rincian dari yang tertinggi Obat bahan alam 408 link, Obat 387 link, kosmetik 283 link, pangan olahan 179 link dan suplemen Kesehatan 69 link. Hasil patroli siber tersebut dilaporkan ke Badan POM melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan, untuk kemudian direkomendasikan takedown ke Kemenkomdigi.

Berdasarkan data perkara tahun 2024, 3 perkara yang dilakukan pemberkasan 2 perkara diantaranya merupakan perkara yang tersangkanya melakukan penjualan secara online di *e-commerce* dan pada tahun 2025, 3 perkara yang didapatkan 2 perkara diantaranya berasal dari patroli siber, yaitu melakukan penjualan produk secara online sediaan farmasi tanpa izin edar. Pengaduan terkait pelanggaran peraturan yang diterima oleh BBPOM di Yogyakarta umumnya terkait dengan peredaran Obat dan Makanan ilegal yang sebagian besar diantaranya adalah peredaran melalui media online. Kesulitan tindak lanjut karena beberapa data tidak lengkap dengan alamat yang tidak jelas. Tabel layanan pengaduan menunjukkan data yang fluktuatif, yang berarti bahwa peredaran produk Obat dan Makanan ilegal masih ada dan perlu penanganan yang lebih intensif.

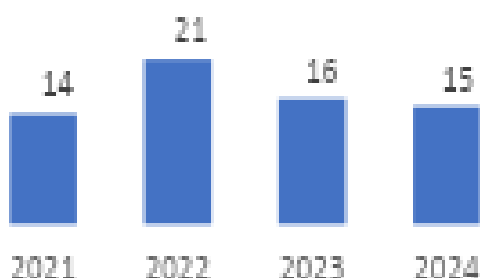


Diagram 34. Data Layanan Pengaduan

2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan BPOM

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Pemanfaatan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Kecepatan merespon pengaduan dan pelayanan prima yang diberikan, berdampak kepada ekspektasi masyarakat kepada BBPOM di Yogyakarta, semakin tinggi dan harapan masyarakat, BBPOM di Yogyakarta mampu merespon semua permasalahan terkait produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Yogyakarta.

3. Isu obat dan makanan yang beragam dan kompleks

Perkembangan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkembang di masyarakat, pada aspek pengawasan belum dapat diakomodir dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan. Sistem yang agile sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan isu obat dan makanan di masyarakat, regulasi yang memadai dan pengetahuan serta kemampuan SDM. Maraknya kejadian KLB Keracunan Pangan pada program MBG merupakan salah satu issue yang menjadi topik bahasan karena kejadian yang berulang dengan korban yang cukup banyak. Sampai saat ini Oktober 2025 KLB KP program MBG yang tercatat di BBPOM di Yogyakarta sebanyak 10 kejadian dengan sekitar 2.500-an korban dari murid dan guru.

4. Kemudahan perizinan Sarana Produksi Pangan Olahan

Kemudahan perizinan pada sarana produksi pangan olahan membawa dampak terhadap produk pangan olahan dengan label yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke substansi Infokom, pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat banyak terkait label produk pangan olahan tidak sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan, dengan sistem perizinan yang saat ini berlaku, untuk sarana produksi pangan olahan dengan lembar komitmen dan *self declare*, belum dilakukan evaluasi label oleh Badan POM. Hal ini membawa dampak pada masyarakat, karena



mengonsumsi produk pangan olahan yang informasi terhadap kebenaran komposisi dan informasi label lainnya belum terverifikasi. Diperlukan mekanisme pengawasan untuk mengantisipasi hal ini untuk melindungi masyarakat.

5. Perdagangan Global dan *Emerging Issue*

Tuntutan perdagangan global dan munculnya berbagai *emerging issue* keamanan pangan mengharuskan laboratorium memiliki kapasitas pengujian yang unggul dan *up-to-date*. Isu kontaminan pada pangan seperti radio aktif, mikroplastik, residu pestisida generasi terbaru, batas cemaran mikrobiologi, hingga potensi bahaya dari bahan pangan berbasis teknologi baru, menuntut laboratorium untuk selalu siap menghadapi tantangan analisis yang semakin kompleks. Untuk itu, laboratorium harus memiliki kompetensi teknis, metode analisis mutakhir, serta peralatan berstandar tinggi guna memastikan bahwa produk pangan yang beredar tidak hanya memenuhi regulasi nasional, tetapi juga mampu bersaing dalam pasar internasional.

Semakin beragamnya jenis produk obat dan makanan di pasaran menuntut peningkatan kapabilitas pengawasan, baik melalui strategi yang adaptif, kompetensi personel yang mumpuni, maupun ketersediaan baku pembanding dan metode analisis yang mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu kebijakan kemudahan perizinan edar produk obat dan makanan memperluas peluang usaha bagi masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan karena semakin banyaknya produk yang harus dipantau untuk memastikan keamanan dan mutu bagi konsumen.

6. Dukungan Regulasi di Pemerintah Daerah terhadap pengawasan obat dan makanan belum memadai

Regulasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari pemerintahan daerah, masih perlu peningkatan untuk mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BBPOM di Yogyakarta. Hal ini diperlukan sebagai payung hukum dalam pemberian pembinaan dan sanksi administrasi kepala pelaku usaha.

Karena perkembangan produk sediaan farmasi dan pangan olahan saat ini membutuhkan respon cepat berupa regulasi-regulasi yang dapat digunakan, baik regulasi dari Badan POM ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah untuk efektifitas pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.

Tabel 4. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>) 1. Komitmen Pimpinan dan Pegawai BBPOM di Yogyakarta yang berintegritas 2. Sistem Pengawasan Full Spectrum 3. Sistem Kelembagaan BBPOM di Yogyakarta yang Kuat 4. SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Kompeten dan Profesional 5. Sistem Operasional Teknologi, Komunikasi dan Informasi yang Memadai 6. Kualitas Pelayanan Publik yang Semakin Prima 7. Jejaring dengan lintas Sektor yang Baik 8. Laboratorium Pengujian Berstandar Internasional 9. Kegiatan Pemberdayaan, Pembinaan, dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha yang Intensif	Kelemahan (<i>Weakness</i>) 1. Rentang Generasi, Gap SDM dan Pemenuhan ABK yang belum memadai 2. Kesenjangan Kompetensi SDM dalam pengolahan data dan pemanfaatan IT 3. Sarana prasarana yang belum terpenuhi 4. Kondisi Gedung kurang memadai belum sesuai Grand design BPOM 5. Sistem IT yang belum terintegrasi 6. Anggaran pemberdayaan Masyarakat yang belum memadai
Peluang (<i>Opportunities</i>) 1. Dukungan <i>stakeholder</i> dalam meningkatkan efektifitas pengawasan 2. Berkembangnya usaha UMKM di bidang Obat dan Makanan dan banyaknya inovasi produk 3. Ekspektasi Masyarakat terhadap BBPOM di Yogyakarta yang Tinggi 4. Perkembangan Teknologi yang semakin Maju 5. Pentingnya keamanan Obat dan Makanan di wilayah Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota wisata 6. Pemanfaatan Media Sosial yang semakin tinggi 7. Program Makan bergizi Gratis 8. Jejaring Laboratorium yang Kuat	Ancaman (<i>Threats</i>) 1. Maraknya peredaran obat dan sediaan farmasi dan pangan olahan secara online 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan BPOM 3. Isu obat dan makanan yang beragam dan kompleks 4. Kemudahan Perizinan Sarana Produksi Pangan Olahan 5. Perdagangan Global dan <i>Emerging Issue</i> 6. Dukungan regulasi di Pemerintah Daerah terhadap pengawasan obat dan makanan belum memadai

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

II.1 VISI

Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi Misi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk

sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan Misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 4. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian

BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

II.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa

dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

II.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Yogyakarta, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Yogyakarta akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
- c. Jumlah desa pangan aman.
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 6. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Yogyakarta periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini.

Agar Capaian Sasaran Kegiatan di BBPOM di Yogyakarta dapat lebih optimal pada tahun 2025-2029, perlu dilakukan identifikasi risiko pada setiap sasaran kegiatan. Yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap indikasi risiko yang kemungkinan akan terjadi. BBPOM di Yogyakarta merumuskan mitigasi risiko agar sasaran kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan BBPOM di Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan

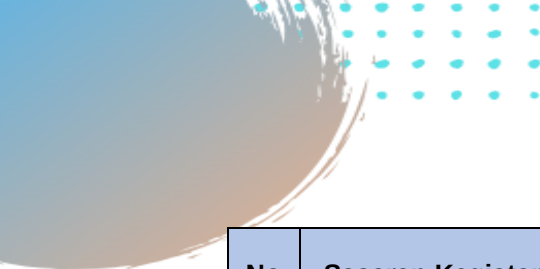
No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi dan Pangan Olahan tidak dilaporkan dan ditindaklanjuti tepat waktu	Melakukan monitoring timeline pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut	Ketua Tim Inspeksi
		Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi tidak diawasi sesuai standar dan dilaporkan tepat waktu	Memberi penugasan kepada personil dan melakukan monitoring kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik	Ketua Tim Inspeksi
		Target pengendalian AMR di wilayah UPT tidak tercapai	Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang pengendalian resistensi antibiotik di wilayah kerja sesuai dengan surat keputusan kepala Badan POM	Ketua Tim Inspeksi
		Pelaksanaan dan realisasi sampling tidak sesuai perencanaan	1.Melakukan Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sampling 2.Membuat justifikasi terhadap ketidaksesuaian yang ada 3.Menyiapkan rencana tindak lanjut	Ketua Tim Sampling

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Penyelesaian pengujian sediaan farmasi, pangan olahan dalam kemasan dan pangan PIRT melewati timeline yang telah ditetapkan pada sasaran mutu;	1. Monitoring dan evaluasi berkala penyelesaian pengujian sampel 2. Koordinasi dengan Pemeriksaan untuk mengatur pengiriman sampel sesuai dengan ketersediaan reagen, media/BP, dan alat. 3. Berkoordinasi dengan bagian pengadaan 4. Berkoordinasi dengan balai regional 5. Melakukan investigasi sesuai dengan HULS (Hasil Uji di Luar Spesifikasi) 6. Monev pelaporan SIPT	Ketua Tim Pengujian
		Pengujian sediaan farmasi, pangan olahan dalam kemasan dan pangan PIRT dilakukan tidak sesuai dengan pedoman sampling	1. Berkoordinasi dengan PPPOMN, Balai regional 2. Berkoordinasi dengan bagian pengadaan 3. Berkoordinasi dengan teknisi alat	Ketua Tim Pengujian
		Sampel KLB tidak dapat dilakukan pengujian	1. Berkoordinasi dengan PPPOMN, Balai regional 2. Berkoordinasi dengan bagian pengadaan 3. Berkoordinasi dengan teknisi alat	Ketua Tim Pengujian Sampel KLB
		Belum semua hasil pengujian PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditindaklanjuti	Koordinasi dan komunikasi substansi pengujian dan pemeriksaan	Ketua Tim Sampling
		Pelaksanaan dan realisasi sampling tidak sesuai perencanaan	1. Melakukan Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sampling 2. Membuat justifikasi terhadap ketidaksesuaian yang ada	Ketua Tim Sampling

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			3. Menyiapkan rencana tindak lanjut	
		Tidak terpenuhinya kompetensi laboratorium, peralatan, ruang lingkup, dan metode terverifikasi sesuai Standar Kemampuan laboratorium	1. Melakukan Pelatihan/penugasan kepada personil 2. Mengajukan pengadaan baku, pengadaan sampel, reagen, media, suku cadang 3. Melakukan Pengajuan usulan pengadaan dan pemeliharaan alat 4. Evaluasi capaian SKL dan Ruang lingkup	Ketua Tim Pemenuhan SKL Laboratorium
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Pengawasan sarana fortifikasi tidak dilaporkan dan ditindaklanjuti tepat waktu	Melakukan monitoring timeline pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut	Ketua Tim Inspeksi
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Masyarakat belum mendapatkan manfaat dari pelaksanaan KIE karena materi kurang bisa dipahami atau rendahnya frekuensi paparan terhadap satu materi tertentu.	-Melakukan pembentukan kader untuk meningkatkan frekuensi paparan -Melakukan survei efektivitas KIE setiap kali selesai pemberian materi, survei sebagai bahan evaluasi dan tindakan perbaikan untuk KIE selanjutnya.	Ketua Tim Infokom
		KIE melalui program pemberdayaan masyarakat di sekolah, desa dan pasar tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya komunikasi dengan pemangku kepentingan	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait agar memudahkan komunikasi dalam pelaksanaan tahapan kegiatan	Ketua Tim Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaksanaan pendampingan UMKM tidak optimal, target pendampingan tidak tercapai	Melakukan perencanaan dan monitoring persentase capaian tahapan pendampingan UMKM secara berkala	Ketua Tim Sertifikasi
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kegiatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak sampai tahap 2, karena tersangka melarikan diri	Melakukan wajib lapor bagi tersangka yang kooperatif atau penahanan bagi tersangka yang tidak kooperatif, jika syarat penahanan dipenuhi.	Ketua Tim Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kegiatan deteksi dini kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak efektif	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan deteksi kejahatan yang dilakukan oleh petugas	Ketua Tim Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Pelayanan prima belum terwujud karena masyarakat tidak puas dengan layanan yang diberikan.	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dievaluasi tiap bulan.	Ketua Tim Infokom
		Standar pelayanan belum bisa dipenuhi secara keseluruhan (waktu/biaya/SDM/produk dll)	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk menjangkau masukan pengguna layanan, agar Standar Pelayanan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan	
		Petugas kurang berintegritas	Membuat Dokumen Pakta Integritas, WBS, SMAP, Uji Kelayakan Pegawai, Kode etik pegawai	

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Hasil evaluasi komponen pengungkit RB belum optimal	1. Memberikan Peluang kepada AoC agar berkontribusi yang lebih terukur 3. Membuat Pola mutasi pegawai dengan mendokumentasi dengan baik 4. Melakukan monev pemanfaatan teknologi informasi 5. Membuat Training Need Analisis berdasarkan kinerja 6. Membuat monev pengembangan kompetensi terhadap kinerja	Ketua Tim RB
		Kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera di tempat kerja	1. Melakukan sosialisasi mengenai K3 ke seluruh pegawai 2. Mengkondisikan sarana dan prasarana yang kurang memadai	Kepala Bagian TU
		Penatausahaan BMN aset tetap belum tertib	Meningkatkan pemahaman terhadap proses pengadaan dan penatausahaan BMN aset	Kepala Bagian TU
		Data kinerja belum dapat diandalkan karena terdapat kelemahan dalam proses pengukuran kinerja	Membuat matriks sebagai acuan penyamaan data kinerja di Laporan kinerja dan Evaluasi Internal dan RAPK terupdate	Ketua Tim SAKIP
		Perencanaan, Pelaksanaan anggaran, Kualitas Hasil (Output) yang menyebabkan Capaian Nilai Pelaksanaan Anggaran belum optimal	Melakukan Monev terhadap realisasi anggaran berdasarkan target triwulan pada rencana penarikan anggaran	ketua Tim NKA



No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Pengelolaan barang dan jasa kurang tertib	- Melakukan Perencanaan pengadaan lebih optimal - Melakukan monev terhadap proses pengadaan	PPK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

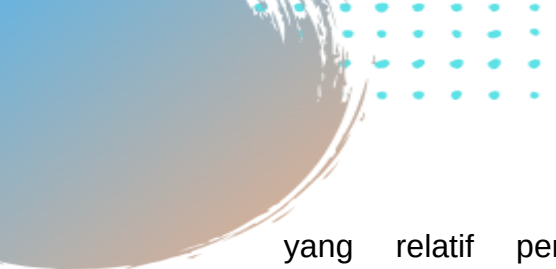
III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post* market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu



yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

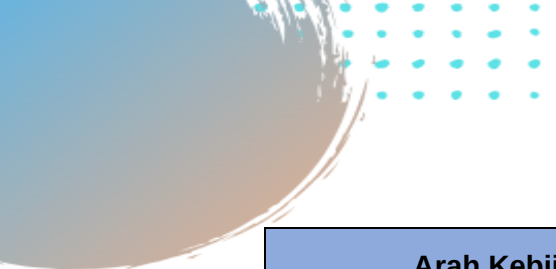
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

- a. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- b. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- c. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- d. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- e. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
- f. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
- g. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 8. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data



Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI YOGYAKARTA

Balai Besar POM di Yogyakarta mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post* market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.
Untuk mendukung arah kebijakan di atas, strategi BBPOM di Yogyakarta antara lain:
 - a. Melakukan peningkatan kompetensi SDM pengawas, baik pengawas di BBPOM di Yogyakarta dan SDM pengawas di pemerintah daerah.
 - b. Melakukan asistensi regulatori kepada pemerintah daerah dan juga kepada pelaku usaha untuk penerapan GMP dan GDP, termasuk dalam penerapan farmakovigilans.
 - c. Melakukan monitoring kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan pelaporan farmakovigilans.
 - d. Kerja sama dengan lintas sektor untuk memperkuat pengawasan sarana sarana baru atau sarana yang tidak berizin. Kerja sama lintas sektor dengan instansi teknis seperti dinas perizinan, dinas Kesehatan.
 - e. Menyampaikan program program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada lintas sektor, lembaga profesi untuk mensinergikan program Badan POM.
 - f. Mengembangkan digitalisasi data data pengawasan pre dan post market.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
Untuk mendukung arah kebijakan di atas, strategi BBPOM di Yogyakarta antara lain:

- 
- a. Mengimplementasikan hasil Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengacu pada alur mekanisme internal maupun eksternal, dibedakan atas tujuan atau asal informasi disampaikan atau diterima serta jenis bahan dilarang/bahan berbahaya, sesuai kewenangan masing-masing instansi, sesuai nota dinas Deputi Bidang Penindakan No. PD.01.01.6.10.25.111 tgl 23 Oktober 2025 Hal Alur Mekanisme Internal Pertukaran Informasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
 - b. Melakukan Patroli Siber dan profiling dilaporkan ke Direktorat Siber setiap bulan
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
- Untuk mendukung arah kebijakan di atas, strategi BBPOM di Yogyakarta antara lain:
- a. Pendampingan teknis untuk perizinan dan pemenuhan standar: melalui program pendampingan pelaku usaha, coaching, desk konsultasi, dan fasilitasi pengujian produk secara gratis dan percepatan perizinan melalui inovasi Lancip
 - b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GMP dan registrasi produk
 - c. Kolaborasi strategis dengan stakeholder dan instansi lain, dan didukung dengan Inovasi Berpendar
 - d. Kolaborasi dg sektor swasta (CSR), melalui program Orang Tua Angkat Tujuannya adalah agar UMKM menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi pada perekonomian nasional.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi BBPOM di Yogyakarta yaitu melakukan sosialisasi aplikasi yang mengampu layanan pengaduan dari masyarakat, antara lain:
- Website yogyakarta.pom.go.id yang terhubung dengan SP4NLAPOR, ULPK Badan POM dan WBS
 - Sosialisasi aplikasi BPOM Mobile setiap dilakukan KIE ke masyarakat
 - Sambungan HP complain manager yang dipublikasi di media dan ruang layanan
 - Publikasi media sosial sebagai sarana pengaduan dan layanan informasi

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi BBPOM di Yogyakarta yaitu melakukan penandatanganan MOU, Kesepakatan Bersama, antara BBPOM di Yogyakarta dengan lintas sektor terkait, akademisi, ormas dan pramuka sebagai salah satu upaya pelaksanaan pengawasan yang bersinergi.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
Untuk mendukung arah kebijakan di atas, strategi BBPOM di Yogyakarta antara lain:
 - a. Mewajibkan bagi seluruh karyawan BBPOM di Yogyakarta untuk mengikuti berbagai pelatihan termasuk pelatihan tidak terjadwal di IDEAS sebagai bentuk peningkatan kompetensi
 - b. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, magang, penugasan sesuai kebutuhan. Konsisten dalam implementasi ISO 17025:2017 serta terus meningkatkan nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai perencanaan. Pengembangan digitalisasi laboratorium, serta penguatan kajian berbasis data.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi BBPOM di Yogyakarta yaitu menggunakan berbagai macam aplikasi online baik yang telah ditetapkan oleh BPOM maupun aplikasi yang dibuat sendiri untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja.

Strategi Balai Besar POM di Yogyakarta

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan BPOM 2025-2029 serta Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Yogyakarta mengacu pada Arah Kebijakan BPOM serta menyesuaikan tugas fungsi melalui Analisa SWOT BBPOM di Yogyakarta yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman yang dihadapi sehingga dilakukan strategi yang mengawal proses pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan dalam jangka panjang.

Strategi Balai Besar POM di Yogyakarta berdasarkan Arah Kebijakan BPOM digambarkan dalam matriks berikut:

Tabel 9. Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Yogyakarta 2025-2029

Arah Kebijakan BPOM	Strategi BBPOM di Yogyakarta
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	• Peningkatan kompetensi SDM pengawas, baik pengawas di BBPOM di Yogyakarta dan SDM pengawas di pemerintah daerah • Melakukan asistensi regulatori kepada pemerintah daerah dan juga kepada pelaku usaha untuk penerapan GMP dan GDP, termasuk dalam penerapan farmakovigilans • Melakukan monitoring kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan pelaporan farmakovigilans • Kerja sama dengan lintas sektor untuk memperkuat pengawasan sarana sarana baru atau sarana yang tidak berizin. Kerja sama lintas sektor dengan instansi teknis seperti dinas perizinan, dinas kesehatan • Menyampaikan program program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada lintas sektor, lembaga profesi untuk mensinergikan program Badan POM • Mengembangkan digitalisasi data data pengawasan <i>pre dan post market</i>
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan encegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	• Mengimplementasikan hasil Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Dilarang / Bahan Berbahaya yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengacu pada alur mekanisme internal maupun eksternal, dibedakan atas tujuan atau asal informasi disampaikan atau diterima serta jenis bahan dilarang / bahan berbahaya, sesuai kewenangan masing-masing instansi, sesuai nota dinas Deputi Bidang Penindakan No. PD.01.01.6.10.25.111 tgl 23 Oktober 2025 Hal Alur Mekanisme Internal Pertukaran Informasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Dilarang / Bahan Berbahaya yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan • Melakukan Patroli Siber dan profiling dilaporkan ke Direktorat Siber setiap bulan

Arah Kebijakan BPOM	Strategi BBPOM di Yogyakarta
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	• Pendampingan teknis untuk perizinan dan pemenuhan standar: melalui program pendampingan pelaku usaha, coaching, desk konsultasi, dan fasilitasi pengujian produk secara gratis dan percepatan perizinan melalui inovasi Lancip • Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GMP dan registrasi produk • Kolaborasi strategis dengan stakeholder dan instansi lain, dan didukung dengan Inovasi Berpendar • Kolaborasi dg sektor swasta (CSR), melalui program Orang Tua Angkat Tujuannya adalah agar UMKM menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi pada perekonomian nasional.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Sosialisasi aplikasi yang mengampu layanan pengaduan dari masyarakat antara lain: • Website yogyakarta.pom.go.id yang terhubung dengan SP4NLAPOR, ULPK Badan POM dan WBS • Sosialisasi aplikasi BPOM Mobile setiap dilakukan KIE ke masyarakat • Sambungan HP complain manager yang dipublikasi di media dan ruang layanan • Publikasi media sosial sebagai sarana pengaduan dan layanan informasi
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penandatanganan MOU, Kesepakatan Bersama, antara BBPOM di Yogyakarta dengan lintas sektor terkait, akademisi, ormas dan pramuka sebagai salah satu upaya pelaksanaan pengawasan yang bersinergi.

Arah Kebijakan BPOM	Strategi BBPOM di Yogyakarta
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	- Mewajibkan bagi seluruh karyawan BBPOM di Yogyakarta untuk mengikuti berbagai pelatihan termasuk pelatihan tidak terjadwal di IDEAS sebagai bentuk peningkatan kompetensi - Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, magang, penugasan sesuai kebutuhan. Konsisten dalam implementasi ISO 17025:2017 serta terus meningkatkan nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai perencanaan. Pengembangan digitalisasi laboratorium, serta penguatan kajian berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Penggunaan berbagai macam aplikasi online baik yang telah ditetapkan oleh BPOM maupun aplikasi yang dibuat sendiri untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Yogyakarta juga dilaksanakan secara *responsive gender* dan inklusi sosial.

PROGRAM DAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Yogyakarta pada matriks di atas, Balai Besar POM di Yogyakarta melaksanakan kegiatan.

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Beberapa kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Yogyakarta antara lain:

1. Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

a. Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktuan Obat dan Makanan

- **Perencanaan/Evaluasi/Laporan**
Penyusunan perencanaan analisis kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan berdasarkan instruksi pimpinan unit kerja atau usulan dari petugas Balai Besar POM di Yogyakarta. Perencanaan analisis sekurang-kurangnya memuat latar belakang, tujuan, dan target waktu pelaksanaan analisis.
- **Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan**
Pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Secara terbuka menggunakan Teknik penelitian, wawancara, penelusuran Pustaka atau pengumpulan bahan keterangan secara daring melalui sumber terbuka terhadap informasi kejahatan Obat dan Makanan. Sedangkan secara tertutup menggunakan teknik elisitasi, pengamatan dan penggambaran bahan keterangan kejahatan Obat dan Makanan. Hasil pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dilakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan rekomendasi tindak lanjut yang tepat dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
- **Penyajian Laporan**
Petugas Cegah Tangkal menuliskan hasil analisis serta rekomendasi tindak lanjut dalam laporan penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan. Hasil analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang dihasilkan oleh UPT BPOM disampaikan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Direktur Cegah Tangkal sebagai laporan.
- **Focus Group Discussion (FGD) Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan**
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas bersama analisis yang telah disusun dengan substansi lain di Balai Besar POM Yogyakarta serta lintas sektor terkait. Dari kegiatan ini diharapkan adanya input dari peserta FGD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan.

b. **Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan**

- **Perencanaan Penjejak Digital Obat dan Makanan**
Perencanaan dilakukan untuk membahas persiapan melaksanakan patroli siber, jadwal, tema dan sarana prasarana yang diperlukan
- **Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan**
Pemantauan terhadap obat dan makanan yang beredar melalui media daring, seperti situs, website, sosial media, e-commerce yang melanggar ketentuan. Kemudian membuat daftar rekomendasi tautan (link) komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut untuk diajukan takedown ke pusat, dan beberapa link 4 yang belum ditakedown ditindaklanjuti dengan kegiatan penelusuran informasi melalui kegiatan profiling kejahatan obat dan makanan.
- **Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan**
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan atas informasi yang telah dihimpun sebelumnya dengan cara verifikasi lapangan terhadap data-data yang telah diperoleh melalui kegiatan patroli siber serta untuk mencari data dukung tambahan lain guna menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2. Penyelesaian Keputusan/ Sertifikasi Layanan publik

a. **Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi**

- **Pemeriksaan sarana produksi/distribusi dalam rangka sertifikasi dan verifikasi**
Dalam rangka pelayanan publik berupa pemberian rekomendasi terhadap sarana produksi, obat tradisional dan kosmetik, perlu dilakukan pemeriksaan/audit terhadap sarana yang hendak mengajukan izin edar ke Badan POM melalui penilaian terhadap pemenuhan aspek CPOTB dan CPKB. Selain itu, dengan diberlakukannya mandatory CDOB, maka sertifikasi CDOB terhadap PBF Pusat maupun Cabang didelegasikan ke Balai POM setempat, sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan CDOB pada sarana PBF Pusat/Cabang di wilayah DIY. Dengan dikeluarkan Izin Penerapan CPPOB berdasarkan komitmen pelaku usaha kategori mikro kecil dengan resiko rendah dan sedang, perlu dilakukan verifikasi terhadap penerapannya setelah keluar Izin penerapan CPPOB.

Sedangkan untuk industri pangan kategori menengah harus dilakukan penilaian sebelum dikeluarkan Izin Penerapan CPPOB.

- **Perjalanan Petugas Mall Pelayanan Publik**
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan mendekatkan layanan ke masyarakat/pelaku usaha di kabupaten, BBPOM di Yogyakarta membuka loket layanan Mall Pelayanan Publik di 5 kabupaten/kota. Petugas layanan publik akan memberikan layanan informasi dan aduan, termasuk konsultasi dan pendampingan terkait sertifikasi dan perizinan untuk pelaku usaha. Untuk itu diperlukan pembiayaan transport petugas yang melakukan kegiatan pemberian layanan di Mall Pelayanan Publik tersebut.
- **Pengembangan Inovasi Berpendar**
Inovasi Berpendar adalah inovasi BBPOM di Yogyakarta dalam pendampingan UMKM yang berkolaborasi secara pentaheliks dengan lintas sektor di DIY. Di tahun 2023 inovasi ini telah mendapatkan penghargaan Top 99 KIPP 2023 dari Kemenpan RB.

Sebagai keberlanjutan inovasi di tahun 2024 telah dikembangkan menjadi Berpendar Masuk Desa (intervensi ke komunitas desa) dan Berperisa Bersama Pendampingan Kewirausahaan di Sekolah (intervensi ke komunitas sekolah).

Sebagai bentuk dukungan anggaran terhadap inovasi berpendar perlu dialokasikan anggaran konsumsi pertemuan dan transportasi peserta, juga akomodasi petugas dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pengembangan inovasi Berpendar.

- b. **Penerbitan keputusan / sertifikasi layanan public**
 - **Advokasi dalam rangka Perizinan dan Pendampingan UMKM di Bidang obat dan makanan**
Badan POM berkomitmen untuk mendukung percepatan dunia usaha dengan keberpihakan kepada UMKM melalui langkah-langkah strategis untuk mendorong UMKM pangan, obat tradisional, dan kosmetik agar bisa bertahan dan mampu lebih berdayang saing dengan segala perubahan yang ada.
Berbagai kementerian telah banyak melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap UMKM ini, namun agar lebih terkoordinir dan lebih berdaya ungkit, diperlukan sinergisme lintas Lembaga.



Oleh karena itu dibutuhkan pertemuan lintas sektor untuk sinergisme kegiatan khususnya dalam rangka pendampingan UMKM. Untuk pelaksanaan kegiatan dibutuhkan biaya paket meeting, honor narasumber, dan transport peserta advokasi.

- Desk Evaluasi dan Konsultasi Registrasi Obat dan Makanan Kegiatan ini berupa Desk Percepatan Evaluasi Registrasi dan konsultasi terkait pendaftaran pangan Olahan, obat tradisional, dan kosmetik yang bertujuan untuk mempercepat proses registrasi produk UMKM yang sedang didamping.

Kegiatan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan atau Direktorat Registrasi OT SK, dan Kosmetik berupa pelayanan prima dengan pembukaan loket pelayanan di Balai POM Yogyakarta.

Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi dan penyerahan tambahan data jika diperlukan langsung melakukan konsultasi kesesuaian tambahan data dengan petugas evaluator sehingga memberikan kemudahan pelaku usaha dalam mempercepat proses pendaftaran pangan.

Selain berkolaborasi dengan Pusat secara offline di Yogyakarta, dimungkinkan juga dilakukan secara mandiri oleh petugas Balai dengan dibantu petugas Pusat secara daring.

3. Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat Melalui KIE

a. Program komunikasi, edukasi dan informasi ke masyarakat

- Pemberian informasi kepada masyarakat secara langsung Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan pangan perlu dilakukan pemberian informasi dan sosialisasi secara langsung dengan mengumpulkan masyarakat. Sosialisasi dilakukan agar pemahaman atas peraturan-peraturan serta dampak negatif terhadap kesehatan jika mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi syarat, semakin meningkat.

Pelaksanaan kegiatan secara luring sesuai dengan masukan dari masyarakat, dimana mereka merasa lebih memahami materi jika dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung. Untuk layanan informasi juga dilakukan dengan partisipasi aktif BBPOM di Yogyakarta di 5 Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah terbentuk di Kabupaten Sleman, Kab Kulon Progo, Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, dengan materi layanan meliputi layanan informasi dan pengaduan serta

layanan sertifikasi untuk semua komoditas yang diawasi oleh BBPOM.

- Kegiatan Pameran

Pameran merupakan salah satu cara KIE kepada masyarakat dalam bentuk tatap muka langsung yang biasanya terkait adanya peringatan atau event tertentu baik secara internal dari Balai sendiri maupun eksternal dari lintas sektor terkait.

Materi kegiatan pameran berupa:

- 1) Pelayanan informasi (konsultasi) tentang keamanan produk dan tata cara sertifikasi produk Obat dan Makanan;
- 2) Penyebaran informasi produk obat, obat tradisional, makanan, kosmetik dan suplemen makanan melalui leaflet/brosur;
- 3) Penyampaian pesan-pesan keamanan produk obat, pangan, bahaya merokok dan lain-lain melalui poster, leaflet, banner
- 4) Penampilan contoh/sampel obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan yang tidak memenuhi syarat & memenuhi syarat;
- 5) Penampilan backdrop yang berisi informasi terkait keamanan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan.
- 6) Penayangan materi informasi melalui video
- 7) Permainan untuk menarik pengunjung berupa kuiz, sepak bola keamanan pangan, maze, ular tangga

- Operasional Mobil Laboratorium Keliling

Penyalahgunaan pemakaian zat kimia yang terkandung dalam pangan jajanan/siap saji sangatlah berbahaya. Masuknya zat berbahaya tersebut kedalam tubuh dalam jangka waktu yang lama tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh karena itu, untuk menjaga generasi muda bangsa Indonesia agar terhindar dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bahan kimia tersebut, maka dalam hal ini pemerintah berperan aktif untuk menindaklanjuti jajanan-jajanan yang beredar di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan POM dalam hal ini BBPOM di Yogyakarta, melakukan berbagai kegiatan terkait dengan perlindungan masyarakat dari pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa sasaran dikunjungi dengan menggunakan mobil laboratorium keliling untuk uji secara cepat, pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sasaran pengawasan



mobling yaitu pengadaan sampel terdiri dari sampel dari pasar tradisional, makanan takjil dan permintaan khusus apabila terdapat kegiatan yang memerlukan mobil laboratorium keliling. Penggunaan mobil laboratorium keliling juga digunakan untuk melaksanakan inovasi BBPOM dengan judul kegiatan BBPOM Menyapa (Melayani Tanpa Pamrih).

Penggabungan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan pengujian dengan layanan uji rapid tes kit secara gratis penggunaan bahan berbahaya bagi masyarakat yang akan mengujikan produk.
 - 2) Kegiatan KIE dengan layanan informasi dan pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - 3) Kegiatan sertifikasi dengan layanan perijinan produk bagi pelaku usaha yang akan mengurus registrasi produk.
- KIE dengan Tokoh Masyarakat
Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang obat dan makanan, dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat diharapkan mampu menciptakan budaya masyarakat yang peduli dalam mengkonsumsi obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang aman serta mandiri dalam memilih produk yang baik bagi kesehatan.
 - Pelaksanaan Kegiatan SAKA POM
Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan. Saka POM memberi wadah pendidikan dan pembinaan para Pramuka Penegak dan Pandega untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis sebagai generasi muda dalam bidang pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Untuk itu setelah rintisan Saka POM disahkan menjadi Saka POM, maka perlu adanya perekrutan anggota Saka POM yang dapat berupa kegiatan penyebaran informasi, juga dilakukan koordinasi dengan Kwarda dan Kwarcab kabupaten/ kota.
Selanjutnya perlu adanya kegiatan sebagai pelaksanaan 3 Krida Saka POM yaitu giat BPOM Menyapa. Perekrutan anggota Saka POM dan pelaksanaan 3 Krida Saka POM diperkuat dengan berperannya Saka POM pada Perkemahan Antar Saka (PeranSaka) yaitu pengiriman para anggota Saka POM dalam kegiatan yang diketuai oleh Kwarda.

- **Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik**
Penyelenggara pelayanan publik perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Kegiatan dalam bentuk pertemuan dengan mengundang lintas sektor terkait, pelaku usaha, media massa, tenaga ahli dari akademisi dan lembaga independent lain dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

4. Komunikasi publik terkait Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

a. Pelaksanaan publikasi obat dan makanan ke masyarakat Melalui Media Elektronik

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, instansi dan publik terhadap obat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan bahan berbahaya, maka diperlukan adanya suatu kegiatan penyebaran informasi berupa Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, instansi maupun publik dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat supaya selektif dalam memilih obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan yang bermutu dan aman.

KIE ini dapat dilakukan di media elektronik yaitu melalui:

- Talk show di televisi, berupa bincang-bincang ringan dalam acara khusus di TVRI lokal daerah berjudul Angkringan, dengan target masyarakat menengah ke bawah. Personil BBPOM di Yogyakarta sebagai bintang tamu dari cerita komidi pendek yang disajikan oleh Tim Angkringan.
- Videotron berupa penayangan iklan layanan masyarakat di jalan raya yang banyak dilewati masyarakat, untuk KIE terkait Obat dan Makanan
- Baliho berupa papan informasi berukuran besar yang dipasang di lokasi strategis untuk KIE terkait Obat dan Makanan

- Dialog Interaktif di radio, berupa talkshow dengan mengangkat topik tertentu yang sedang “trend” atau menjadi pembicaraan di masyarakat.
- Live repot berupa siaran langsung terhadap satu kegiatan tertentu yang sedang dilaksanakan oleh BBPOM Yogyakarta, dan dilakukan melalui media radio, agar masyarakat terpapar kegiatan yang dilakukan BBPOM.
- Pembuatan berita atau iklan layanan masyarakat di media cetak, kerjasama dengan media lokal untuk penayangan beberapa kegiatan ataupun informasi terkait dengan tupoksi Badan POM, agar dapat lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

5. Peningkatan kualitas pengujian obat dan makanan

a. Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Tujuan kegiatan ini untuk melakukan pengelolaan, pembahasan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025: 2017. Pengelolaan penerapan SNI ISO/IEC 17025: 2017 dilaksanakan oleh kelompok jaminan mutu yang terdiri dari personel pengujian dan wakil dari Bagian Tata Usaha yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta.

b. Kalibrasi Alat Laboratorium

Peralatan yang digunakan untuk pengujian yang mempunyai pengaruh signifikan pada validitas atau keabsahan hasil pengujian harus dikalibrasi sebelum digunakan, untuk memastikan bahwa semua peralatan tersebut sesuai dengan tujuan dan memberikan hasil yang dapat dipercaya. Kalibrasi peralatan instrumen sebagian besar dilaksanakan oleh tim kalibrasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) Badan POM RI, meliputi Timbangan, Spektrofotometer, Oven, Autoclav, Inkubator, Disolusi, pH meter, dll. Peralatan yang tidak dapat dikalibrasi PPOMN menggunakan jasa kalibrasi eksternal. Untuk kalibrasi alat gelas, mikro pipet, termometer, dan termohigrometer menggunakan jasa dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Dan kalibrasi alat seperti Biological Safety Cabinet, GC, HPLC dilakukan oleh agen alat tersebut.

- c. Pengembangan Baku Pembanding untuk Laboratorium Unggulan Balai Besar POM di Yogyakarta ditunjuk sebagai Laboratorium Unggulan Baku pembanding berdasarkan SK Kepala Badan POM no. HK.04.1.71.02.14.0931 tahun 2014. Pengembangan baku pembanding untuk laboratorium unggulan bertujuan membantu PPOMN untuk produksi Baku Pembanding Farmakope Indonesia dan Baku Pembanding Laboratorium, yang diperlukan pada pengujian obat, pangan, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dalam rangka pengawasan produk yang beredar di masyarakat yang menjadi tupoksi Badan POM. Kegiatan pengembangan baku pembanding memerlukan anggaran untuk pengadaan reagensia/alat fungsional/alat bantu uji, pengadaan bahan baku pembanding dan pengadaan baku pembanding primer/sekunder. Parameter uji pembuatan baku pembanding meliputi uji identifikasi, penetapan kadar air, susut pengeringan, penetapan pH, titik lebur, homogenitas dan uji kemurnian secara kromatografi cair kinerja tinggi / kromatografi gas/ spektrofotometri Uv-Vis. Uji kemurnian bahan baku pembanding dikolaborasikan dengan BBPOM di Bandar Lampung, Medan, Manado, Samarinda, Pontianak, dan Pekanbaru dengan tujuan untuk menjamin validitas dan kualitas baku pembanding yang dihasilkan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya pada pengujian di semua laboratorium di lingkungan Badan POM.
- d. Pengelolaan Laboratorium
Tahapan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah Belanja Barang persediaan barang konsumsi yang meliputi pengadaan glassware, reagen prekursor dan PPI, media mikrobiologi dengan masa pakai pendek, aquadest, aquabidest, gas laboratorium, fungsional laboratorium kimia dan mikrobiologi, pengadaan baku pembanding terkait regionalisasi, dan reagen/fungsional laboratorium/alat bantu uji sampel kasus/ pihak ketiga, test kit portable.
- e. Pengadaan Sarana Penunjang Laboratorium
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana penunjang laboratorium yang memadai. Diharapkan dengan pemenuhan kebutuhan ini, pengujian dapat dilakukan sesuai dengan pedoman sampling dalam rangka melakukan pengujian yang efektif dan efisien serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengujian. Pelaksanaan kegiatan pengujian dilaksanakan sejak bulan diterimanya sampel sampai dengan akhir tahun berjalan.



Kegiatan pengadaan sarana penunjang laboratorium meliputi pengadaan sarana penunjang laboratorium, pengadaan suku cadang dan pengadaan kolom KCKT.

f. Kinerja Alat Laboratorium

Laboratorium Balai Besar POM di Yogyakarta menggunakan bermacam-macam peralatan instrumen untuk dapat melakukan pengujian yang valid sesuai dengan produk yang beredar di pasaran dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Penggunaan masing-masing peralatan sesuai dengan jumlah sampelnya. Peralatan tersebut bisa tidak sesuai lagi dengan kinerja alat ketika masih baru sehingga diperlukan pemeliharaan berupa pembelian suku cadang dan perbaikan agar dapat memberikan hasil pengujian yang valid.

g. Uji Profisiensi / Kolaborasi dan Validasi / Verifikasi Metode Analisis

Uji profisiensi bertujuan untuk memantau unjuk kerja laboratorium dalam menetapkan nilai atau angka dari suatu bahan yang telah diketahui nilai benarnya (true value). Uji profisiensi berasal dari PPPOMN, instansi diluar Badan POM dan luar negeri (Thailand). Uji profisiensi selain dari PPPOMN dikenakan biaya pendaftaran. Pengiriman sampel uji profisiensi dari luar negeri dikenakan pajak bea cukai berupa biaya pengganti (Reimbursement Items) yang terdiri dari BM/PPN/PPH, Biaya bank, sewa gudang, dan Jasa Kena Pajak (Taxable Services) yang terdiri dari biaya penanganan, biaya dimuka, biaya administrasi, dan PPN (VAT) 10%. Uji profisiensi membutuhkan anggaran berupa pengadaan reagensia / media dan pengadaan alat fungsional / alat bantu uji. Pengembangan metode analisis untuk melaksanakan pengujian diselenggarakan oleh PPPOMN termasuk validasinya. Metode analisis yang akan diterbitkan harus diuji kolaborasikan ke Balai Besar/Balai POM untuk mengetahui unjuk kerja metode analisis di laboratorium yang berbeda. Sesuai persyaratan ISO/IEC 17025: 2017, metode yang dikembangkan atau diadopsi oleh laboratorium harus divalidasi, sedangkan metode baru yang akan digunakan harus diverifikasi, dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi optimal sesuai sumber daya yang ada dan memastikan pengujian dilakukan dengan benar serta memberikan hasil yang valid dan dapat dipercaya.

- h. Surveilans Akreditasi ISO 17025:2017
Untuk terus memelihara status akreditasi ISO 17025:2017 perlu dilakukan surveilans, agar jalannya pengujian di laboratorium dapat terus dijamin keabsahan hasil ujinya. Surveilans dilakukan minimal 2 kali selama periode sertifikat akreditasi, yaitu maksimal dilaksanakan 18 bulan setelah terbit sertifikat.
- i. Pemantauan Keamanan Pangan Tamu Negara
Untuk melindungi masyarakat terhadap pangan yang tidak aman dan tidak bermutu, maka Balai Besar POM di Yogyakarta melakukan tugas pengawasan terhadap pangan termasuk pangan yang disajikan kepada Tamu Negara yaitu untuk pejabat setingkat Presiden (RI I) dan Wakil Presiden (RI II). Dalam pengawasan ini bekerja sama dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kodam IV Diponegoro. Sampel yang diambil dilakukan uji secara organoleptik maupun test kit langsung di tempat yaitu uji arsen dan sianida. Apabila hasil tidak memenuhi syarat maka produk tersebut segera ditarik dan tidak boleh disajikan.
- j. Pengelolaan K3 dan Limbah
Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan limbah di laboratorium bertujuan untuk perlindungan agar terhindar dari paparan bahan kimia berbahaya dan bahan yang menimbulkan penyakit serta berpotensi menimbulkan bahaya fisik dan kesehatan seseorang. Anggaran pengelolaan K3 dan limbah meliputi: pengadaan container penampung limbah, pengadaan bahan K3 dan pengadaan pakaian kerja laboratorium. Limbah laboratorium yang dihasilkan dimusnahkan dengan menggunakan jasa pihak ketiga agar tidak mencemari lingkungan sekitar laboratorium. Pemusnahan limbah dilakukan 3 kali dalam setahun. Direncanakan juga untuk mengadakan pelatihan K3 dengan mengundang narasumber dari Damkar Yogyakarta, BMKG, PMI atau dari praktisi lain yang diikuti oleh seluruh personil laboratorium agar analisis laboratorium dapat mengantisipasi potensi bahaya kebakaran.
- k. Peningkatan Kompetensi Penguji
Bimtek Internal Pengujian bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seluruh analis Bidang Pengujian dalam melaksanakan tugasnya dan mendapatkan solusi terhadap permasalahan metode analisis baru. Pada tahapan ini laboratorium mengajukan permohonan instruktur ke PPPOMN atau praktisi akademisi lain.



Workshop sistem manajemen mutu dengan materi “Penjaminan Mutu Hasil Pengujian”, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi analis baru dan refreshmen bagi analis yang pernah mendapatkan materi tersebut, agar semua analis semakin paham akan pentingnya laboratorium memberikan jaminan bahwa hasil pengujian reliable dan valid sesuai klausul yang diatur pada ISO untuk diimplementasikan secara konsisten. Kemampuan ini harus terus menerus diperbaharui sesuai dengan perkembangan sistem manajemen mutu laboratorium dan teknologi. Kegiatan dilaksanakan diikuti oleh seluruh personil substansi pengujian, mengundang dari laboratorium jejaring DIY (BLKK dan Labkesda Sleman) dengan mengundang narasumber dari PPOMN untuk laboratorium Kimia dan Mikrobiologi.

6. Penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

- a. Penyelesaian perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di BBPOM di Yogyakarta
- b. Gelar kasus dan pelaporan
- c. Pembahasan rencana penyidikan, scenario penindakan dan olah TKP
- d. Operasional penindakan
- e. Penyelesaian berkas perkara
- f. Pengawasan, pengamatan, pemelitan dan pemeriksaaan (wasnalitrik)

7. Keamanan pangan di Desa, Sekolah, dan Pasar

- a. Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
 - Advokasi Lintas Sektor
Untuk mengintegrasikan program keamanan pangan kedalam program di lintas sektor perlu dilakukan pertemuan melalui kegiatan Advokasi untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi. Melalui pertemuan ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat melakukan kegiatan secara terpadu sehingga masyarakat mendapatkan intervensi keamanan pangan yang komprehensif yaitu intervensi dari sisi *supply* dan sisi *demand*. Komitmen, fasilitasi, dan koordinasi dari semua jajaran pemerintah diperlukan sehingga dapat lebih mendukung keberhasilan penjaminan keamanan pangan di sekolah secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dilaksanakan pertemuan lintas sektor dengan pihak terkait. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari secara luring untuk mempermudah komunikasi dan



pengenalan program secara fullday. Jumlah peserta dan petugas sebanyak 110 orang dan 2 narasumber. Program ini memerlukan keterlibatan lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya agar terlaksana secara terintegrasi dan holistik. Tujuan utama intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Tujuan kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS adalah untuk:

- 1) Mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah
 - 3) Memetakan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi
 - 4) Mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS
 - 5) Menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS
- **Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah**
Sosialisasi keamanan pangan sekolah merupakan kegiatan yang memperkenalkan tentang program Sekolah dengan peserta adalah sekolah sekolah yang akan diintervensi pada tahun selanjutnya.
Tujuan kegiatan adalah pengenalan program sebagai persiapan awal agar pada akhir program, output yang diharapkan dapat tercapai. Keluaran yang diharapkan dari program ini adalah:
 - 1) Tersosialisasikannya materi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah
 - 2) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan
 - **Kegiatan SAKA POM**
Saka Pramuka POM sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam



bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan dan mengembangkan profesi, kewirausahaan dan kerelawanan. Saka POM baru saja terbentuk oleh karena itu dilakukan orientasi calon anggota Saka POM dilaksanakan dengan metode yang menarik dan mengandung pendidikan baik dalam bentuk perkemahan, pembinaan di dalam ruangan maupun kegiatan di alam terbuka.

- **Intervensi Keamanan PJAS**

Paket Edukasi Keamanan PJAS Sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi komunitas sekolah dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di lingkungan sekolah maupun pangan jajanan yang berada di luar lingkungan sekolah.

Pangan yang beredar saat ini, termasuk pangan yang dijual di kantin sekolah dan atau di lingkungan sekolah, merupakan pangan yang dihasilkan oleh industri pangan, termasuk industri rumah tangga pangan (IRTP) dan pangan yang dihasilkan oleh jasa boga yang disebut pangan siap saji. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, tingkat pengetahuan dan kepedulian pengelola kantin sekolah dan penjual pangan yang ada di sekitar lingkungan sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pemberian Edukasi Keamanan Pangan paket materi edukasi yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Tujuan kegiatan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan adalah untuk:

- 1) Mensosialisasikan Informasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah.
- 2) Memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam membangun budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah

3) Merupakan bagian dari kegiatan pengawalan agar sekolah dapat melakukan program keamanan keamanan pangan secara berkelanjutan setelah dilakukan intervensi keamanan PJAS.

- **Bimtek Keamanan Pangan**

Bimtek keamanan pangan kantin sekolah dilaksanakan dengan mengundang perwakilan sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk dalam program intervensi. Peserta bimtek yang dilibatkan dari sekolah yaitu komunitas sekolah (guru, pengelola kantin/penjual PJAS, murid), sedangkan dari lintas sektor adalah petugas sanitarian dari masing-masing Puskesmas, pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Dalam kegiatan ini juga akan dibentuk fasilitator keamanan pangan sekolah. Diharapkan mereka dapat mensosialisasikan dan mengembangkan kembali program keamanan pangan di sekolah masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan. Bimtek dilaksanakan dengan materi terkait keamanan pangan dan dorongan untuk mendirikan kantin sekolah.

- **Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah**
Penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, menjadi prioritas utama dalam program PJAS aman. Sasaran utama penyesuaian strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah serta menggalang komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah untuk memastikan agar pangan jajanan anak usia sekolah terjamin keamanannya. Pemberdayaan Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Sehubungan hal tersebut, untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah tersebut perlu dilakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan setelah



sebelumnya sekolah melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Output dari *self assessment* dapat digunakan oleh Balai Besar/Balai POM sebagai gambaran kesiapan sekolah dalam pelaksanaan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman. D. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan kader keamanan pangan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan lagi bahwa telah dilakukan Program Keamanan Pangan Sekolah dan mendokumentasikan pelaksanaan semua kegiatan keamanan pangan sekolah. Selain dilakukan pembagian sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman juga pendalaman komitmen bahwa akan melanjutkan program setelah intervensi berakhir.

- **Pengawasan Sekolah dengan PJAS Aman**
Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa. Intervensi PJAS ini merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas sekolah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah yang dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Intervensi PJAS dilakukan untuk membentuk Sekolah dengan PJAS aman. Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (Kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orangtua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan.
Pada tahun 2025 memulai tahapan baru, pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap sekolah yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program. Kegiatan pengawasan dilakukan di masing-masing sekolah yang telah diintervensi.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- 1) Memastikan bahwa Sekolah yang diintervensi telah melaksanakan program keamanan PJAS secara berkelanjutan.
 - 2) Mengetahui tindak lanjut dari rencana program keamanan pangan yang disusun oleh Tim Keamanan Pangan Sekolah.
 - 3) Menjaga kompetensi Kader Keamanan Pangan Sekolah yang telah dilatih
 - 4) Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di sekolah yang diintervensi dalam menjaga keamanan pangan dan memberikan saran untuk penuntasan masalah tersebut
- Pengimbasan Kegiatan Keamanan Pangan Sekolah Kegiatan pengimbasan keamanan pangan sekolah ini bertujuan agar pihak sekolah yang sudah pernah juara penerapan program Sekolah dengan PJAS aman dan mendapatkan penghargaan dapat mengimbaskan ke sekolah lain yang belum pernah diintervensi BBPOM.
 - Lomba Sekolah PJAS Aman
Sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait hal tersebut diperlukan upaya yang menyentuh strata perdesaan untuk memperkuat kemandirian komunitas di bidang keamanan pangan melalui Program Desa Pangan Aman. Program Sekolah dengan PJAS Aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan jajanan yang aman kepada anak didiknya. Untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas sekolah dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan di sekolah, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada sekolah yang dapat mewujudkan Sekolah dengan PJAS Aman.
Kegiatan lomba berupa pembahasan persiapan serta verifikasi lomba jika masuk dalam salah satu nominasi. Lomba dilakukan untuk tingkat SD, SMP dan SMA.

b. Perkuatan kapasitas desa pangan aman

- Advokasi Kelembagaan Desa

Permasalahan keamanan pangan atau potensi risiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga upaya agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Pembangunan keamanan pangan dapat dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka melanjutkan program Desa Pangan Aman, sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri melalui intervensi pengawasan keamanan pangan. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena akan melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan, tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan.

Agar program desa pangan aman dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan komitmen, fasilitasi dan koordinasi dari semua jajaran Pemerintahan, termasuk yang ada di desa/kelurahan terpilih sehingga dapat lebih mendukung berkembangnya awareness keamanan pangan desa secara berkelanjutan.

- Pemberdayaan Komunitas Desa

Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Kader Keamanan Pangan Desa merupakan Sumber Daya Manusia yang bertugas menjadi agen keamanan pangan desa. Pelatihan korlap dan Kader Keamanan Pangan Desa bertujuan untuk mencetak korlap dan Kader Keamanan Pangan Desa yang akan bertugas dalam melakukan bimtek keamanan pangan untuk masyarakat dan usaha pangan desa, sebagai pembina keamanan pangan di desanya, dan berperan sebagai “contact person” & “key person” dalam permasalahan Keamanan Pangan di desa. Pelatihan dilakukan terhadap calon Kader Keamanan Pangan Desa yang merupakan perwakilan dari 4 desa intervensi baru dan lintas sektor terkait.

c. Bimtek Komunitas Desa

Bimtek kepada komunitas di 4 desa berupa Bimtek Keamanan Pangan untuk masyarakat yang bertujuan untuk melatih dan memandirikan masyarakat desa di bidang keamanan pangan. Bimtek dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa yang sudah mendapatkan pelatihan dari Balai Besar POM di Yogyakarta dengan didampingi narasumber dari BBPOM di Yogyakarta. Untuk tiap desa, komunitas yang akan dilatih sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari ibu hamil/ibu dengan balita/ibu rumah tangga, Remaja Putra-Putri, Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pelaku Usaha Retail dan Komunitas Sekolah.

Pengelompokan terdiri dari:

- IRTP dan Pangan Siap Saji/PKL dengan narasumber dari petugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas, kegiatan ini dikolaborasikan dengan pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP.
- Komunitas Sekolah dan Ritel dengan narasumber dari Kader Sekolah dan Kader Masyarakat.
- Komunitas Ibu Rumah Tangga dan Remaja dengan narasumber dari kader Keluarga dan kader Masyarakat.

d. Sosialisasi Keamanan Pangan Sesuai PUG

Badan POM menginisiasi program Desa Pangan Aman sejak tahun 2014 dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, sekaligus memperkuat ekonomi desa, Pelaksanaan program desa pangan aman mengacu pada Petunjuk Teknis Desa Pangan Aman untuk Balai Besar/Balai/Loka POM tahun 2020. Sasaran kegiatan adalah komunitas/masyarakat yang ada di desa intervensi. Petunjuk Teknis Desa Pangan Aman untuk Balai Besar/Balai/Loka POM tahun 2020 belum mengatur tentang isu gender. Peserta Bimtek Komunitas Desa telah ditentukan yaitu ibu rumah tangga, remaja (putra & putri), sekolah, ritel, pelaku usaha siap saji dan pelaku usaha pangan olahan. Oleh karena kriteria peserta memiliki kecenderungan dari gender wanita, maka jumlah peserta Bimtek Komunitas sebagian besar adalah wanita. Prosentase peserta laki-laki dan perempuan tahun 2023 adalah 16%:84% sehingga ditambahkan kegiatan Bimtek Komunitas mandiri di luar tahapan yang telah ditentukan, dengan kriteria peserta harus dari gender laki-laki.



Kegiatan ini meningkatkan jumlah laki-laki yang terpapar materi keamanan pangan dengan prosentase menjadi 47%:53%. Sedangkan data di tahun 2024, untuk prosentase data awal 13%:87% dan setelah dilakukan penambahan kegiatan Bimtek Komunitas dengan gender laki-laki menjadi 49%:51%. Pada tahun 2025 kegiatan serupa akan terus dilaksanakan pangan yang mengkhususkan pada peserta laki-laki di desa yang diintervensi. Narasumber dari kader keamanan pangan yang telah dilatih dan dilakukan di desa intervensi dengan materi terkait Keamanan Pangan dan Stunting. Kegiatan ini sebagai wujud dari penerapan pengarusutamaan gender di lingkungan BBPOM di Yogyakarta

e. Fasilitasi Ijin Edar bagi Komunitas IRTP

Salah satu komunitas yang menjadi target kegiatan Desa Pangan Aman adalah komunitas pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP). Komunitas ini menjadi penting karena mereka memproduksi pangan yang diedarkan ke masyarakat sehingga perlu pengetahuan yang lebih baik dan perlu didorong untuk bisa mendapatkan ijin edar P-IRT. Sebagai langkah kolaborasi dengan pemerintah desa dan Dinas Kesehatan, komunitas IRTP diberi fasilitasi untuk memperoleh ijin edar. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan DPMPTSP selaku instansi yang berwenang menerbitkan NIB. Pelaku usaha difasilitasi untuk mendapatkan nomor NIB dan dilanjutkan untuk mendapatkan nomor P-IRT, sehingga output dari kegiatan Desa Pangan Aman akan bertambah dengan terbitnya ijin edar bagi komunitas desa IRTP. Kegiatan ini dilakukan sebelum pelaksanaan Bimtek Komunitas, sehingga pada saat Bimtek Komunitas sekaligus sebagai pemenuhan komitmen pelaksanaan penyuluhan kepada IRTP baru.

f. Fasilitasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Desa

Permasalahan keamanan pangan atau potensi risiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga upaya agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Pembangunan keamanan pangan dapat dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk memberdayakan komunitas desa salah satunya dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis guna



membekali pengetahuan mengenai keamanan pangan agar komunitas tersebut dapat mengimplementasikan keamanan pangan dilingkungannya. Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan harus diikuti dengan kegiatan fasilitasi keamanan pangan kepada komunitas desa berupa kunjungan langsung ke sarana. Hal tersebut bertujuan untuk memasyarakatkan praktek keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari.

Briefing pengisian form fasilitasi dilanjutkan ke sarana untuk menilai penerapan praktek keamanan pangan.

Fasilitasi II: Dilakukan 1-2 bulan setelah fasilitasi I untuk melihat perbaikan yang telah dilakukan dan penerapan praktek keamanan pangan. Untuk itu, pendampingan ini penting dilakukan guna memastikan praktek keamanan pangan sudah tepat dilakukan oleh komunitas tersebut. Kegiatan fasilitasi keamanan pangan perlu dilakukan bagi komunitas desa dan usaha pangan agar desa menjadi mandiri dan mampu mencegah serta menangani permasalahan keamanan pangan yang ada di lingkungannya.

g. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan

Komitmen dari Badan POM dalam meningkatkan produk pangan yang aman dan terjamin keamanannya bagi komunitas desa juga diwujudkan dalam kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan di Desa. Kegiatan ini mencakup pengoperasian mobil laboratorium keliling, pengadaan rapid test kit dan sampel pangan untuk memantau produk pangan yang beredar di desa yang terpilih. Sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dilakukan uji tes kit dengan lokasi menyebar di seluruh desa meliputi sekolah, sarana produksi, warung dan toko yang menjadi komunitas, yang akan diberikan bimbingan teknis.

Produk pangan yang diutamakan disampling produk PIRT yang berasal dari IRTP di Desa target, pangan siap saji. Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dapat disampling dan diuji untuk ditindaklanjuti.

Parameter pengujian antara lain: cemaran kimia berbahaya (bahan berbahaya) serta kesesuaian label pangan olahan sebagaimana tercantum dalam PP 69 Tahun 1999 dan Perka BPOM Nomor 31 Tahun 2018. Intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui kegiatan mobling dilakukan 2 tahap, yaitu sebelum (pre) dan sesudah (post) intervensi keamanan pangan. Sampel yang diambil saat pre dan post intervensi adalah jenis sampel yang sama dan



berasal dari sumber yang sama (namun dapat disesuaikan dengan kondisi di desa). Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan bimtek komunitas (untuk pre intervensi) dan Monitoring dan Evaluasi/ pengambilan data post intervensi. Hasil evaluasi dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dapat dilaporkan ke pusat melalui aplikasi Desa Pangan Aman dengan alamat gkpd.pom.go.id paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

h. **Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Monitoring diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- Melihat proses maupun kemajuan pelaksanaan program
- Mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program
- Mengukur capaian target yang telah ditetapkan
- Memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program lanjutan.

Penyelenggaraan kegiatan ini meliputi biaya penyelenggaraan pertemuan dengan lintas sektor secara dari desa intervensi.

Pada pertemuan ini selain dilakukan monitoring juga pembahasan untuk keberlangsungan program di tahun berikutnya, dengan menggunakan dana desa secara mandiri. Masing-masing Lurah atau Kepala Desa diwajibkan memaparkan rencana kegiatan yang akan dilakukan di tahun berikutnya saat intervensi dari BBPOM di Yogyakarta sudah berakhir.

Pada sesi diskusi dilakukan tanya jawab sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir termasuk pembahasan kendala yang dihadapi oleh para kader maupun dari Tim Keamanan Pangan Desa dan lintas sektor terkait dalam ini Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

- i. Pengawasan Desa Intervensi Keamanan Pangan Tahun Sebelumnya
Desa Pangan Aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa yang sudah diintervensi.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- Memastikan bahwa desa yang diintervensi melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.
- Mengetahui tindak lanjut dari rencana program keamanan pangan yang disusun oleh desa.
- Menjaga kompetensi Kader Keamanan Pangan Desa yang telah dilatih.
- Mengidentifikasi permasalahan di desa dalam menjaga keamanan pangan dan memberikan saran untuk penuntasan masalah tersebut.

- j. Lomba Desa Pangan Aman

Sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut diperlukan upaya yang menyentuh strata perdesaan untuk memperkuat kemandirian komunitas di bidang keamanan pangan melalui Program Desa Pangan Aman. Program Desa Pangan Aman (PAMAN) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa PAMAN, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa PAMAN. Untuk desa yang telah masuk nominasi dilakukan persiapan verifikasi lomba desa oleh Tim Juri dari Badan POM

k. Pasar pangan aman berbasis komunitas

- Penyuluhan Pedagang Pasar

Keberhasilan program pilot project pasar pangan aman berbasis komunitas yang telah dilaksanakan oleh Badan POM tidak bisa lepas dari peran serta komunitas pasar.

Untuk itu komunitas pasar perlu diberdayakan dengan cara penyuluhan untuk meningkatkan kepedulian komunitas pasar terhadap peredaran bahan berbahaya di pasar. Penyuluhan dilakukan terhadap para pedagang pasar yang berjualan pangan baik berupa pangan olahan maupun pangan segar (ikan dan ayam) dan memiliki potensi mengandung bahan berbahaya.

Dilaksanakan 1 kali di pasar intervensi. Diharapkan dengan bertambahnya ilmu tentang keamanan pangan, para pedagang dapat memilih dan memilah produk pangan yang akan dijual sehingga tidak merugikan konsumen yang membeli.

- Pelatihan Fasilitator dan Bimtek Petugas

Pengelola Pasar Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Pada tahun 2025, dalam rangka persiapan alih kelola program pasar pangan aman berbasis komunitas kepada pemerintah daerah serta terjaminnya keberlanjutan program tersebut di masa mendatang, maka BPOM melakukan pelatihan fasilitator pasar. Pelatihan ini diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota secara mandiri dapat melakukan replikasi pasar pangan aman untuk seluruh pasar di wilayahnya, dan menyediakan sumber daya yang cukup untuk menjaga keberlangsungan program pasar pangan aman. Peserta akan diberi materi tentang Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta diberi ketrampilan untuk melakukan sampling dengan mampu mendeteksi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, serta uji dengan tes kit.

- Bimtek Petugas Pengelola Pasar

Kegiatan dilaksanakan di pasar pengawalan oleh petugas BBPOM di Yogyakarta yang terdiri 3 (tiga) orang dengan

mengundang 25 orang pengelola/petugas pasar dan/atau anggota paguyuban/komunitas pedagang. Pertemuan dilaksanakan di aula atau ruangan yang tersedia di pasar. Materi yang diberikan berupa pengenalan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, cara pengambilan contoh, pengujian menggunakan test kit, serta pelaporan hasil sampling dan pengujian, sesuai modul “Pengujian Cepat Identifikasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya” disertai dengan materi KIE yaitu Cek KLIK, Call Center Halo BPOM/ULPK, dan 5 Kunci Keamanan Pangan di Sarana Peredaran (diunduh di <https://sites.google.com/view/ppabk>).

- **Kampanye Keamanan Pangan di Pasar**
Sejalan dengan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, perlu dilakukan sosialisasi terhadap komunitas pedagang di pasar intervensi. Kegiatan berupa Kampanye di pasar yang baru diintervensi, dengan sasaran pedagang pasar dan pengunjung pasar. Petugas BBPOM di Yogyakarta dapat membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti media informasi berupa leaflet, dan poster tentang Keamanan Pangan. Petugas BBPOM di Yogyakarta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat dengan melakukan pengujian cepat terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, pemberian kit edukasi kepada pengunjung. Kemudian dilakukan pengukuran survei partisipatif masyarakat sesuai format (diunduh di <https://sites.google.com/view/ppabk>), bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan keamanan pangan dan partisipatif masyarakat oleh petugas yang melakukan kegiatan KIE dan menyertakan hasilnya ke dalam laporan pelaksanaan.
- **Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Implementasi Pasar Pangan Aman**
Untuk mengevaluasi efektifitas Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 2 tahap. Tahap pertama (April-Mei) berupa sampling dan uji serta pelaporan oleh tim sampling yang telah dibentuk di masing-masing pasar. Hasil uji yang tidak memenuhi syarat akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan pemberian informasi kepada pedagang.

- **Penghargaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**
Penghargaan pasar diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi bagi pasar dan pemerintah daerah yang telah mendukung Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Pasar terpilih dari masing-masing Balai diajukan ke Badan POM berdasarkan proposal yang telah disusun. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh petugas Balai untuk memastikan bahwa kondisi pasar telah siap untuk diajukan penilaian di Badan POM.

8. Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar

- a. **Pendampingan sarana produksi UMKM untuk pemenuhan GMP**
Setelah mengikuti Fasilitasi, pelaku UMK akan didampingi secara intensif oleh petugas UPT BPOM. Waktu tahapan Fasilitasi dilakukan minimal selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, atau disesuaikan dengan kondisi kesiapan UMKM pangan yang menjadi binaan. Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen mutu (panduan/manual mutu, prosedur/SOP, formulir, dll), implementasi dokumen mutu, saran perbaikan terhadap sarana prasarana dan lain-lain. Setiap bulan petugas Pendamping dari UPT BPOM mengunjungi sarana minimal 3 (tiga) kali (atau sesuai kebutuhan) dan bersama pelaku UMKM mendesain GMP yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana dan bisnis proses produksinya.
- b. **Bimbingan teknis dan pendampingan UMKM dalam rangka GMP dan NIE**
Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan obat dan makanan, baik dalam hal penerapan GMP dan legalitas produk, dibutuhkan pendampingan pelaku usaha berupa pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, coaching klinik, desk pendampingan, dsb. Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk pengawalan indikator kegiatan indeks kepuasan pelaku usaha obat dan makanan terhadap bimbingan dan pengawasan obat dan makanan.
- c. **Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMKM Obat dan Makanan**
Dalam rangka evaluasi kegiatan pendampingan UMKM produsen obat dan makanan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan juga pelaksanaan perbaikan berkelanjutan sehingga dapat terus ditingkatkan dalam pelaksanaan pendampingan UMKM.

9. Pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta
Pengawasan ini dilakukan oleh balai Besar POM di Yogyakarta mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar.

a. Pengadaan dan pengujian sampel sediaan farmasi, pangan olahan, pangan fortifikasi

1) Pengujian Laboratorium Sampel Sediaan farmasi, pangan olahan dan fortifikasi

Balai Besar POM melakukan pengawasan terhadap pangan sehingga produk yang beredar terjamin aman, bermanfaat dan bermutu. Salah satu kegiatan yang dapat menjamin mutu produk tersebut pasca pemasaran adalah melalui sampling dan pengujian pangan. Badan POM menyusun melakukan penyusunan perencanaan sampling berdasarkan prioritas sampling dari Badan POM yang disusun berdasarkan Analisa risiko dan berdasarkan data evaluasi tahun sebelumnya.

Hal ini untuk mencapai keberhasilan sasaran pengawasan sehingga kegiatan sampling dan pengujian berdaya guna dan berhasil guna. Pengujian dilakukan dengan parameter pengujian yang mengacu kepada standar yang berlaku seperti Standar Nasional Indonesia, Kodek Makanan. Produk yang disampling berdasarkan Pedoman Prioritas Sampling yang diterbitkan oleh Badan POM yang disusun berdasarkan Analisa risiko dan trend hasil pengawasan, kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah pangan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Parameter pengujian yang disusun menjadi acuan dalam melakukan pengujian terhadap produk yang disampling.

Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk yang tidak memenuhi syarat dan digunakan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya Dan Juga terdapat penambahan besarnya pembelian reagen dan media untuk pengujian

2) Pengadaan sampel Obat dan Makanan

Sampling adalah proses seleksi bagian atau unit yang mewakili suatu populasi sedemikian sehingga data dan atau informasi yang didapat dari bagian itu adalah data dan informasi yang valid mengenai populasi tersebut. Sampling atau pengambilan contoh



merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara analisa risiko dimana memperhatikan efisiensi biaya namun mampu menjamin produk pangan yang beredar tidak membahayakan kepada kesehatan masyarakat. Pengawasan ini dalam rangka perlindungan masyarakat terhadap penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat, produk yang tanpa izin edar, produk rusak, produk palsu dan produk yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan terhadap produk pangan dengan melakukan sampling dan pengujian sampel dimaksudkan untuk menjamin konsistensi mutu produk yang beredar sesuai dengan spesifikasi dan standard mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan post market dilakukan dengan sampling dan pengujian terhadap produk di sarana distribusi dan sarana produksi

3) Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Iklan dan Label merupakan salah satu media untuk memperkenalkan dan mempromosikan produknya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan penjualan. Ketentuan untuk iklan dan penandanaan, harus sesuai dengan klaim yang disetujui pada waktu pendaftaran produk tersebut yaitu obyektif, lengkap, tidak menyesatkan dan mendidik. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi dan mengevaluasi iklan dan promosi di: i) media cetak, ii) media elektronik, dan iii) media luar ruang. Selanjutnya, hasil kegiatan tersebut dilaporkan ke Badan POM untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut.

4) Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan

Mengoptimalkan kinerja UPT BPOM dalam pelaksanaan sampling dan rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam pengujian berdasarkan kerangka sampling yang telah ditetapkan sehingga mampu menjaring obat tidak memenuhi syarat di peredaran dengan cakupan yang lebih luas dan Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unit pusat dan UPT BPOM dalam manajemen sampling dan pengujian Obat dan Makanan.

10. Pengawasan produksi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

- a. Inspeksi sarana produksi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan CPOB



Inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan/ Sarana UMKM Sarana Produksi yang menjadi target pengawasan BBPOM Yogyakarta sarana fasilitas Bersama Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), sarana Pangan MD dan Industri Kosmetik. Sarana Produksi Obat dan Makanan harus menerapkan Cara Produksi yang Baik. Badan POM bertanggungjawab dalam pemastian keamanan, manfaat/ efikasi dan mutu obat yang beredar. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan dengan produk yang dapat diproduksi sesuai peraturan Badan POM juga menjadi target pengawasan sarana produksi pangan. Pengawasan untuk pemastian produk pangan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan mempunyai kewajiban dalam memproduksi harus selalu menerapkan Cara Produksi pangan Yang Baik - IRTP (CPPB-IRTP) terutama sanitasi & hygiene. Hasil pemeriksaan baik terhadap IRTP dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sebagai pemberi ijin dengan tembusan kepada Badan POM.

b. Inspeksi CPOB dan Peer Inspection dalam rangka kualifikasi Inspektur CPOB

Pemeriksaan rutin sarana Industri Farmasi di wilayah Yogyakarta dilakukan untuk pemastian penerapan Cara Produksi Obat yang Baik yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Peer Inspection untuk menjaga kompetensi dan meningkatkan kemampuan inspektur CPOB, dengan melakukan kegiatan inspeksi bersama dengan petugas dari BB/BPOM ataupun dari Badan POM. Peer Inspection dilakukan untuk menjaga kompetensi inspektur CPOB sebagai pemenuhan persyaratan PIC'S.

c. Pendampingan Pemenuhan CPOB Unit Transfusi Darah.

Kegiatan ini merupakan kegiatan asistensi yang lakukan berupa kegiatan pendampingan bagi UTD untuk pemenuhan standar sertifikasi CPOB bagi Unit Transfusi Darah di DIY dilakukan pendampingan secara onsite dan juga untuk asistensi CAPA yang dibuat. Pelaksanaan kegiatan Bersama dengan Badan POM.

d. Pemeriksaan sarana fortifikasi

Inspeksi sarana produksi Masih banyak ditemukannya produk pangan fortifikasi yang masih tidak memenuhi syarat, diperlukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi untuk memastikan bahwa produk pangan yang diproduksi memenuhi persyaratan.

Pemeriksaan sarana juga difungsikan untuk membantu produsen agar dapat memproduksi pangan fortifikasi yang sesuai persyaratan pemerintah

Pengadaan sampel Sampling atau pengambilan contoh merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara analisa risiko dimana memperhatikan efisiensi biaya namun mampu menjamin produk pangan yang beredar tidak membahayakan kepada kesehatan masyarakat.

Sampling dilakukan pada jenis pangan yang telah ditetapkan pada prioritas sampling dari Badan POM untuk melihat pemenuhan standar fortifikasi yang ditetapkan. Untuk lokasi tempat sampling juga sudah ditentukan.

11. Pengawasan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

a. Pemeriksaan Sarana Distribusi Dan Pelayanan Kefarmasian

Banyaknya kasus penyalahgunaan obat dan penyaluran pada sarana-sarana tidak resmi yang berpotensi terjadinya diversifikasi bahan obat atau obat jadi sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan CDOB atau Standar Pelayanan Kefarmasian dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pengawasan ini juga untuk memastikan tidak adanya potensi masuknya produk-produk obat yang berisiko terhadap Kesehatan masyarakat, seperti obat-obat palsu, substandard, kedaluarsa dan produk tanpa izin edar. Juga memastikan tidak adanya *supply* dari sarana resmi kepada sarana-sarana yang tidak berijin.

Pemilihan sarana berdasarkan risk base dan track record sarana, kemudian susun renlak tahunan yang dilakukan monev secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi akan dikaji dan dievaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan.

b. Pengawasan Sarana Distribusi OT, Kosmetika, SK dan Pangan

Banyaknya pengaduan dan kasus ditemukannya produk yang belum memiliki izin edar dan produk yang mengandung bahan berbahaya pada produk obat dan makanan di sarana distribusi sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan *Good Distribution Practices* dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.



Pengawasan ini juga untuk memastikan pelaku usaha berkomitmen memberikan jaminan keamanan produk obat dan makanan yang didistribusikan. Pemilihan sarana berdasarkan risk base dan track record sarana, kemudian susun renlak tahunan yang dilakukan monev secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi akan dikaji dan dievaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan.

c. Intensifikasi dan Penertiban/Penanganan Tindak Lanjut Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan ini inspeksi komprehensif sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat. Kegiatan pengawasan ini juga sebagai *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM atau BB/BPOM/Loka BPOM. Kegiatan penertiban bertujuan untuk menjamin agar produk yang beredar di masyarakat terjamin keamanannya.

Tindak lanjut dapat berupa *feedback* atau pemeriksaan sarana yang tidak memenuhi ketentuan, temuan adanya hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat, pengawasan iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Melingkupi kegiatan pengawasan Saat-saat perayaan keagamaan seperti hari raya idul fitri, perayaan natal dan tahun baru, saat itu terjadi peningkatan permintaan (demand) ketersediaan pangan oleh konsumen.

Dari sisi *supply* hal ini merupakan peluang bagi kalangan pelaku usaha untuk meraup sejumlah keuntungan dengan menyediakan pangan dalam jumlah besar. Berdasarkan pertimbangan peningkatan dalam jumlah besar produk pangan yang beredar, maka diperlukan pengawasan khusus ke sarana distribusi. Pengawasan dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pengelola Pasar dengan target di swalayan, grosir dan toko untuk pelaku usaha tidak menjual produk rusak/ED, cacat kemasan atau hampir kadaluwarsa.

d. Audiensi/Koordinasi Permasalahan Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan berupa perjalanan Dinas Ke Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk advokasi/asistensi regulatori kepada pemerintah daerah. Pada tahun 2025 agenda yang direncanakan adalah kegiatan pembinaan kepada sarana produksi garam beriodium kaitannya dengan peran BPOM dalam penanggulangan stunting, monev realisasi anggaran dan kegiatan DAK NF tahun 2025. Permasalahan hasil pengawasan obat dan makanan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah.

- e. **Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan dengan Lintas Sektor**
Merupakan pertemuan Bersama lintas sector dan Lembaga profesi untuk bersinergi untuk meningkatkan kualitas pengawasan berdasarkan kewenangan masing-masing. Kegiatan dilakukan untuk tujuan perencanaan kegiatan yang beririsan dengan kegiatan lintas sector lainnya. Rapat moneyv juga diselenggarakan pada akhir tahun sebagai pemaparan capaian target pengawasan BPOM Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah.
- f. **Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha**
Kegiatan berupa bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi yang merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha Produksi/Distribusi. Untuk materi berdasarkan kebutuhan dari pelaku usaha atau lintas sektor untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di Yogyakarta
- g. **Penguatan Aksi dan Strategi penanganan OBA mengandung BKO melalui Program KSATRIA**
Kegiatan berupa penguatan keterlibatan pemangku kepentingan melalui aksi yang serentak dan bersama melalui penguatan aksi dan strategi penanganan pemberantasan Obat Bahan Alam (OBA) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), melalui penyusunan strategi pengawasan OBA BKO melalui Penguatan kemampuan petugas BPOM dalam penelusuran OBA BKO hulu hilir dan pendekatan kajian sosio budaya, ekonomi dan hukum.
- h. **Bimbingan Teknis Pengawasan Pangan Fortifikasi**
Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan bertujuan memberikan pemenuhan kompetensi baik pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada para pengawas pangan terutama kaitannya dengan pengawasan pangan fortifikasi. Selain itu refreshing/updating knowledge, persamaan persepsi, dan pertukaran informasi/pengalaman pengawasan bagi Pengawas Pangan yang hadir sehingga pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi di Indonesia dapat seragam, sinergis dan saling mendukung sehingga mensukseskan program pengentasan stunting di Indonesia.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Yogyakarta.

1. Layanan BMN

Output pengelolaan BMN yang salah satunya adalah Laporan BMN yang dihasilkan oleh Satker Wilayah akan turut serta mempengaruhi opini dari auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Layanan Perkantoran

a. Gaji dan tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan mencakup 102 (seratus dua) orang pegawai ASN dan 10 (sepuluh) orang PPPK untuk 12 bulan gaji termasuk pembayaran 1 bulan layanan gaji ke 13 PNS dan gaji ke 14 PNS. Sedangkan tunjangan kinerja untuk Tahun 2025 untuk pagu anggaran dikelola oleh Kesestamaan Badan POM.

b. Operasional Perkantoran

1) Perjalanan Koordinasi Pimpinan

Perjalanan dalam rangka koordinasi Pimpinan dengan lintas sekor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, dan juga apabila dalam rangka koordinasi dengan Badan POM. Serta dalam rangka mengikuti pertemuan Nasional yang diadakan oleh pusat Badan POM baik kegiatan terpadu atau kegiatan yang memerlukan diundangnya Kepala Balai.

2) Pengadaan Pembasmi Hama

Untuk mengurangi adanya hama baik lalat, kecoa, tikus perlu adanya penanganan secara intensif, sehingga perlu adanya pihak ketiga untuk menangani hama tersebut. Dan juga dalam rangka pengendalian adanya rayap yang sudah mulai menyebar di beberapa tempat sehingga perlu penanganan secara khusus, sehingga dianggarkan untuk pengadaan pembasmi rayap.

3) Pengadaan Pakaian Kerja

Penyediaan pakaian kerja ini dimaksudkan untuk menjaga kerapian serta memberikan identitas pegawai BBPOM di Yogyakarta sehingga menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai tanggungjawab masing-masing yang telah diberikan.

4) Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor dilakukan sebagai upaya pemeliharaan rutin terhadap bangunan negara sesuai kriteria



kementerian PU. Perawatan dilakukan untuk mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap pada kondisi semula dengan tingkat perbaikan sampai dengan 2 % sesuai kriteria dalam Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. Dilakukan juga pemeliharaan halaman. Kegiatan perbaikan gedung kantor akan dilaksanakan dalam beberapa tahap terhadap perbaikan gedung kantor/ laboratorium dan halaman kantor.

- 5) Pemeliharaan Peralatan Kantor
Perbaikan peralatan kantor yang akan dilaksanakan meliputi pemeliharaan peralatan laboratorium, alat pengolah data, studio komunikasi dan perangkat sistem informasi, pemeliharaan komputer, pemeliharaan printer, pemeliharaan mesin foto copy serta pemeliharaan antivirus. Seluruh kegiatan perbaikan peralatan kantor tersebut sangat diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tupoksi di seluruh lini substansi/bagian di BBPOM di Yogyakarta.
- 6) Pengadaan Keperluan Pokok Perkantoran
Keperluan pokok sehari-hari perkantoran merupakan kegiatan yang rutin dilakukan dalam penyelenggaraan operasional kantor dan memenuhi kebutuhan rutin tiap pegawai. Dalam rangka operasional kantor meliputi untuk mencukupi kebutuhan barang cetak, alat rumah tangga, langganan majalah dll. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai dalam hal ini termasuk penyediaan alat tulis, barang habis pakai lainnya dan termasuk penyediaan air minum pegawai. Digunakan juga untuk pemenuhan pelayanan terhadap tamu yang datang/ berkunjung di BBPOM di Yogyakarta. Diperlukan juga pemenuhan peralatan dan mesin sarana prasarana perkantoran untuk barang yang masuk ke akun Ekstrakomptabel seperti pengadaan kursi, almari, dispenser.
- 7) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4
Perawatan kendaraan bermotor roda 4 dilaksanakan untuk 12 bulan sebanyak 11 unit kendaraan operasional yang ada termasuk 3 unit kendaraan laboratorium keliling. Biaya perawatan kendaraan dinas ini meliputi keperluan operasional bahan bakar, service berkala, sampai dengan perpanjangan surat-surat kendaraan dan segala tindakan perbaikan yang

diperlukan untuk kendaraan tersebut supaya dapat beroperasi dengan kondisi baik.

8) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2

Perawatan kendaraan bermotor roda 2 dilaksanakan untuk 12 bulan bagi sebanyak 4 unit kendaraan operasional yang ada. Biaya perawatan kendaraan dinas ini meliputi untuk keperluan operasional bahan bakar, servis berkala, pengurusan perpanjangan surat-surat kendaraan maupun tindakan perbaikan yang diperlukan untuk kendaraan tersebut dapat beroperasi dengan kondisi baik.

9) Langganan Daya dan Jasa

Energi merupakan sumber daya yang mutlak dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Listrik, telepon dan air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kelancaran pelaksanaan tugas sehingga keberadaannya tidak dapat ditawar lagi dan perencanaannya pun harus memperhitungkan tarif dasar listrik serta tarif telepon yang diprediksi dapat mengalami kenaikan di tahun yang akan datang.

Penyediaan langganan daya dan jasa meliputi listrik, telepon dan air harus diselenggarakan selama 12 bulan untuk menjamin terselenggaranya tupoksi di setiap lini substansi/bagian di BBPOM di Yogyakarta.

10) Jasa Pos/Giro/Sertifikat

Kegiatan surat-menyurat dan administrasi perkantoran merupakan hal yang wajib dalam Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai salah satu instansi di dalam wilayah Propinsi DIY maupun sebagai UPTD Badan POM RI, sehingga kegiatan penyediaan jasa pos/giro menjadi kebutuhan mutlak dalam penyelenggaraan administrasi kantor dan lebih jauh lagi dalam membina hubungan baik dengan sesama instansi di Propinsi DIY maupun dengan sesama UPTD Badan POM RI dan antara BBPOM di Yogyakarta dengan Badan POM RI secara vertikal. Dan dengan adanya pengujian secara regional sehingga perlu dilakukan adanya penambahan anggaran surat untuk membiayai pengiriman sampel Balai ke Balai lain. Penyelenggaraan penyediaan jasa pos dilaksanakan selama 12 bulan.

11) Operasional Perkantoran

Kegiatan operasional perkantoran dan pimpinan akan berhasil dan berdaya guna apabila didukung oleh tenaga-tenaga yang handal di setiap bidang pekerjaan termasuk keamanan,



kerumahtanggaan. Sejauh ini di BBPOM di Yogyakarta terdapat tenaga outshoring untuk tenaga kebersihan, keamanan dan driver. Sebagai tindakan pencegahan melalui pembersihan dan perawatan dilakukan dengan jasa cleaning service dilaksanakan selama 12 bulan dengan cara pengadaan lelang. Sistem pengamanan dilaksanakan juga melalui pihak ketiga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kantor, dan kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan pengadaan lelang. Operasionalisasi kendaraan roda 4 dilakukan pengadaan jasa pengemudi selama 12 bulan.

12) Perawatan Sarana Gedung

Seperti halnya pemeliharaan gedung, perawatan sarana kantor ini dilakukan agar seluruh inventaris kantor yang ada dapat berfungsi baik dan mencegah terjadinya kerusakan dini dan memperpanjang usia kemanfaatannya. Hal ini dapat mengurangi terjadinya kondisi yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Perawatan yang akan dilaksanakan meliputi pemeliharaan tabung pemadam api, pemeliharaan AC, pemeliharaan hidran, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan jaringan listrik, pemeliharaan genset dan pemeliharaan jaringan LAN. Seluruh tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan dan akan direncanakan dalam beberapa kali selama satu tahun.

13) Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi/Koordinasi/Evaluasi Terintegrasi

Untuk menjamin koneksi internet yang lancar perlu adanya jaringan/ sistem yang kuat sehingga perlu adanya koneksi internet yang baik yaitu langganan internet Backup, langganan internet ataupun langganan jaringan radio komunikasi amatir dan pembelian lisensi zoom meeting, pembelian Lisensi teamviewer multi user, pembelian Lisensi APP Sheet, pembelian Lisensi google drive yang dilakukan selama 12 bulan.

14) Pembinaan Administrasi BMN

Dalam rangka pengelolaan barang milik negara perlu dibentuk tim pengurus barang milik negara (BMN) sebagai pengelola barang. Kepada tim berhak mendapatkan honor selama 12 bulan layanan untuk 2 (dua) orang.

15) Pengadaan makanan/minuman

Penambah Daya Tahan Tubuh Makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan



biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai yang mendapat tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Dan salah satu tugas Balai Besar POM di Yogyakarta adaah melakukan pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium yang terpapar zat kimia yang dapat memberikan dampak buruk.

16) Pembinaan Administrasi Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan administrasi keuangan perlu dibentuk tim pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, bendahara dan pengelola keuangan yang membantu KPA dan PPK dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Untuk penyusunan laporan keuangan yang akurat juga perlu dibentuk tim pengelola sistem akuntansi instansi (SAI) yang terdiri dari penanggungjawab, pengelola SAIBA, pengelola UAKPA. Tim tersebut berhak mendapatkan honor setiap bulan dan diberikan selama 12 bulan

17) Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan Pemeriksaan kesehatan pekerja dimaksudkan agar pekerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, sehingga dapat melakukan pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan. Pemeriksaan Kesehatan resiko pekerjaan dilakukan untuk semua ASN.

18) Sewa rumah tinggal

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pekerjaan dan dikarenakan mobilitas Kepala Balai yang sering berpindah-pindah sehingga diperlukan adanya sewa rumah tinggal sebagai tempat tinggal Kepala Balai. Dilakukan selama 12 bulan pada awal tahun.

19) Sewa Kendaraan Dalam rangka memudahkan operasional kegiatan yang dilakukan di wilayah Yogyakarta yang dihadiri oleh Kepala Badan atau Eselon I maka perlu diadakan sewa kendaraan Roda 4.

20) Pengadaan Pengelolaan Limbah dan sampah

Dalam rangka pengelolaan limbah sisa bahan kimia yang dihasilkan Balai Besar POM di Yogyakarta tidak mengelola sendiri tetapi melalui pihak ketiga yaitu dengan dikirim melalui



pihak ketiga. Dan dalam rangka arahan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pengelolaan sampah dimohon untuk pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri, sehingga untuk pengelolaan sampah BBPOM di Yogyakarta diserahkan kepada pihak ketiga.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Yogyakarta untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BBPOM di Yogyakarta dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BBPOM di Yogyakarta, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BBPOM di Yogyakarta selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BBPOM di Yogyakarta, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BBPOM di Yogyakarta diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 10. Matriks Kerangka Kinerja BBPOM di Yogyakarta 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	91,00	92,00	93,25	94,50
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95	96
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98,00	98,20	98,40	98,60	98,70
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,67	91	92,75	94	95,5
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,25	97,25	98,25	99,00	99,50
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	94	95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai standar	91,80	92,80	93,80	95,00	95,80
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	86	87	88	89
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,5	81,7	85,5	88	90
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	40	60	80	100
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,44	88,31	89,18	90,06	90,93

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		19	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14	18	20	22	25
		20	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,67	36,9	57,14	78,57	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	83	84	85	86
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
8	Terwujudnya tata kelola	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,15	90,3	90,45	91

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	27	Nilai AKIP UPT BPOM	82,00	82,15	82,30	82,45	83,00
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan obat dan makanan diperlukan anggaran yang mendukung dan memadai. Berikut ini kerangka pendanaan yang diperlukan dalam lima tahun kedepan:

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Yogyakarta 2025 – 2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18.267	8.707	11.548	12.125	13.005
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan prasarana BPOM	14.951	15.100	15.855	16.648	17.499
Total Anggaran	33.218	23.807	27.403	28.773	30.504

Tabel 12. Kerangka Pendanaan Balai Besar POM 2025 – 2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	ALOKASI (Rp dalam jutaan rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	31.174	21.763	25.359	26.729	28.460
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Total Anggaran	33.218	23.807	27.403	28.773	30.504



BAB V PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Rancangan Renstra 2025-2029 ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai oleh BBPOM di Yogyakarta selama periode lima tahun kedepan.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Yogyakarta									33.218	23.807	27.403	28.773	30.504	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									18.267	8.707	11.548	12.125	13.005	BBPOM di Yogyakarta
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	90.00	91.00	92.00	93.25	94.50						BBPOM di Yogyakarta
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	26	27	28	29	30						BBPOM di Yogyakarta
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	91	92	93	94	95						BBPOM di Yogyakarta
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	100	100	100	100	100						BBPOM di Yogyakarta
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	92	93	94	95	96						BBPOM di Yogyakarta
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	98.00	98.20	98.40	98.60	98.70						BBPOM di Yogyakarta
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	90.67	91	92.75	94	95.50						BBPOM di Yogyakarta
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	91	92	93	94	95						BBPOM di Yogyakarta
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	96.25	97.25	98.25	99.00	99.50						BBPOM di Yogyakarta
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	90	91	92	94	95						BBPOM di Yogyakarta
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	91.80	92.80	93.80	95.00	95.80						BBPOM di Yogyakarta
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	85	86	87	88	89						BBPOM di Yogyakarta
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	100	100	100	100	100						BBPOM di Yogyakarta

[illegible]

[illegible]

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	90	91	92	93	94						BBPOM di Yogyakarta
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	14	14	15	15	15						BBPOM di Yogyakarta
	Layanan Publik UPT yang prima													BBPOM di
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90						BBPOM di Yogyakarta
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	291	310	307	321	331						BBPOM di Yogyakarta
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													BBPOM di Yogyakarta
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	90	90.15	90.3	90.45	91						BBPOM di Yogyakarta
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	82.00	82.15	82.30	82.45	83.00						BBPOM di Yogyakarta
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	5	5	5	5	5						BBPOM di Yogyakarta
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40						BBPOM di Yogyakarta
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	1	1	1	1	1						BBPOM di Yogyakarta
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	1	1	1	1	1						BBPOM di Yogyakarta
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	7	29	30	30	30						BBPOM di Yogyakarta
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									14.951	15.100	15.855	16.648	17.499	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	1	1	1	1	1						BBPOM di Yogyakarta
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	1	1	1	1	1						BBPOM di Yogyakarta